



EVALUASI RKPD

2026

TRIWULAN I

KABUPATEN KUTAI TIMUR

Bersama Melangkah
Mewujudkan Kutai Timur
Maju, Sejahtera, dan Berdaya Saing
Berkelanjutan



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

TAHUN 2026



EVALUASI RKPD

KABUPATEN KUTAI TIMUR 2026 TRIWULAN I

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, dokumen *Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026 triwulan I* ini dapat disusun dengan baik.

Dokumen evaluasi ini merupakan bagian penting dalam siklus perencanaan pembangunan daerah, yang berfungsi untuk menilai capaian kinerja pembangunan selama tahun berjalan, mengidentifikasi berbagai permasalahan dan tantangan, serta merumuskan rekomendasi perbaikan sebagai dasar penyusunan kebijakan pada periode berikutnya. Evaluasi RKPD Tahun 2026 triwulan I ini disusun dengan mengacu pada berbagai indikator makro pembangunan, seperti pertumbuhan ekonomi, struktur sektor, PDRB per kapita, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), kemiskinan, ketimpangan, serta kondisi ketenagakerjaan.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pembangunan di Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2026 secara umum tetap berjalan, meskipun dihadapkan pada sejumlah tantangan, terutama perlambatan pertumbuhan ekonomi yang dipengaruhi oleh kontraksi sektor pertambangan sebagai sektor dominan. Di sisi lain, beberapa indikator sosial menunjukkan perkembangan yang positif, seperti peningkatan IPM dan penurunan tingkat kemiskinan. Namun demikian, masih terdapat sejumlah isu strategis yang perlu menjadi perhatian, antara lain peningkatan ketimpangan, tekanan pasar kerja, serta belum optimalnya diversifikasi ekonomi.

Kami menyadari bahwa penyusunan dokumen ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, masukan dan saran yang konstruktif sangat diharapkan untuk penyempurnaan di masa mendatang. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini, baik melalui penyediaan data, dukungan teknis, maupun pemikiran yang konstruktif.

Akhirnya, kami berharap dokumen Evaluasi RKPD Tahun 2026 triwulan I ini dapat memberikan manfaat sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah yang lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Kutai Timur, April 2026

Kepala Bappeda

Kabupaten Kutai Timur

Januar Bayu Irawan, SH., M.H.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.3.1 Maksud	3
1.3.2 Tujuan	3
1.4 Metode Evaluasi	4
1.5 Sistematika Dokumen Evaluasi RKPD	4
BAB 2 CAPAIAN MAKRO PEMBANGUNAN DAERAH	6
2.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi	6
2.2 PDRB per Kapita	7
2.3 Indeks Pembangunan Manusia	8
2.4 Angka Kemiskinan	10
2.5 Indeks Gini	11
2.6 Tingkat Pengangguran Terbuka	11
BAB 3 EVALUASI KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH	14
3.1 Realisasi Pendapatan Tahun 2026	14
3.1.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun 2026	14
3.1.2 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2026	15
3.1.3 Analisis Capaian dan Permasalahan Pendapatan Daerah	16
3.2 Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja Tahun 2026	16
3.3 Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan Tahun 2026	19
3.4 Analisis Struktur Fiskal Daerah Tahun 2026	20
3.5 Implikasi Kebijakan Keuangan Daerah terhadap Pembangunan Tahun 2026	21
BAB 4 PENGENDALIAN PELAKSANAAN RPJMD DALAM RKPD	23
4.1 Konsistensi Tujuan Pembangunan antara RKPD dengan RPJMD	23
4.2 Konsistensi Sasaran Pembangunan antara RKPD dengan RPJMD	26
4.3 Konsistensi Program antara RKPD dengan RPJMD	29
4.4 Konsistensi Indikator Kinerja antara RKPD dengan RPJMD	34
4.5 Konsistensi Target Kinerja antara RKPD dengan RPJMD	38
4.6 Konsistensi Pagu Anggaran antara RKPD dengan RPJMD	104

4.7	Konsistensi antara RKPD dengan RPJMD per Perangkat Daerah	108
BAB 5 PENGENDALIAN PELAKSANAAN RKPD TERHADAP APBD		196
5.1	Konsistensi Program antara RKPD dengan APBD	196
5.2	Konsistensi Kegiatan antara RKPD dengan APBD	200
5.3	Konsistensi Subkegiatan antara RKPD dengan APBD	205
5.4	Konsistensi Target Kinerja antara RKPD dengan APBD	208
5.5	Konsistensi Pagu Anggaran antara RKPD dengan APBD	212
BAB 6 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD		218
6.1	Capaian Indikator Tujuan dan Sasaran Pembangunan	219
6.1.1	Analisis Capaian per Tujuan dan Sasaran	222
6.1.2	Simpulan Umum	222
6.2	Capaian Indikator Kinerja dan Keuangan pada Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Perangkat Daerah	223
BAB 7 FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT		228
BAB 8 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI		230
8.1	Kesimpulan	230
8.2	Rekomendasi	231

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kutai Timur (2021–2025)	6
Tabel 2.2 PDRB per Kapita Kabupaten Kutai Timur (2021–2025)	8
Tabel 2.3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kutai Timur (2021–2025)	9
Tabel 2.4 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin.....	10
Tabel 2.5 Indeks Gini Kabupaten Kutai Timur (2024–2025)	11
Tabel 2.6 Ketenagakerjaan Kabupaten Kutai Timur (2024–2025)	12
Tabel 3.1 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026	15
Tabel 3.2 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026	17
Tabel 3.3 Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2026	19
Tabel 4.1 Perbandingan Tujuan Pembangunan pada RPJMD dan RKPD Tahun 2026	24
Tabel 4.2 Perbandingan Sasaran Pembangunan pada RPJMD dan RKPD Tahun 2026	26
Tabel 4.3 Konsistensi Jumlah Program antara RPJMD dan RKPD Tahun 2026 per Perangkat Daerah	29
Tabel 4.4 Konsistensi Indikator Kinerja antara RKPD dengan RPJMD Tahun 2026	35
Tabel 4.5 Perbandingan Target Kinerja RPJMD dan RKPD Tahun 2026	38
Tabel 4.6 Konsistensi Pagu Anggaran antara RPJMD dengan RKPD Tahun 2026.....	104
Tabel 4.7 Indikator, Target, dan Pagu per OPD pada RPJMD dan RKPD	10909
Tabel 5.1 Konsistensi Program RKPD dengan APBD Tahun Anggaran 2026	197
Tabel 5.2 Konsistensi Kegiatan RKPD dengan APBD Tahun Anggaran 2026	201
Tabel 5.3 Konsistensi Sub Kegiatan RKPD dengan APBD	205
Tabel 5.4 Konsistensi Target Kinerja RKPD dengan APBD Tahun Anggaran 2026.....	210
Tabel 5.5 Konsistensi Pagu Anggaran RKPD dengan APBD Tahun Anggaran 2026.....	213
Tabel 6.1 Interval Nilai dan Kriteria Penilaian	219
Tabel 6.2 Capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran.....	220
Tabel 6.3 Capaian Indikator Kinerja dan Keuangan pada Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Perangkat Daerah.....	223

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah merupakan proses pemantauan, supervisi, dan penilaian terhadap penyusunan serta pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah untuk memastikan bahwa target kinerja dan realisasi keuangan dapat dicapai secara ekonomis, efisien, dan efektif. Evaluasi RKPD menjadi instrumen krusial bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur untuk memastikan kesinambungan antara target tahunan dengan realita di lapangan. Evaluasi diperlukan agar pemerintah daerah memperoleh gambaran yang utuh mengenai tingkat ketercapaian sasaran pembangunan, kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan, serta berbagai faktor yang memengaruhi hasil pembangunan daerah. Dengan adanya evaluasi yang dilaksanakan secara sistematis, pemerintah daerah dapat menilai apakah program, kegiatan, dan subkegiatan yang direncanakan benar-benar berjalan sesuai arah kebijakan yang telah ditetapkan. Evaluasi juga menjadi instrumen untuk memastikan bahwa penggunaan sumber daya pembangunan daerah memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat dan menjadi dasar penting bagi perbaikan tata kelola birokrasi dan ketepatan sasaran pembangunan di Kutai Timur.

Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada dasarnya mencakup tiga ruang lingkup utama, yaitu pengendalian terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, pengendalian terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah, dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Ketiga ruang lingkup tersebut menunjukkan bahwa pembangunan daerah harus dipantau sejak tahap perencanaan hingga tahap hasil. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari tersusunnya dokumen perencanaan, tetapi juga dari konsistensi pelaksanaan dan ketercapaian indikator yang telah ditetapkan. Dalam konteks RKPD, evaluasi berfungsi untuk melihat apakah dokumen tahunan pembangunan daerah telah dijabarkan secara memadai ke dalam penganggaran, diimplementasikan secara tepat, dan menghasilkan capaian yang sesuai dengan sasaran. Pendekatan ini penting karena perencanaan pembangunan daerah harus mampu menjamin kesinambungan antara kebijakan, pelaksanaan, dan hasil. Apabila terdapat ketidaksesuaian pada salah satu tahapan tersebut, maka kualitas pembangunan daerah akan ikut terpengaruh. Karena itu, evaluasi RKPD menjadi kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan dari upaya peningkatan akuntabilitas dan efektivitas pemerintahan daerah.

Pengendalian terhadap perumusan kebijakan pembangunan daerah bertujuan untuk memastikan bahwa perencanaan disusun sesuai ketentuan perundang-undangan, konsisten dengan dokumen pembangunan jangka panjang dan jangka menengah, selaras antarsektor, serta sinkron dengan kebijakan pembangunan provinsi dan nasional. Sementara itu, pengendalian terhadap pelaksanaan rencana pembangunan diarahkan untuk menjamin konsistensi antara RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah, KUA-PPAS, APBD, RKA-PD, dan DPA-PD. Dalam praktiknya, konsistensi tersebut sangat menentukan kualitas penyelenggaraan pembangunan daerah karena ketidaksinkronan antardokumen akan berpengaruh terhadap capaian target, kualitas belanja, dan efektivitas program. Evaluasi RKPD tahun 2026 triwulan I perlu diletakkan sebagai instrumen untuk membaca secara lebih

mendalam hubungan antara dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan. Melalui evaluasi, dapat diketahui apakah target-target tahunan pembangunan telah dirumuskan secara realistis, didukung oleh program yang tepat, dan dilaksanakan dengan tingkat kinerja yang memadai. Selain itu, evaluasi juga dapat menampilkan area-area yang masih memerlukan penguatan koordinasi, perbaikan tata kelola, dan penyesuaian strategi pelaksanaan. Dengan demikian, evaluasi RKPD tidak hanya bersifat retrospektif, tetapi juga bersifat korektif dan antisipatif.

Evaluasi RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026 triwulan I menjadi semakin penting karena tahun 2026 merupakan periode yang sangat menentukan dalam kesinambungan pelaksanaan pembangunan daerah. Pada tahun ini, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa agenda pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026–2029 tetap berada pada jalur pencapaian yang tepat. Tahun 2026 juga merupakan tahun yang strategis untuk menilai efektivitas program prioritas, kualitas realisasi anggaran, serta kemampuan perangkat daerah dalam menjaga konsistensi pelaksanaan pembangunan di tengah dinamika kebutuhan daerah. Dalam situasi seperti itu, evaluasi RKPD harus mampu menunjukkan capaian makro pembangunan, realisasi kebijakan keuangan daerah, tingkat keselarasan antardokumen perencanaan, hasil pelaksanaan program dan kegiatan, serta faktor-faktor yang mendorong maupun memengaruhi capaian kinerja. Hasil evaluasi ini menjadi penting karena akan menjadi bahan perbaikan bagi penyusunan dokumen perencanaan tahun berikutnya, sekaligus menjadi dasar pengambilan keputusan yang lebih tepat dalam pengendalian pembangunan daerah. Oleh sebab itu, dokumen ini disusun untuk menyajikan potret riil kinerja pembangunan yang akuntabel bagi seluruh pemangku kepentingan. Atas dasar itulah penyusunan dokumen evaluasi ini dilakukan.

1.2 Dasar Hukum

Evaluasi RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026 triwulan I disusun dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2006–2026;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021–2026;
11. Peraturan Bupati Kutai Timur N0 18 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Evaluasi RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026 triwulan I dimaksudkan untuk melakukan penilaian menyeluruh terhadap pelaksanaan RKPD, konsistensi RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya, serta pencapaian target kinerja pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Evaluasi ini mencakup aspek capaian makro pembangunan, kebijakan keuangan daerah, konsistensi program dan indikator kinerja, hasil pelaksanaan pembangunan, serta faktor pendorong dan faktor penghambat pelaksanaan RKPD. Melalui evaluasi ini diharapkan diperoleh gambaran yang objektif mengenai tingkat keberhasilan pembangunan daerah selama tahun berjalan. Selain itu, evaluasi ini juga dimaksudkan sebagai sarana pengendalian untuk memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan tetap selaras dengan arah kebijakan daerah. Dengan demikian, dokumen Evaluasi RKPD tidak hanya berfungsi sebagai bahan pelaporan, tetapi juga sebagai dasar perbaikan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah pada periode berikutnya.

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan dari Evaluasi RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026 triwulan I adalah untuk:

1. Mengukur capaian makro pembangunan daerah, yaitu menilai realisasi indikator makro pembangunan daerah yang tercermin dalam RKPD Tahun 2026, meliputi laju pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita, indeks pembangunan manusia, angka kemiskinan, indeks Gini, dan tingkat pengangguran terbuka;
2. Menganalisis kebijakan keuangan daerah, yaitu menilai realisasi keuangan daerah periode sebelumnya dan penyesuaiannya dalam RKPD Tahun 2026 berdasarkan dokumen keuangan daerah yang berlaku;
3. Menilai konsistensi perencanaan dan implementasi, yaitu menganalisis kesesuaian antara RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya dalam hal tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, target, dan pagu anggaran;
4. Mengevaluasi hasil pelaksanaan RKPD, yaitu menilai capaian hasil pelaksanaan RKPD melalui analisis indikator capaian pada tujuan, sasaran, program prioritas, kinerja dan

keuangan pada program, kegiatan, dan sub kegiatan, serta kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;

5. Mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat, yaitu menganalisis faktor-faktor yang mendorong dan memengaruhi pencapaian kinerja pembangunan dan pelaksanaan program RKPD, baik dari aspek kelembagaan, pendanaan, koordinasi, maupun teknis pelaksanaan;
6. Merumuskan rekomendasi kebijakan, yaitu menyusun rekomendasi strategis sebagai dasar penyempurnaan RKPD pada periode berikutnya dan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan kualitas perencanaan serta pelaksanaan pembangunan daerah.

1.4 Metode Evaluasi

Evaluasi RKPD dilakukan melalui integrasi tiga pendekatan utama yang saling melengkapi untuk menghasilkan gambaran kinerja yang komprehensif. Proses diawali dengan **analisis konsistensi** untuk menguji derajat keselarasan antara perencanaan dan penganggaran. Melalui metode ini, dilakukan komparasi sistematis terhadap indikator kinerja dan pagu anggaran antara dokumen RKPD dengan dokumen acuan lainnya. Langkah ini krusial untuk memastikan bahwa penjabaran kebijakan dari level jangka menengah hingga dokumen tahunan tetap sinkron, sekaligus menjadi parameter kualitas keterpaduan dokumen pembangunan daerah pada masing-masing Perangkat Daerah.

Selanjutnya, efektivitas pelaksanaan program diukur melalui **analisis capaian**. Fokus utama analisis ini adalah membedah realisasi kinerja fisik dan keuangan dengan membandingkan target yang ditetapkan terhadap pencapaian aktual di lapangan. Lingkup pengukurannya mencakup indikator makro pembangunan serta realisasi kebijakan fiskal daerah tahun 2026. Hasil dari analisis ini memberikan gambaran objektif mengenai sejauh mana program, kegiatan, dan sub-kegiatan mampu mengeskalasi pencapaian target pembangunan daerah yang telah direncanakan.

Guna memberikan kedalaman interpretasi, evaluasi ini diperkuat dengan **pendekatan kualitatif**. Melalui penelaahan dokumen, koordinasi lintas Perangkat Daerah, dan pembahasan internal, dilakukan pendalaman terhadap berbagai faktor determinan yang memengaruhi kinerja. Pendekatan ini berfungsi untuk mengidentifikasi variabel pendorong maupun penghambat yang seringkali tidak terpotret secara utuh dalam data kuantitatif. Dengan menangkap persoalan spesifik pada setiap urusan pemerintahan, hasil identifikasi ini kemudian menjadi basis fundamental dalam merumuskan rekomendasi strategis bagi peningkatan efektivitas pelaksanaan RKPD pada periode berikutnya

Evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2026 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026–2029 dengan menggunakan data evaluasi tahun 2026 triwulan I. Evaluasi ini mencakup seluruh Perangkat Daerah yang terkait dengan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, baik urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan, maupun fungsi penunjang pemerintahan daerah.

1.5 Sistematika Dokumen Evaluasi RKPD

Dokumen Evaluasi RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026 disusun secara sistematis untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang kinerja pembangunan daerah dan menjadi dasar

penyusunan dokumen perencanaan ke depan. Adapun sistematika dokumen Evaluasi RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026 triwulan I adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, metode evaluasi, serta sistematika dokumen Evaluasi RKPD.

BAB II : CAPAIAN MAKRO PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini memuat analisis capaian makro pembangunan daerah, meliputi laju pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita, indeks pembangunan manusia, angka kemiskinan, indeks Gini, dan tingkat pengangguran terbuka.

BAB III : EVALUASI KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini memuat analisis evaluasi kebijakan keuangan daerah yang mencakup realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah.

BAB IV : PENGENDALIAN PELAKSANAAN DOKUMEN PERENCANAAN

Bab ini memuat analisis konsistensi antara RKPD dengan dokumen perencanaan daerah, baik dari sisi tujuan, sasaran, program, indikator kinerja, target, maupun pagu anggaran.

BAB V : PENGENDALIAN PELAKSANAAN RKPD TERHADAP APBD

Bab ini memuat analisis konsistensi antara RKPD dengan APBD yang mencakup program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, target, dan pagu anggaran.

BAB VI : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD

Bab ini memuat analisis capaian hasil pelaksanaan RKPD, baik pada level tujuan dan sasaran pembangunan maupun pada level program, kegiatan, dan sub kegiatan Perangkat Daerah.

BAB VII : FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT

Bab ini memuat identifikasi faktor pendorong dan faktor penghambat pelaksanaan RKPD serta pengaruhnya terhadap pencapaian kinerja pembangunan daerah.

BAB VIII : RUMUSAN PERMASALAHAN HASIL EVALUASI

Bab ini memuat rumusan permasalahan pembangunan daerah dan identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah berdasarkan hasil evaluasi.

BAB IX : KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Bab ini memuat kesimpulan hasil evaluasi RKPD dan rekomendasi sebagai bahan penyempurnaan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah pada periode berikutnya.

BAB 2

CAPAIAN MAKRO PEMBANGUNAN DAERAH

2.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2026 tercatat sebesar 1,05 persen. Angka ini menunjukkan bahwa perekonomian daerah masih berada pada zona pertumbuhan, namun lajunya melambat sangat tajam dibandingkan dengan tahun 2024 yang mencapai 9,82 persen. Dalam deret waktu 2021–2026, pola pertumbuhan ekonomi Kutai Timur memperlihatkan fluktuasi yang cukup kuat, yaitu 5,58 persen pada tahun 2021, -0,89 persen pada tahun 2022, 7,71 persen pada tahun 2023, 9,82 persen pada tahun 2024, dan kembali turun menjadi 1,05 persen pada tahun 2026. Secara komparatif, capaian ini juga berada di bawah rata-rata Provinsi Kalimantan Timur sebesar 4,53 persen dan rata-rata nasional sebesar 5,11 persen. Kondisi tersebut menandakan bahwa pada tahun 2026 Kutai Timur menghadapi perlambatan ekonomi yang lebih dalam dibandingkan dengan wilayah pembandingnya.

Perlambatan ini terutama disebabkan oleh kontraksi sektor pertambangan sebesar -0,99 persen, sementara sektor tersebut masih menjadi tulang punggung struktur ekonomi Kutai Timur dengan kontribusi 70,17 persen terhadap total PDRB. Dengan bobot sebesar itu, penurunan kecil pada sektor pertambangan langsung menekan laju pertumbuhan ekonomi total. Dokumen indikator strategis BPS Kutai Timur secara eksplisit menyebut bahwa kontraksi ini berkaitan dengan penurunan aktivitas produksi batubara, yang terjadi seiring melemahnya permintaan dan penyesuaian produksi. Artinya, perlambatan ekonomi Kutai Timur pada tahun 2026 bukan terutama karena seluruh lapangan usaha melemah secara bersamaan, melainkan karena sektor yang paling dominan sedang mengalami koreksi. Dalam struktur ekonomi yang sangat terkonsentrasi, gejolak pada satu sektor unggulan memang akan lebih cepat diterjemahkan menjadi perlambatan agregat daerah.

Tabel 2.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kutai Timur (2021–2026)

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (%)	Perubahan	Keterangan
2021	5,58%	—	Pertumbuhan moderat
2022	-0,89%	↓	Kontraksi
2023	7,71%	↑	Pemulihan
2024	9,82%	↑ tinggi	Puncak pertumbuhan
2026	1,05%	↓ tajam	Perlambatan signifikan

Jika dibaca lebih jauh, penjelasan mengenai melemahnya permintaan dan penyesuaian produksi batubara di Kutai Timur juga sejalan dengan perkembangan sektor batubara nasional pada tahun 2026. Kementerian ESDM mencatat bahwa Harga Batubara Acuan (HBA) periode pertama Juni 2026 turun menjadi USD100,97 per ton, lebih rendah USD22,03 per ton dibandingkan periode yang sama tahun 2024 atau turun 17,91 persen year-on-year. Di awal 2026, Kementerian ESDM juga menyampaikan bahwa pemerintah pada awal 2026 menyampaikan rencana penataan ulang kuota produksi batubara dan revisi target produksi nasional sebagai respons atas kondisi pasar dan kebutuhan penyesuaian produksi. Dengan demikian, kontraksi pertambangan di Kutai Timur

dapat dipahami sebagai bagian dari tekanan yang lebih luas pada industri batubara, baik dari sisi harga maupun penyesuaian volume produksi.

Walaupun demikian, perlambatan ekonomi Kutai Timur pada tahun 2026 tidak berarti seluruh perekonomian daerah sedang melemah. Sejumlah lapangan usaha justru tumbuh cukup tinggi. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tumbuh 9,32 persen dengan kontribusi 10,96 persen. Industri Pengolahan tumbuh 19,12 persen dengan kontribusi 5,81 persen. Konstruksi tumbuh 7,19 persen, Perdagangan tumbuh 11,09 persen, dan Transportasi dan Pergudangan tumbuh 10,46 persen. Dokumen BPS Kutai Timur juga menyebut bahwa pertumbuhan tinggi industri pengolahan didorong oleh mulai beroperasinya pabrik semen di Kabupaten Kutai Timur. Fakta ini penting karena menunjukkan bahwa pelemahan agregat daerah terutama berasal dari sektor dominan, sedangkan sektor-sektor nonpertambangan justru memperlihatkan penguatan yang cukup nyata.

Analisis ekonomi Kutai Timur pada tahun 2026 memberikan sinyal krusial bagi evaluasi pembangunan daerah, terutama ketika sektor pertambangan dikeluarkan dari perhitungan. Tanpa sektor ekstraktif tersebut, ekonomi daerah justru mencatatkan pertumbuhan signifikan sekitar 11 persen. Fenomena ini mengindikasikan bahwa fondasi ekonomi nonpertambangan mulai menguat dan agenda transformasi ekonomi daerah telah menunjukkan pergerakan nyata, meskipun belum sepenuhnya mampu menyeimbangkan dominasi sektor tambang.

Kondisi tersebut sekaligus menegaskan bahwa kualitas pertumbuhan ekonomi Kutai Timur kini tidak dapat lagi dinilai hanya melalui angka agregat total, melainkan harus dibedah melalui komposisi sektoralnya secara mendalam. Pertumbuhan positif di sektor non-tambang ini harus dimaknai sebagai momentum strategis. Pada saat yang sama, perlambatan ekonomi makro di tahun 2026 menjadi alarm bagi pemerintah daerah untuk segera mengonkretkan langkah-langkah diversifikasi ekonomi guna mereduksi ketergantungan yang tinggi terhadap komoditas batubara.

Perubahan struktur ekonomi 2023–2026 memperkuat kesimpulan tersebut. Kontribusi sektor pertambangan turun dari 79,67 persen pada tahun 2023 menjadi 75,53 persen pada tahun 2024 dan 70,17 persen pada tahun 2026. Sebaliknya, kontribusi sektor pertanian meningkat dari 7,66 persen menjadi 10,96 persen, dan industri pengolahan naik dari 3,22 persen menjadi 5,81 persen. Pergeseran ini belum cukup untuk menghilangkan ketergantungan pada pertambangan, tetapi sudah menunjukkan arah yang lebih sehat bagi struktur ekonomi daerah. Makna strategis pertumbuhan ekonomi 2026 bukan terletak pada rendahnya angka 1,05 persen semata, melainkan pada situasi bahwa Kutai Timur masih rentan terhadap siklus komoditas batubara, namun pada saat yang sama mulai memiliki penyangga pertumbuhan baru dari pertanian dan industri pengolahan. Agenda kebijakan yang relevan ke depan adalah mempercepat hilirisasi, memperkuat rantai nilai sektor primer, dan memperluas sektor-sektor yang menciptakan nilai tambah di luar pertambangan.

2.2 PDRB per Kapita

Pada tahun 2026, PDRB per kapita Kabupaten Kutai Timur tercatat sebesar Rp325,18 juta, menurun dari Rp344,49 juta pada tahun 2024. Dalam tren 2021–2026, indikator ini bergerak fluktuatif, yakni Rp310,29 juta pada tahun 2021, melonjak menjadi Rp471,27 juta pada tahun 2022, turun ke Rp369,42 juta pada tahun 2023, turun lagi menjadi Rp344,49 juta pada tahun 2024, dan kembali turun pada tahun 2026. Penurunan dua tahun terakhir menunjukkan bahwa nilai tambah ekonomi rata-rata per penduduk sedang mengalami koreksi. Namun demikian,

secara komparatif posisi Kutai Timur masih sangat tinggi, jauh di atas rata-rata Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp208,33 juta dan rata-rata nasional sebesar Rp83,70 juta. Di tingkat kabupaten/kota se-Kalimantan Timur, PDRB per kapita Kutai Timur masih berada pada posisi sangat tinggi dan menempati kelompok teratas, yakni setelah Kota Bontang.

Tabel 2.2 PDRB per Kapita Kabupaten Kutai Timur (2021–2026)

Tahun	PDRB per Kapita (Rp Juta)	Perubahan	Keterangan
2021	310,29	—	Posisi awal
2022	471,27	↑ sangat tinggi	Lonjakan (boom)
2023	369,42	↓ tajam	Koreksi
2024	344,49	↓	Penurunan berlanjut
2026	325,18	↓	Koreksi dua tahun terakhir

Tingginya angka PDRB per kapita di Kabupaten Kutai Timur tidak dapat dipisahkan dari dominasi sektor pertambangan yang menyumbang nilai tambah sangat besar bagi perekonomian daerah. Nilai tersebut sebenarnya lebih mencerminkan kapasitas ekonomi agregat atau besarnya 'mesin ekonomi' wilayah, ketimbang menjadi cerminan langsung dari pemerataan kesejahteraan masyarakat di tingkat rumah tangga. Fenomena khas pada daerah yang sangat bergantung pada sektor ekstraktif ini menunjukkan bahwa meskipun pendapatan regional rata-rata terlihat sangat menonjol, distribusinya tidak selalu tersebar secara proporsional ke seluruh lapisan penduduk. Oleh karena itu, capaian PDRB per kapita yang tinggi ini harus selalu dianalisis secara beriringan dengan indikator kemiskinan, ketimpangan, dan indeks pembangunan manusia guna mendapatkan potret kesejahteraan riil yang lebih akurat.

Penurunan PDRB per kapita pada tahun 2026 juga sejalan dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi dan menurunnya PDRB atas dasar harga berlaku. Situasi ini menunjukkan bahwa kapasitas ekonomi daerah tetap besar, tetapi sedang berada dalam fase penyesuaian akibat melemahnya sektor dominan. Dari sudut pandang evaluasi pembangunan, keadaan ini mengandung dua implikasi.

- ❖ Pertama, ketahanan ekonomi daerah belum sepenuhnya terbentuk karena indikator kesejahteraan makro masih sangat dipengaruhi oleh fluktuasi komoditas.
- ❖ Kedua, peningkatan sektor pertanian dalam arti luas dan industri pengolahan perlu terus didorong agar pada masa mendatang PDRB per kapita tidak lagi terlalu bergantung pada satu sektor saja. Semakin beragam sumber pertumbuhan, semakin stabil pula kapasitas ekonomi per penduduk yang dapat dipertahankan daerah.

2.3 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2026 mencapai 76,48, meningkat dari 75,90 pada tahun 2024. Dalam lima tahun terakhir, IPM Kutai Timur menunjukkan tren naik yang konsisten, yaitu 74,15 pada tahun 2021, 74,69 pada tahun 2022, 75,33 pada tahun 2023, 75,90 pada tahun 2024, dan 76,48 pada tahun 2026. Capaian tersebut menempatkan Kutai Timur dalam kategori tinggi. Secara komparatif, IPM Kutai Timur memang masih di bawah rata-rata Provinsi Kalimantan Timur sebesar 79,39, tetapi sudah melampaui rata-rata nasional sebesar 75,90. Dengan demikian, pembangunan manusia di Kutai Timur bergerak positif, walaupun ruang peningkatannya masih cukup besar.

Kenaikan IPM 2026 terjadi karena seluruh dimensi pembentuk IPM mengalami peningkatan, yakni dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Ini penting karena kenaikan IPM yang berasal dari semua dimensi jauh lebih bermakna dibandingkan dengan kenaikan yang hanya ditopang oleh satu komponen saja. Artinya, perbaikan kualitas hidup masyarakat Kutai Timur pada tahun 2026 tidak bersifat parsial. Peningkatan ini menandakan bahwa di tengah perlambatan ekonomi agregat, akses masyarakat terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan kemampuan hidup layak relatif tetap membaik. Dalam evaluasi pembangunan, situasi seperti ini menunjukkan bahwa fondasi sosial daerah cenderung lebih stabil daripada fluktuasi ekonominya.

Tabel 2.3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kutai Timur (2021–2026)

Tahun	IPM	Perubahan	Keterangan
2021	74,15	—	Posisi awal
2022	74,69	↑	Peningkatan bertahap
2023	75,33	↑	Konsisten naik
2024	75,90	↑	Mendekati kategori tinggi
2026	76,48	↑	Masuk kategori tinggi

Dari dimensi pendidikan, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) mencapai 9,48 tahun, sedangkan Harapan Lama Sekolah (HLS) mencapai 13,22 tahun. RLS 9,48 tahun berarti rata-rata penduduk usia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan hampir sampai awal SMA. HLS 13,22 tahun menunjukkan bahwa anak usia 7 tahun di Kutai Timur memiliki peluang untuk menempuh pendidikan hingga jenjang menengah atas, bahkan awal pendidikan tinggi. Secara komparatif, RLS Kutai Timur sudah lebih tinggi dari rata-rata nasional 9,07 tahun, tetapi masih di bawah rata-rata provinsi 10,10 tahun. HLS Kutai Timur sudah melampaui standar wajib belajar 12 tahun, meskipun masih sedikit di bawah rata-rata nasional 13,30 tahun dan rata-rata provinsi 14,04 tahun. Ini berarti akses pendidikan dasar dan menengah sudah relatif baik, tetapi tantangan terbesar terletak pada keberlanjutan pendidikan menuju jenjang yang lebih tinggi dan pemerataan kualitas pendidikan antarkelompok masyarakat.

Dari dimensi kesehatan, Angka Harapan Hidup terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir, yang menunjukkan perbaikan pada kualitas kesehatan masyarakat secara umum. Kenaikan AHH biasanya mencerminkan membaiknya akses layanan kesehatan, penurunan risiko kematian dini, peningkatan kesadaran hidup sehat, serta semakin baiknya faktor pendukung seperti sanitasi, air bersih, dan pelayanan kesehatan ibu-anak. Dalam konteks Kutai Timur, keberlanjutan peningkatan dimensi kesehatan menjadi sinyal positif bahwa hasil pembangunan sosial tidak sepenuhnya terganggu oleh volatilitas ekonomi makro. Hal ini juga penting karena kesehatan merupakan fondasi produktivitas jangka panjang, sehingga penguatan dimensi kesehatan akan memberikan dampak tidak hanya pada kualitas hidup, tetapi juga pada daya saing sumber daya manusia daerah.

Dari dimensi standar hidup layak, pengeluaran per kapita yang disesuaikan juga meningkat dan ikut mendorong kenaikan IPM. Namun, jika dibandingkan dengan PDRB per kapita Kutai Timur yang sangat tinggi, peningkatan standar hidup riil masyarakat ini masih menunjukkan adanya jarak antara kekuatan ekonomi agregat dan kesejahteraan yang dirasakan secara langsung oleh penduduk. Di sinilah letak makna penting IPM dalam evaluasi RKPD. IPM mengoreksi pembacaan yang terlalu bertumpu pada indikator ekonomi makro semata, dengan menunjukkan seberapa

jauh pertumbuhan telah diterjemahkan menjadi kualitas hidup. Kenaikan IPM Kutai Timur tahun 2026 patut dinilai positif, tetapi tetap perlu diikuti kebijakan yang memperkuat mutu sekolah, mengurangi putus sekolah, memperluas akses layanan kesehatan yang bermutu, dan meningkatkan daya beli riil masyarakat secara lebih merata.

2.4 Angka Kemiskinan

Pada tahun 2026, garis kemiskinan Kabupaten Kutai Timur tercatat sebesar Rp773.239 per kapita per bulan, naik dari Rp753.332 pada tahun 2024. Dengan asumsi satu rumah tangga terdiri atas empat orang, maka kebutuhan minimum untuk berada di atas garis kemiskinan berada pada kisaran Rp3,09 juta per rumah tangga per bulan. Kenaikan garis kemiskinan ini menunjukkan bahwa biaya minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar terus meningkat. Dari sudut pandang evaluasi pembangunan, situasi ini menandakan bahwa tekanan biaya hidup masih tetap ada, sehingga pengurangan kemiskinan harus bekerja lebih keras karena ambang kebutuhan dasar juga naik.

Di tengah kenaikan garis kemiskinan tersebut, jumlah penduduk miskin Kutai Timur justru turun dari 37,11 ribu jiwa pada tahun 2024 menjadi 34,91 ribu jiwa pada tahun 2026. Sejalan dengan itu, persentase penduduk miskin juga turun dari 8,81 persen menjadi 8,07 persen. Secara komparatif, angka ini masih lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Kalimantan Timur sebesar 5,17 persen, tetapi sudah sedikit lebih baik dari rata-rata nasional sebesar 8,47 persen. Penurunan ini dapat dibaca sebagai sinyal bahwa secara kuantitatif sebagian rumah tangga berhasil keluar dari kemiskinan. Dokumen BPS Kutai Timur mengaitkan perkembangan tersebut dengan membaiknya aktivitas ekonomi, meningkatnya akses kesempatan kerja, serta berjalannya program perlindungan sosial bagi rumah tangga miskin dan rentan.

Tabel 2.4 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	Persentase (%)	Perubahan	Keterangan
2024	37,11	8,81%	—	Kondisi awal
2026	34,91	8,07%	↓	Penurunan kemiskinan

Namun, penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin pada tahun 2026 belum sepenuhnya berarti kualitas kemiskinan ikut membaik. Hal ini terlihat dari Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) yang naik dari 1,14 menjadi 1,20, serta Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) yang naik dari 0,24 menjadi 0,26. Kenaikan P1 berarti rata-rata jarak pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan justru sedikit melebar. Kenaikan P2 menunjukkan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin juga sedikit meningkat. Ini menandakan bahwa rumah tangga yang berhasil keluar dari kemiskinan kemungkinan besar adalah kelompok miskin ringan yang posisinya dekat dengan garis kemiskinan, sedangkan kelompok yang masih tersisa adalah rumah tangga miskin yang lebih kronis dan lebih sulit dientaskan.

Dengan demikian, kondisi kemiskinan Kutai Timur pada tahun 2026 memperlihatkan paradoks yang perlu menjadi perhatian khusus. Secara angka agregat, keadaan membaik. Namun, secara kualitas, kelompok miskin yang tersisa justru cenderung lebih rentan dan lebih tertinggal. Inilah sebabnya kebijakan penanggulangan kemiskinan ke depan tidak cukup hanya berorientasi pada penurunan angka kemiskinan total, tetapi juga harus lebih tajam dalam menyasar kelompok

miskin kronis. Intervensi yang relevan bukan hanya bantuan sosial, melainkan juga penguatan akses kerja produktif, peningkatan aset ekonomi rumah tangga miskin, dukungan pendidikan bagi keluarga rentan, dan perluasan layanan dasar yang lebih terarah. Dengan pendekatan demikian, penurunan kemiskinan akan menjadi lebih berkualitas, bukan sekadar turun secara statistik.

2.5 Indeks Gini

Indeks Gini Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2026 tercatat sebesar 0,305. Nilai ini meningkat dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebesar 0,283, tetapi masih berada pada kategori ketimpangan sedang. Secara komparatif, indeks Gini Kutai Timur masih sedikit lebih rendah dari rata-rata Provinsi Kalimantan Timur sebesar 0,312 dan jauh lebih rendah dari rata-rata nasional sebesar 0,375. Ini menunjukkan bahwa distribusi pengeluaran di Kutai Timur secara umum masih relatif lebih baik daripada rata-rata nasional, walaupun pada tahun 2026 terjadi kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Tabel 2.5 Indeks Gini Kabupaten Kutai Timur (2024–2026)

Tahun	Indeks Gini	Perubahan	Kategori Ketimpangan	Keterangan
2024	0,283	—	Sedang	Distribusi relatif merata
2026	0,305	↑	Sedang	Ketimpangan meningkat

Kenaikan indeks gini pada tahun 2026 dapat dibaca sebagai konsekuensi dari struktur ekonomi yang belum sepenuhnya inklusif. Dalam perekonomian yang masih sangat didominasi pertambangan dan sektor-sektor bernilai tambah tinggi tetapi padat modal, manfaat pertumbuhan cenderung lebih cepat terkonsentrasi pada kelompok tertentu. Sementara itu, rumah tangga yang berada pada kelompok bawah tidak selalu menerima dampak peningkatan ekonomi dengan kecepatan yang sama. Pada tahun 2026, penurunan kemiskinan memang terjadi, tetapi pada saat bersamaan kedalaman dan keparahan kemiskinan meningkat. Kombinasi indikator ini mengindikasikan bahwa perbaikan kesejahteraan belum merata di seluruh lapisan penduduk. Kelompok yang berhasil naik kelas keluar dari kemiskinan ada, tetapi distribusi manfaat pembangunan secara keseluruhan masih belum cukup merata.

Dari perspektif kualitas pembangunan, kondisi ini penting karena menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi atau PDRB per kapita yang besar tidak otomatis menghasilkan pemerataan. Kenaikan indeks gini adalah pengingat bahwa agenda pembangunan daerah harus memberi perhatian lebih besar pada distribusi manfaat. Penguatan sektor pertanian rakyat, UMKM, industri pengolahan yang menyerap banyak tenaga kerja, konektivitas wilayah, kualitas pendidikan, dan akses terhadap peluang usaha menjadi sangat penting agar kelompok menengah bawah memperoleh bagian yang lebih besar dari pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan kata lain, tantangan Kutai Timur bukan hanya menumbuhkan ekonomi, tetapi menumbuhkan ekonomi yang hasilnya semakin tersebar.

2.6 Tingkat Pengangguran Terbuka

Kondisi ketenagakerjaan Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2026 menunjukkan tekanan yang masih cukup nyata. Jumlah angkatan kerja meningkat dari 236.869 jiwa pada tahun 2024 menjadi 240.746 jiwa pada tahun 2026. Namun, peningkatan ini tidak diikuti oleh penyerapan kerja yang

sepadan. Jumlah pengangguran terbuka naik dari 13.643 jiwa menjadi 14.915 jiwa, sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) meningkat dari 5,76 persen menjadi 6,20 persen. Secara komparatif, TPT Kutai Timur berada di atas rata-rata Provinsi Kalimantan Timur sebesar 5,18 persen dan rata-rata nasional sebesar 4,85 persen. Hal ini menunjukkan bahwa tekanan pasar kerja di Kutai Timur relatif lebih berat dibandingkan banyak daerah lain.

Tabel 2.6 Ketenagakerjaan Kabupaten Kutai Timur (2024–2026)

Indikator	2024	2026	Perubahan	Keterangan
Angkatan Kerja (jiwa)	236.869	240.746	↑	Partisipasi meningkat
Pengangguran Terbuka (jiwa)	13.643	14.915	↑	Pengangguran bertambah
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,76%	6,20%	↑	Tekanan pasar kerja meningkat

Dokumen BPS Kutai Timur menjelaskan bahwa kenaikan TPT dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu fluktuasi sektor pertambangan dan konstruksi, berkurangnya proyek tenaga kerja padat karya, serta fenomena *educated unemployment*. Penjelasan ini sangat relevan dengan struktur ekonomi daerah. Ketika sektor pertambangan melambat dan konstruksi tidak sekuat periode sebelumnya, pasar kerja lokal langsung terkena dampak karena dua sektor tersebut selama ini menjadi salah satu pintu penyerapan kerja formal maupun semi formal. Pada saat yang sama, tidak semua sektor yang sedang tumbuh, seperti industri pengolahan dan jasa tertentu, mampu segera menyerap tambahan angkatan kerja dalam jumlah besar. Akibatnya, pertumbuhan angkatan kerja lebih cepat daripada pertumbuhan kesempatan kerja.

Kenaikan jumlah pengangguran pada tahun 2026 juga terutama dipicu oleh bertambahnya pengangguran dari kelompok berpendidikan Diploma dan Universitas. Ini menunjukkan gejala *educated unemployment*, yakni ketika lulusan berpendidikan lebih tinggi belum terserap secara optimal ke dalam pasar kerja. Penyebabnya antara lain karena struktur ekonomi daerah masih banyak membutuhkan tenaga kerja teknis-operasional, sedangkan jumlah lulusan pendidikan tinggi meningkat dan cenderung lebih selektif dalam memilih pekerjaan yang sesuai dengan tingkat pendidikan, upah, dan prospek karier. Situasi ini menandakan adanya mismatch antara pasokan tenaga kerja dan permintaan pasar kerja. Dalam jangka menengah, kondisi seperti ini dapat menahan produktivitas sosial karena investasi pendidikan belum terkonversi optimal menjadi kesempatan kerja yang sesuai.

Selain TPT, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kutai Timur pada tahun 2026 juga turun tipis menjadi 66,42 persen dari 66,78 persen pada tahun 2024. Angka ini berada di bawah rata-rata Provinsi Kalimantan Timur sebesar 67,00 persen dan jauh di bawah rata-rata nasional sebesar 70,59 persen. Salah satu persoalan utama terdapat pada ketimpangan partisipasi menurut jenis kelamin. TPAK laki-laki mencapai 83,53 persen, sedangkan TPAK perempuan hanya 46,27 persen. Dokumen BPS Kutai Timur menjelaskan bahwa rendahnya partisipasi perempuan berkaitan dengan peran domestik, keterbatasan akses terhadap pekerjaan yang fleksibel, norma sosial, serta masih terbatasnya lapangan kerja yang ramah perempuan. Dengan demikian, tantangan pasar kerja Kutai Timur tidak hanya soal pengangguran, tetapi juga soal belum optimalnya mobilisasi seluruh potensi tenaga kerja produktif.

Dari sudut pandang evaluasi RKPD, gambaran ketenagakerjaan tahun 2026 memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang ada belum sepenuhnya inklusif dalam menciptakan

pekerjaan. Hal ini sangat penting, karena kualitas pembangunan ekonomi pada akhirnya diukur dari seberapa banyak penduduk yang memperoleh manfaat langsung melalui kerja dan pendapatan. Oleh sebab itu, kebijakan yang perlu diperkuat bukan hanya menjaga laju pertumbuhan, tetapi juga memastikan tumbuhnya sektor-sektor yang lebih padat karya, memperluas pelatihan vokasi sesuai kebutuhan daerah, meningkatkan koneksi antara pendidikan dan pasar kerja, serta membuka lebih banyak kesempatan kerja produktif bagi perempuan. Semakin berhasil Kutai Timur menjawab persoalan pasar kerja ini, semakin kuat pula kualitas pertumbuhan ekonominya di masa mendatang.

BAB 3

EVALUASI KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Kebijakan keuangan daerah merupakan instrumen yang menentukan apakah agenda pembangunan dapat dijalankan secara terukur, realistis, dan berkelanjutan. Dalam konteks Kabupaten Kutai Timur, kebijakan keuangan daerah tahun 2026 tidak hanya perlu dibaca dari besar-kecilnya angka pendapatan, belanja, dan pembiayaan, melainkan juga dari kemampuannya menjaga kesinambungan prioritas pembangunan di tengah dinamika penerimaan daerah yang masih sangat dipengaruhi oleh komponen eksternal. Kerangka ini penting, sebab dokumen RKPD Tahun 2026 sejak awal telah menempatkan pengelolaan keuangan daerah sebagai fondasi bagi pengalokasian sumber daya yang efektif dan efisien untuk mendukung infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Secara normatif, arah tersebut sejalan dengan RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026–2029 yang menegaskan bahwa kapasitas fiskal, kemampuan mendanai belanja daerah, dan kemandirian keuangan merupakan unsur strategis dalam menjamin keberlanjutan pembangunan. RPJMD juga menunjukkan bahwa secara historis struktur fiskal daerah masih sangat dipengaruhi dana transfer, sementara ruang yang benar-benar bersumber dari kapasitas pendapatan asli daerah masih relatif terbatas. Karena itu, evaluasi kebijakan keuangan daerah tahun 2026 perlu dilakukan bukan hanya untuk melihat serapan atau realisasi semata, tetapi juga untuk menilai ketahanan fiskal daerah dalam menjaga prioritas pembangunan ketika struktur penerimaan mengalami tekanan.

Dengan dasar tersebut, evaluasi kebijakan keuangan daerah tahun 2026 dalam bab ini difokuskan pada tiga komponen utama, yaitu pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Ketiga komponen itu dibaca dengan menjadikan **RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026** sebagai acuan rencana awal, lalu dibandingkan dengan realisasi pelaksanaan tahun anggaran 2026 berdasarkan data teknis keuangan daerah. Melalui pendekatan ini, Bab III tidak berhenti pada penyajian angka, tetapi juga berupaya menjelaskan kualitas struktur fiskal daerah, ruang gerak kebijakan yang tersedia, serta implikasinya terhadap keberlanjutan pembangunan Kabupaten Kutai Timur.

3.1 Realisasi Pendapatan Tahun 2026

3.1.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun 2026

Arah kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026 pada dasarnya diarahkan untuk memperkuat kapasitas fiskal melalui dua jalur utama. Jalur pertama adalah peningkatan **Pendapatan Asli Daerah (PAD)** melalui optimalisasi potensi pajak dan retribusi daerah, perbaikan tata kelola penerimaan, serta penguatan kerja sama dengan berbagai pihak yang relevan. Jalur kedua adalah menjaga kesinambungan penerimaan dari komponen transfer, yang dalam praktiknya masih menjadi penopang utama struktur pendapatan daerah. Dalam RKPD Tahun 2026, orientasi ini dijelaskan sebagai bagian dari arah kebijakan keuangan daerah yang ditujukan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dengan pengelolaan yang efektif dan efisien.

Dari sudut pandang strategis, arah kebijakan tersebut dapat dipahami sebagai bentuk kehati-hatian fiskal. Kabupaten Kutai Timur memiliki kebutuhan pembiayaan pembangunan yang besar,

tetapi ruang pendapatan yang benar-benar bersumber dari kontrol internal daerah belum sepenuhnya kuat. Karena itu, penguatan PAD tetap penting, bukan hanya untuk menambah penerimaan jangka pendek, tetapi juga untuk mengurangi ketergantungan terhadap sumber penerimaan yang volatil dan sangat dipengaruhi kebijakan pusat maupun dinamika ekonomi makro. Cara pandang ini juga sejalan dengan RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026–2029 yang menempatkan kemandirian keuangan daerah sebagai agenda penting dalam menjaga kesinambungan pembangunan.

Dengan demikian, evaluasi pendapatan daerah tahun 2026 perlu dibaca pada dua lapis sekaligus. Lapis pertama adalah **tingkat pencapaian target pendapatan** sebagaimana direncanakan dalam RKPD. Lapis kedua adalah **kualitas struktur pendapatannya**, yakni apakah peningkatan atau penurunan pendapatan terjadi pada komponen yang memperkuat kemandirian fiskal, atau justru pada komponen yang menunjukkan bahwa daerah masih bertumpu pada penerimaan dari luar kapasitas fiskal internalnya.

3.1.2 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2026

Tabel 3.1 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026

No	Uraian	Target RKPD 2026 (Rp)	Realisasi 2026 (Rp)	Capaian (%)
1	Pendapatan Asli Daerah	431.817.843.098	123.932.400.654	28,70
2	Pendapatan Transfer	4.343.566.367.160	1.217.502.963.950	28,03
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	91.985.000.000		-
	Jumlah Pendapatan	4.867.369.201.258	1.341.435.364.604	27,56

Sumber: diolah dari RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026 dan data BPKAD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026.

Berdasarkan Tabel 3.1, target pendapatan daerah Kabupaten Kutai Timur sebagaimana tercantum dalam RKPD Tahun 2026 ditetapkan sebesar **Rp4.867.369.201.258**, dengan realisasi hingga periode pelaporan mencapai **Rp1.341.435.364.604** atau sebesar **27,56%** dari target. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pendapatan daerah masih berada pada tahap awal pelaksanaan tahun anggaran sehingga masih terdapat ruang yang cukup besar untuk mengoptimalkan pencapaian target pendapatan pada periode berikutnya.

Komponen **Pendapatan Asli Daerah (PAD)** ditargetkan sebesar **Rp431.817.843.098**, dengan realisasi mencapai **Rp123.932.400.654** atau **28,70%** dari target. Sementara itu, **Pendapatan Transfer** yang merupakan kontributor terbesar terhadap struktur pendapatan daerah ditargetkan sebesar **Rp4.343.566.367.160**, dengan realisasi sebesar **Rp1.217.502.963.950** atau **28,03%**. Persentase capaian kedua komponen tersebut relatif seimbang, yang mengindikasikan bahwa realisasi penerimaan masih mengikuti pola penyaluran dan pemungutan pada awal tahun anggaran.

Adapun pada kelompok **Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**, target ditetapkan sebesar **Rp91.985.000.000**, namun hingga periode pelaporan belum terdapat realisasi sehingga capaian masih **0%**. Kondisi ini menunjukkan bahwa sumber pendapatan tersebut belum memberikan kontribusi terhadap total pendapatan daerah dan memerlukan perhatian dalam upaya

percepatan realisasi apabila memang terdapat potensi penerimaan yang dapat dioptimalkan. Secara keseluruhan, pemerintah daerah perlu terus melakukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan optimalisasi PAD, memastikan ketepatan waktu penyaluran pendapatan transfer, serta mendorong realisasi seluruh sumber pendapatan daerah agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai pada akhir tahun anggaran.

3.1.3 Analisis Capaian dan Permasalahan Pendapatan Daerah

Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur hingga periode pelaporan Tahun 2026 mencapai Rp1.341.435.364.604 atau 27,56% dari target yang ditetapkan sebesar Rp4.867.369.201.258. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pendapatan daerah masih berada pada tahap awal pencapaian target tahunan. Dari struktur pendapatan, Pendapatan Transfer masih menjadi sumber utama penerimaan daerah dengan kontribusi terbesar terhadap total pendapatan, yaitu sekitar 90 persen dari target keseluruhan. Di sisi lain, Pendapatan Asli Daerah (PAD) memberikan kontribusi yang lebih kecil, meskipun persentase capaiannya sedikit lebih tinggi dibandingkan Pendapatan Transfer, yaitu sebesar 28,70%, sedangkan Pendapatan Transfer mencapai 28,03%. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemampuan fiskal Kabupaten Kutai Timur masih sangat bergantung pada pendapatan yang bersumber dari pemerintah pusat.

Meskipun capaian pendapatan hingga periode pelaporan tergolong cukup baik, masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian. Tingginya ketergantungan terhadap Pendapatan Transfer menyebabkan kapasitas fiskal daerah sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah pusat, baik terkait besaran maupun waktu penyaluran dana transfer. Selain itu, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain belum maksimalnya pemanfaatan potensi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pemanfaatan aset daerah. Di samping itu, kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah belum menunjukkan realisasi hingga periode pelaporan meskipun telah ditetapkan target sebesar Rp91.985.000.000, sehingga belum memberikan kontribusi terhadap total pendapatan daerah.

Untuk meningkatkan pencapaian target pendapatan hingga akhir tahun anggaran, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur perlu terus memperkuat upaya intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah melalui peningkatan kualitas pelayanan perpajakan daerah, pemutakhiran basis data objek dan subjek pajak, optimalisasi pemanfaatan aset daerah, serta penguatan pengawasan dan penagihan terhadap wajib pajak dan wajib retribusi. Di samping itu, koordinasi dengan pemerintah pusat perlu terus ditingkatkan untuk memastikan penyaluran dana transfer berjalan tepat waktu sesuai ketentuan. Dengan berbagai upaya tersebut, diharapkan realisasi pendapatan daerah dapat meningkat secara optimal sehingga target pendapatan pada akhir Tahun Anggaran 2026 dapat tercapai dan mampu mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan daerah secara berkelanjutan..

3.2 Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja Tahun 2026

Belanja daerah merupakan instrumen utama pemerintah daerah dalam menerjemahkan prioritas pembangunan ke dalam program dan kegiatan yang nyata. Melalui belanja daerah, pemerintah tidak hanya membiayai kebutuhan operasional pemerintahan, tetapi juga mendukung pembangunan infrastruktur, pelayanan dasar, perlindungan sosial, serta transfer fiskal yang diperlukan untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Evaluasi terhadap realisasi belanja menjadi penting untuk menilai sejauh mana alokasi anggaran yang telah direncanakan dapat dilaksanakan secara efektif dan memberi dukungan terhadap agenda pembangunan daerah.

Dalam RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026, kebijakan belanja daerah diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan melalui pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, dan selaras dengan sasaran pembangunan daerah. Pada tahap pelaksanaan tahun anggaran 2026, struktur belanja kemudian terefleksi dalam komponen Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Masing-masing komponen tersebut mempunyai fungsi yang berbeda, namun secara bersama-sama menentukan kualitas belanja daerah, baik dalam menjaga layanan rutin pemerintahan maupun dalam mendorong manfaat pembangunan yang lebih luas bagi masyarakat.

Tabel 3.2 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026

No	Uraian	Anggaran 2026 (Rp)	Realisasi 2026 (Rp)	Capaian (%)
2	BELANJA			
2.1	Belanja Operasi	3.151.466.878.672,46	967.088.704.218,00	30,69
2.1.1	Belanja Pegawai	1.556.041.136.387,38	249.666.375.484,00	16,68
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.497.141.535.897,08	20.211.392.388,00	20,56
2.1.3	Belanja Hibah	98.284.206.388,00	697.210.936.346,00	44,81
2.2	Belanja Modal	987.535.274.298,54	74.192.535.033,00	7,51
2.2.1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	95.339.225.910,54	-	
2.2.2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	270.295.408.639,00	-	
2.2.3	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	605.144.317.108,00	11.684.287.049,00	4,32
2.2.4	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	12.114.578.796,00	61.177.418.043,00	10,11
2.2.5	Belanja Modal Aset Lainnya	4.641.743.845,00	1.330.829.941,00	1,39
2.3	Belanja Tidak Terduga	20.000.000.000,00	7.996.800,00	0,04
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	20.000.000.000,00	7.996.800,00	0,04
2.4	Belanja Transfer	785.302.480.216,00	184.876.432.100,00	23,54
2.4.1	Belanja Bantuan Keuangan	785.302.480.216,00	184.876.432.100,00	23,54
	JUMLAH BELANJA	4.944.304.633.187,00	1.226.165.668.151,00	24,80

Sumber: BPKAD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026.

Berdasarkan Tabel 3.2 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur Triwulan I Tahun Anggaran 2026, total anggaran belanja daerah ditetapkan sebesar Rp4.944.304.633.187,00, dengan realisasi hingga Triwulan I mencapai Rp1.226.165.668.151,00 atau 24,80% dari pagu anggaran. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan belanja daerah masih berada pada tahap awal tahun anggaran dan secara umum masih mengikuti pola penyerapan anggaran yang cenderung meningkat pada semester kedua setelah proses pengadaan barang dan jasa serta pelaksanaan kegiatan fisik berjalan lebih optimal.

Berdasarkan jenis belanja, **Belanja Operasi** memperoleh alokasi anggaran terbesar, yaitu **Rp3.151.466.878.672,46**, dengan realisasi sebesar **Rp967.088.704.218,00** atau **30,69%**. Di dalamnya, **Belanja Pegawai** terealisasi sebesar **Rp249.666.375.484,00** atau **16,68%**, sedangkan **Belanja Barang dan Jasa** mencapai **Rp20.211.392.388,00** atau **20,56%** dari anggarannya. Sementara itu, **Belanja Hibah** menunjukkan capaian tertinggi di antara komponen Belanja Operasi, yaitu sebesar **44,81%**, yang mencerminkan bahwa sebagian besar penyaluran hibah telah dilaksanakan pada awal tahun anggaran sesuai dengan ketentuan dan jadwal penyaluran yang telah ditetapkan.

Untuk **Belanja Modal**, dari alokasi sebesar **Rp987.535.274.298,54**, realisasinya baru mencapai **Rp74.192.535.033,00** atau **7,51%**. Rendahnya penyerapan belanja modal terutama disebabkan oleh masih berlangsungnya tahapan persiapan pelaksanaan kegiatan fisik, seperti penyelesaian proses pengadaan barang dan jasa, penandatanganan kontrak, serta mobilisasi pekerjaan konstruksi. Beberapa komponen belanja modal, seperti **Belanja Modal Peralatan dan Mesin** serta **Belanja Modal Gedung dan Bangunan**, bahkan belum menunjukkan realisasi pada Triwulan I. Sementara itu, **Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi** baru terealisasi sebesar **4,32%**, **Belanja Modal Aset Tetap Lainnya** sebesar **10,11%**, dan **Belanja Modal Aset Lainnya** sebesar **1,39%**.

Selanjutnya, **Belanja Tidak Terduga** yang dianggarkan sebesar **Rp20.000.000.000,00** baru terealisasi **Rp7.996.800,00** atau **0,04%**, mengingat belanja ini bersifat insidental dan hanya digunakan untuk membiayai keadaan darurat, kebutuhan mendesak, atau kondisi luar biasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun **Belanja Transfer**, yang seluruhnya merupakan **Belanja Bantuan Keuangan**, dialokasikan sebesar **Rp785.302.480.216,00** dengan realisasi sebesar **Rp184.876.432.100,00** atau **23,54%**, menunjukkan bahwa penyaluran bantuan keuangan kepada pemerintah desa dan pihak penerima lainnya telah mulai dilaksanakan sesuai tahapan penyaluran yang direncanakan.

Secara keseluruhan, realisasi belanja daerah hingga Triwulan I Tahun 2026 masih didominasi oleh **Belanja Operasi**, sedangkan penyerapan **Belanja Modal** relatif masih rendah. Kondisi tersebut merupakan pola yang umum terjadi pada awal tahun anggaran, di mana sebagian besar kegiatan pembangunan fisik masih berada pada tahap persiapan administrasi dan pengadaan. Oleh karena itu, diperlukan percepatan proses pengadaan barang dan jasa, penyelesaian dokumen kontraktual, serta penguatan koordinasi antar perangkat daerah agar realisasi belanja, khususnya belanja modal yang mendukung pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik, dapat meningkat secara signifikan pada triwulan-triwulan berikutnya sehingga target penyerapan APBD Tahun Anggaran 2026 dapat tercapai secara optimal.

3.3 Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan Tahun 2026

Pembiayaan daerah merupakan instrumen fiskal yang berfungsi menjaga keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah pada tahun anggaran berjalan. Dalam praktiknya, pembiayaan tidak hanya berperan sebagai penutup defisit, tetapi juga sebagai ruang penyangga yang memungkinkan pemerintah daerah tetap menjalankan prioritas pembangunan ketika pendapatan daerah tidak sepenuhnya cukup untuk menutup kebutuhan belanja. Karena itu, evaluasi terhadap pembiayaan daerah perlu melihat bukan hanya besar kecilnya angka penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, tetapi juga makna fiskalnya bagi stabilitas keuangan daerah dan kesinambungan pelaksanaan program pembangunan.

Dalam **RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026**, arah kebijakan pembiayaan daerah ditempatkan dalam kerangka menjaga keseimbangan fiskal dan mendukung keberlanjutan pembangunan. RKPD menegaskan bahwa pemerintah daerah perlu mengelola pembiayaan secara hati-hati, menjaga hubungan antara penerimaan dan pengeluaran daerah, serta memastikan bahwa kebijakan pembiayaan tidak justru menimbulkan tekanan fiskal baru di masa mendatang. Dengan demikian, pembiayaan daerah seharusnya dibaca sebagai instrumen penyangga yang dipakai secara selektif, bukan sebagai substitusi permanen atas lemahnya kapasitas pendapatan daerah.

Pada tahun 2026, dinamika pembiayaan daerah Kabupaten Kutai Timur memperlihatkan perubahan yang cukup penting dibanding tahun sebelumnya. Penerimaan pembiayaan yang digunakan pada tahun anggaran 2026 seluruhnya berasal dari **Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya**, sedangkan pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk **penyertaan modal daerah**. Struktur seperti ini menunjukkan bahwa pembiayaan daerah tahun 2026 lebih berfungsi sebagai instrumen korektif untuk menjaga ruang fiskal pada saat kapasitas pendapatan daerah mengalami tekanan. Dalam perspektif pengelolaan keuangan, kondisi ini menuntut tingkat kehati-hatian yang lebih tinggi, karena kemampuan pembiayaan yang bertumpu pada SiLPA bersifat terbatas dan tidak dapat diandalkan sebagai sumber berulang secara terus-menerus.

Tabel 3.3 Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2026

No	Uraian	Anggaran 2026 (Rp)	Realisasi 2026 (Rp)	Capaian (%)
3	PEMBIAYAAN DAERAH			
3.1	Penerimaan Pembiayaan	0,00	0,00	0,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya	0,00	0,00	0,00
3.1.2	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000.000,00	0,00	0,00
3.2.1	Penyertaan Modal Daerah/Investasi Pemerintah Daerah	25.000.000.000,00	0,00	0,00

Sumber: BPKAD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026.

Berdasarkan **Tabel 3.3 Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Kutai Timur Triwulan I Tahun Anggaran 2026**, pelaksanaan pembiayaan daerah hingga akhir Triwulan I belum menunjukkan adanya realisasi baik pada sisi penerimaan maupun pengeluaran pembiayaan. Hal ini tercermin dari realisasi pembiayaan daerah yang masih sebesar **Rp0,00** atau **0,00%** dari target yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2026.

Pada kelompok **Penerimaan Pembiayaan**, tidak terdapat alokasi anggaran sehingga realisasinya juga nihil. Komponen yang terdiri atas **Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya** dan **Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah** masing-masing tidak dianggarkan dan tidak terealisasi hingga Triwulan I. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kutai Timur tidak mengandalkan sumber pembiayaan dari SiLPA maupun pengembalian pinjaman daerah sebagai bagian dari struktur pembiayaan APBD Tahun 2026.

Sementara itu, pada kelompok **Pengeluaran Pembiayaan**, telah dialokasikan anggaran sebesar **Rp25.000.000.000,00** yang diperuntukkan bagi **Penyertaan Modal Daerah/Investasi Pemerintah Daerah**. Namun demikian, hingga akhir Triwulan I belum terdapat realisasi sehingga tingkat capaian masih **0,00%**. Belum terealisasinya pengeluaran pembiayaan tersebut dimungkinkan karena masih berlangsungnya proses administrasi, pemenuhan persyaratan regulasi, penyelesaian dokumen pendukung, maupun penyesuaian jadwal pelaksanaan penyertaan modal kepada badan usaha atau lembaga penerima investasi daerah.

Secara keseluruhan, belum adanya realisasi pembiayaan daerah pada Triwulan I merupakan kondisi yang masih wajar mengingat pelaksanaan pembiayaan, khususnya penyertaan modal daerah, umumnya dilakukan setelah seluruh persyaratan administratif, teknis, dan regulasi terpenuhi. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur perlu memastikan kesiapan dokumen, mempercepat proses koordinasi dengan pihak terkait, serta melakukan pemantauan secara berkala agar pelaksanaan pembiayaan daerah dapat direalisasikan sesuai dengan rencana dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah pada tahun anggaran 2026.

3.4 Analisis Struktur Fiskal Daerah Tahun 2026

Struktur fiskal Kabupaten Kutai Timur pada Triwulan I Tahun Anggaran 2026 menunjukkan bahwa kapasitas keuangan daerah masih didominasi oleh pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Transfer, sementara kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan masih relatif terbatas. Dari total target pendapatan daerah sebesar Rp4.867.369.201.258, sekitar 89,24% berasal dari Pendapatan Transfer sebesar Rp4.343.566.367.160, sedangkan PAD hanya sebesar Rp431.817.843.098 atau sekitar 8,87% dari total pendapatan. Adapun Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah ditargetkan sebesar Rp91.985.000.000 atau sekitar 1,89%. Komposisi tersebut menunjukkan bahwa tingkat kemandirian fiskal Kabupaten Kutai Timur masih perlu ditingkatkan melalui optimalisasi sumber-sumber PAD sehingga ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dapat dikurangi secara bertahap.

Dari sisi realisasi, hingga Triwulan I pendapatan daerah telah mencapai Rp1.341.435.364.604 atau 27,56% dari target tahunan. Realisasi tersebut sebagian besar masih ditopang oleh Pendapatan Transfer yang mencapai Rp1.217.502.963.950 atau sekitar 90,76% dari total realisasi pendapatan. Sementara itu, realisasi PAD sebesar Rp123.932.400.654 memberikan kontribusi sekitar 9,24%, sedangkan kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah belum memberikan kontribusi karena belum terdapat realisasi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa struktur penerimaan daerah masih sangat bergantung pada kebijakan dan jadwal penyaluran

dana transfer dari pemerintah pusat, sehingga ruang fiskal daerah untuk membiayai pembangunan secara mandiri masih terbatas.

Di sisi belanja, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur mengalokasikan anggaran sebesar Rp4.944.304.633.187, dengan realisasi hingga Triwulan I mencapai Rp1.226.165.668.151 atau 24,80%. Struktur belanja masih didominasi oleh Belanja Operasi yang mencapai sekitar 63,74% dari total anggaran belanja, sedangkan Belanja Modal dialokasikan sekitar 19,97%, Belanja Transfer sekitar 15,88%, dan Belanja Tidak Terduga sekitar 0,40%. Dominasi Belanja Operasi menunjukkan bahwa sebagian besar kapasitas fiskal daerah masih diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik rutin, sementara alokasi Belanja Modal sebagai instrumen pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pelayanan publik masih berada di bawah seperlima dari total belanja daerah.

Apabila ditinjau dari realisasi belanja, Belanja Operasi telah mencapai 30,69% dari pagu anggaran, lebih tinggi dibandingkan Belanja Modal yang baru terealisasi sebesar 7,51%. Rendahnya penyerapan Belanja Modal mencerminkan bahwa sebagian besar kegiatan pembangunan fisik masih berada pada tahap persiapan, seperti proses pengadaan barang dan jasa, penyelesaian dokumen kontrak, serta mobilisasi pelaksanaan pekerjaan. Sementara itu, Belanja Transfer telah terealisasi sebesar 23,54%, sedangkan Belanja Tidak Terduga baru terealisasi 0,04% karena penggunaannya bersifat insidental sesuai kebutuhan keadaan darurat atau mendesak.

Dari sisi pembiayaan daerah, struktur fiskal menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kutai Timur tidak menganggarkan Penerimaan Pembiayaan, sedangkan Pengeluaran Pembiayaan hanya dialokasikan sebesar Rp25.000.000.000 untuk Penyertaan Modal Daerah/Investasi Pemerintah Daerah dan hingga Triwulan I belum terdapat realisasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembiayaan daerah belum menjadi instrumen utama dalam mendukung keseimbangan APBD pada awal tahun anggaran, sehingga pelaksanaan pembangunan masih bertumpu pada optimalisasi pendapatan daerah dan efektivitas penyerapan belanja.

Secara keseluruhan, struktur fiskal Kabupaten Kutai Timur pada Triwulan I Tahun 2026 menunjukkan kondisi fiskal yang relatif stabil, namun masih menghadapi tantangan berupa tingginya ketergantungan terhadap Pendapatan Transfer, rendahnya kontribusi PAD, serta belum optimalnya realisasi Belanja Modal yang berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu terus meningkatkan kemandirian fiskal melalui intensifikasi dan ekstensifikasi PAD, mempercepat pelaksanaan belanja modal, serta menjaga efektivitas pengelolaan APBD agar ruang fiskal daerah semakin kuat dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2026.

3.5 Implikasi Kebijakan Keuangan Daerah terhadap Pembangunan Tahun 2026

Kebijakan keuangan daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026 memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Berdasarkan realisasi APBD hingga Triwulan I Tahun 2026, kemampuan fiskal daerah masih didominasi oleh Pendapatan Transfer, sementara kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih relatif terbatas. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ruang fiskal Pemerintah Kabupaten Kutai Timur masih sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah pusat, khususnya terkait besaran dan waktu penyaluran dana transfer. Oleh karena itu, kesinambungan pelaksanaan program pembangunan sangat

bergantung pada kelancaran penerimaan pendapatan daerah serta efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

Dari sisi belanja, komposisi anggaran yang masih didominasi oleh Belanja Operasi mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Namun demikian, rendahnya realisasi Belanja Modal pada Triwulan I mengindikasikan bahwa sebagian besar proyek pembangunan fisik masih berada pada tahap persiapan administrasi dan pengadaan. Apabila percepatan pelaksanaan kegiatan tidak segera dilakukan, kondisi tersebut berpotensi menghambat pencapaian target pembangunan infrastruktur, peningkatan konektivitas wilayah, penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik, serta mendorong terjadinya penumpukan realisasi belanja pada akhir tahun anggaran yang dapat memengaruhi kualitas pelaksanaan kegiatan.

Belum adanya realisasi pada komponen pembiayaan daerah juga menunjukkan bahwa pelaksanaan investasi pemerintah daerah melalui penyertaan modal masih menunggu penyelesaian berbagai persyaratan administratif dan regulasi. Meskipun demikian, kondisi tersebut belum memberikan dampak yang signifikan terhadap pelaksanaan pembangunan pada Triwulan I karena pembiayaan daerah bukan merupakan sumber utama pendanaan APBD Tahun 2026. Ke depan, percepatan realisasi penyertaan modal perlu dilakukan agar investasi pemerintah daerah dapat memberikan manfaat ekonomi, meningkatkan kinerja badan usaha milik daerah, serta mendukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Implikasi lain dari struktur keuangan daerah saat ini adalah perlunya penguatan kemandirian fiskal melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Ketergantungan yang masih tinggi terhadap Pendapatan Transfer menyebabkan kemampuan daerah dalam merancang program pembangunan menjadi kurang fleksibel apabila terjadi perubahan kebijakan fiskal nasional atau penyesuaian alokasi transfer. Oleh karena itu, optimalisasi penerimaan dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan aset daerah, dan sumber-sumber pendapatan lainnya perlu terus ditingkatkan agar kapasitas fiskal daerah semakin kuat dalam membiayai pembangunan secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, kebijakan keuangan daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026 perlu diarahkan pada upaya menjaga keseimbangan fiskal melalui optimalisasi pendapatan, percepatan penyerapan belanja terutama Belanja Modal serta pengelolaan pembiayaan daerah yang efektif dan akuntabel. Dengan pengelolaan keuangan yang lebih optimal, diharapkan pelaksanaan pembangunan dapat berlangsung tepat waktu, meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat pembangunan infrastruktur, memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah, serta mendukung terwujudnya sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026.

BAB 4

PENGENDALIAN PELAKSANAAN RPJMD DALAM RKPD

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah lima tahunan yang menjadi acuan utama dalam perumusan tujuan, sasaran, program pembangunan, serta kerangka pendanaan daerah. Dalam sistem perencanaan daerah, RKPD disusun sebagai penjabaran tahunan dari RPJMD, sehingga tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD menjadi indikator penting untuk menilai kualitas konsistensi perencanaan pembangunan daerah. Dalam konteks tersebut, pengendalian pelaksanaan RPJMD dalam RKPD diperlukan untuk memastikan bahwa arah pembangunan tahunan tetap berada dalam koridor kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Kutai Timur. Hal ini sejalan dengan kedudukan RKPD Tahun 2026 sebagai dokumen tahunan yang disusun dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026–2029.

Bab ini memfokuskan analisis pada konsistensi antara RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026–2029 dengan RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026, yang meliputi tujuan pembangunan, sasaran pembangunan, program, indikator kinerja, target kinerja, pagu indikatif, serta penjabaran pada tingkat perangkat daerah. Adapun RKPD Tahun 2026 digunakan sebagai konteks untuk membaca adanya penyesuaian kebijakan pada tahun berjalan, tanpa mengubah kedudukan RKPD sebagai objek utama pengujian konsistensi dokumen perencanaan. Dengan demikian, analisis pada bab ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang objektif mengenai kualitas penjabaran RPJMD ke dalam RKPD Tahun 2026, sekaligus menjadi dasar bagi penguatan konsistensi perencanaan pembangunan daerah pada periode berikutnya.

4.1 Konsistensi Tujuan Pembangunan antara RKPD dengan RPJMD

Tujuan pembangunan pada RKPD Tahun 2026 harus merupakan penjabaran langsung dari tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026–2029. Konsistensi tujuan menjadi unsur mendasar karena tujuan merupakan pengarah utama bagi perumusan sasaran, indikator kinerja, program pembangunan, serta arah alokasi sumber daya daerah. RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026–2029 menegaskan bahwa tujuan dan sasaran pembangunan dirumuskan untuk mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah, sedangkan RKPD Tahun 2026 disusun dengan memperhatikan keselarasan terhadap RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026–2029. Dengan demikian, pengendalian terhadap konsistensi tujuan pembangunan diperlukan untuk memastikan bahwa perencanaan tahunan tetap berada dalam koridor pembangunan jangka menengah daerah.

Dalam struktur perencanaan daerah, satu misi pembangunan dapat dijabarkan ke dalam satu atau lebih tujuan pembangunan. Pada beberapa misi terdapat lebih dari satu tujuan yang dirumuskan untuk menjelaskan arah kebijakan secara lebih spesifik. Pola ini bersifat wajar dalam dokumen perencanaan karena misi merupakan arah besar pembangunan, sedangkan tujuan merupakan penjabaran strategis yang lebih operasional. Dengan struktur tersebut, pengulangan yang tampak pada tabel bukan menunjukkan duplikasi tujuan, melainkan menunjukkan bahwa satu misi memiliki lebih dari satu tujuan yang saling melengkapi. Hal ini terlihat, misalnya, pada misi tata kelola pemerintahan yang dijabarkan ke dalam tujuan penataan tata kelola pemerintahan dan tujuan peningkatan kualitas layanan publik, serta pada misi pengembangan

wilayah berwawasan lingkungan yang dijabarkan ke dalam tujuan integrasi pembangunan wilayah dan tujuan pemanfaatan ruang secara berkelanjutan.

Berdasarkan hasil penelaahan dokumen RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026–2029 dan RKPD Tahun 2026, rumusan tujuan pembangunan pada RKPD tetap mengacu pada 5 misi pembangunan daerah dan dijabarkan ke dalam 8 tujuan pembangunan. Secara umum, seluruh tujuan pembangunan dalam RKPD Tahun 2026 menunjukkan kesesuaian dengan tujuan pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021–2026, baik dari sisi substansi maupun rumusan tujuan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pada tingkat tujuan, RKPD Tahun 2026 telah mempertahankan arah pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Konsistensi ini penting karena menjadi prasyarat agar kebijakan, program, dan kegiatan tahunan tidak keluar dari orientasi strategis pembangunan daerah.

Tabel 4.1 Perbandingan Tujuan Pembangunan pada RPJMD dan RKPD Tahun 2026

No	Misi	No Tujuan	RPJMD Kabupaten Kutai Timur 2026–2029	RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026
1	Peningkatan dan Pemerataan Daya Saing Daerah Melalui Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia, Berbudaya, Sehat, Cerdas, serta Berprestasi	T1	Mewujudkan SDM Yang berkualitas	Mewujudkan SDM Yang berkualitas
2	Transformasi Ekonomi Melalui Pertumbuhan Ekonomi dan Industri Berbasis Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Pariwisata, Peternakan, Perikanan, dan Kelautan	T2	Mewujudkan Kemandirian Ekonomi berbasis potensi lokal	Mewujudkan Kemandirian Ekonomi berbasis potensi lokal
3	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Digital yang Mendukung Konektivitas Antar Wilayah dan Pemerintahan yang Berintegritas			
4	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Tangguh dan Berintegritas	T3	Mewujudkan birokrasi yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan responsif	Mewujudkan birokrasi yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan responsif
5	Mewujudkan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Terpadu dan Berkesinambungan	T5	Mewujudkan Pembangunan yang merata dan berkelanjutan	Mewujudkan Pembangunan yang merata dan berkelanjutan

Sumber: diolah dari RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026–2029 dan RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026.

Perbandingan Tujuan Pembangunan pada RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026–2029 dan RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026, dapat disimpulkan bahwa terdapat konsistensi yang kuat antara tujuan pembangunan jangka menengah daerah dengan tujuan pembangunan tahunan. Seluruh tujuan yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2026 merupakan penjabaran langsung dari tujuan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026–2029. Hal ini menunjukkan bahwa penyusunan RKPD Tahun 2026 telah mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pembangunan jangka menengah, sehingga pelaksanaan pembangunan tahunan tetap berada pada koridor pencapaian visi dan misi pembangunan daerah.

Pada **Tujuan 1 (T1)**, baik dalam RPJMD maupun RKPD ditetapkan tujuan "**Mewujudkan SDM yang berkualitas**" sebagai penjabaran dari misi peningkatan dan pemerataan daya saing daerah melalui pengembangan sumber daya manusia yang berakhlak mulia, berbudaya, sehat, cerdas, dan berprestasi. Keselarasan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan kualitas sumber daya manusia tetap menjadi prioritas utama pada Tahun 2026 melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan, kesehatan, penguatan karakter, serta peningkatan kompetensi masyarakat sebagai modal utama pembangunan daerah.

Selanjutnya, **Tujuan 2 (T2)** yaitu "**Mewujudkan Kemandirian Ekonomi berbasis potensi lokal**" juga menunjukkan konsistensi penuh antara RPJMD dan RKPD. Tujuan ini mendukung misi transformasi ekonomi melalui pengembangan sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, pariwisata, peternakan, perikanan, kelautan, serta pembangunan infrastruktur dasar dan digital sebagai pengungkit pertumbuhan ekonomi. Keselarasan tersebut mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk mendorong transformasi ekonomi yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan dengan memanfaatkan potensi unggulan daerah.

Pada aspek tata kelola pemerintahan, **Tujuan 3 (T3)** dalam RPJMD maupun RKPD sama-sama diarahkan untuk "**Mewujudkan birokrasi yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan responsif**". Konsistensi ini menunjukkan bahwa reformasi birokrasi tetap menjadi agenda prioritas dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah, serta memperkuat integritas aparatur sipil negara dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Sementara itu, **Tujuan 5 (T5)** yaitu "**Mewujudkan pembangunan yang merata dan berkelanjutan**" juga tetap dipertahankan dalam RKPD Tahun 2026 sebagai implementasi dari misi pengelolaan lingkungan hidup yang terpadu dan berkesinambungan. Tujuan ini menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam mewujudkan pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan pemerataan hasil pembangunan, pelestarian lingkungan hidup, mitigasi perubahan iklim, serta keberlanjutan pemanfaatan sumber daya alam untuk generasi mendatang.

Secara keseluruhan, hasil perbandingan antara RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026–2029 dan RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026 menunjukkan **konsistensi penuh (100%)** pada seluruh tujuan pembangunan. Tidak terdapat perubahan substansi tujuan yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2026, sehingga dapat disimpulkan bahwa dokumen RKPD telah disusun secara selaras dengan dokumen RPJMD sebagai pedoman pembangunan jangka menengah daerah. Konsistensi tersebut menjadi indikator bahwa proses perencanaan pembangunan daerah telah menerapkan prinsip kesinambungan (continuity), sinkronisasi, dan integrasi kebijakan, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan tahunan diharapkan mampu

memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian target pembangunan Kabupaten Kutai Timur periode 2026–2029.

Secara keseluruhan, konsistensi tujuan pembangunan antara RKPD Tahun 2026 dan RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026–2029 berada pada tingkat sangat tinggi. Tidak ditemukan perubahan rumusan tujuan yang bersifat substantif. Seluruh tujuan dalam RKPD tetap berada dalam koridor lima misi dan empat tujuan RPJMD. Hal ini menunjukkan bahwa arah pembangunan tahunan masih terjaga dengan baik, meskipun keselarasannya tetap perlu diuji lebih lanjut pada tingkat sasaran, indikator, target, program, dan pagu anggaran.

4.2 Konsistensi Sasaran Pembangunan antara RKPD dengan RPJMD

Sasaran pembangunan merupakan penjabaran langsung dari tujuan pembangunan daerah yang telah dirumuskan dalam RPJMD. Konsistensi sasaran antara RKPD Tahun 2026 dan RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026–2029 menjadi unsur penting dalam menilai kualitas penjabaran perencanaan jangka menengah ke dalam perencanaan tahunan. Sasaran yang konsisten menunjukkan bahwa arah pembangunan tahunan tetap berada dalam koridor strategis daerah, sedangkan ketidaksesuaian sasaran dapat memengaruhi keterpaduan indikator kinerja, target, program, dan alokasi anggaran. Dalam konteks ini, perbandingan pada subbab ini difokuskan pada kesesuaian sasaran pembangunan antara RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021–2026 dan RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026, dengan Perubahan RKPD Tahun 2026 digunakan sebagai konteks untuk melihat keterjagaan arah sasaran pada tahun berjalan.

Berdasarkan hasil penelaahan dokumen, sasaran pembangunan yang dirumuskan dalam RKPD Tahun 2026 masih mengikuti struktur sasaran dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026–2029. Secara substansial, tidak ditemukan pergeseran sasaran yang bersifat mendasar. Hal ini menunjukkan bahwa pada tingkat sasaran, RKPD Tahun 2026 masih menjaga kesinambungan strategi pembangunan jangka menengah daerah dan tetap menjadi penjabaran tahunan yang selaras dengan arah pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Tabel 4.2 Perbandingan Sasaran Pembangunan pada RPJMD dan RKPD Tahun 2026

No Tujuan	No Sasaran	Sasaran RPJMD Kabupaten Kutai Timur 2026–2029	Sasaran RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026
T1	S1	Terwujudnya layanan kesehatan yang prima dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat	Terwujudnya layanan kesehatan yang prima dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat
T1	S2	Terwujudnya layanan pendidikan berkualitas yang merata	Terwujudnya layanan pendidikan berkualitas yang merata
T1	S3	Meningkatnya kualitas keluarga dan kesetaraan gender	Meningkatnya kualitas keluarga dan kesetaraan gender
T1	S4	Pengentasan kemiskinan dan pengangguran	Pengentasan kemiskinan dan pengangguran
T2	S1	Mendorong pertumbuhan ekonomi sektor non tambang	Mendorong pertumbuhan ekonomi sektor non tambang
T2	S2	Meningkatkan kinerja dan daya saing industri pengolahan	Meningkatkan kinerja dan daya saing industri pengolahan

No Tujuan	No Sasaran	Sasaran RPJMD Kabupaten Kutai Timur 2026–2029	Sasaran RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026
T2	S3	Meningkatnya ketahanan pangan	Meningkatnya ketahanan pangan
T2	S4	Terwujudnya ekosistem sosial dan ekonomi yang ramah investasi	Terwujudnya ekosistem sosial dan ekonomi yang ramah investasi
T2	S5	Terwujudnya integrasi ekonomi Kutai Timur dengan ekonomi domestik, nasional, dan global	Terwujudnya integrasi ekonomi Kutai Timur dengan ekonomi domestik, nasional, dan global
T2	S6	Terwujudnya pembangunan yang berkesinambungan antara desa dan kota	Terwujudnya pembangunan yang berkesinambungan antara desa dan kota
T3	S1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang profesional, efektif, adaptif, dan visioner	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang profesional, efektif, adaptif, dan visioner
T3	S2	Meningkatnya kualitas layanan publik	Meningkatnya kualitas layanan publik
T3	S3	Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang berkelanjutan, efisien, dan berkualitas	Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang berkelanjutan, efisien, dan berkualitas
T4	S1	Pembangunan ramah lingkungan dan resiliensi terhadap bencana	Pembangunan ramah lingkungan dan resiliensi terhadap bencana
T4	S2	Terwujudnya kesiapsiagaan daerah terhadap bencana	Terwujudnya kesiapsiagaan daerah terhadap bencana

Sumber: diolah dari RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026–2029 dan RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026.

Berdasarkan hasil perbandingan sasaran pembangunan antara RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026–2029 dengan RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026, dapat diketahui bahwa seluruh sasaran pembangunan dalam RKPD Tahun 2026 telah disusun secara konsisten dengan sasaran yang tercantum dalam RPJMD. Tidak terdapat perubahan substansi maupun penambahan atau pengurangan sasaran pada setiap tujuan pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa RKPD Tahun 2026 telah berfungsi sebagai penjabaran operasional tahun pertama pelaksanaan RPJMD, sehingga arah kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan tetap selaras dengan target pembangunan jangka menengah daerah.

Pada **Tujuan 1 (Mewujudkan SDM yang Berkualitas)**, seluruh sasaran dalam RPJMD dipertahankan secara utuh dalam RKPD Tahun 2026. Sasaran tersebut meliputi terwujudnya layanan kesehatan yang prima dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terwujudnya layanan pendidikan berkualitas yang merata, meningkatnya kualitas keluarga dan kesetaraan gender, serta pengentasan kemiskinan dan pengangguran. Konsistensi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan sumber daya manusia tetap menjadi prioritas utama pemerintah daerah

melalui peningkatan kualitas pelayanan dasar, penguatan perlindungan sosial, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pada **Tujuan 2 (Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Berbasis Potensi Lokal)**, seluruh enam sasaran juga menunjukkan kesesuaian penuh antara RPJMD dan RKPD. Sasaran tersebut meliputi mendorong pertumbuhan ekonomi sektor non tambang, meningkatkan kinerja dan daya saing industri pengolahan, meningkatkan ketahanan pangan, mewujudkan ekosistem sosial dan ekonomi yang ramah investasi, mewujudkan integrasi ekonomi Kutai Timur dengan ekonomi domestik, nasional, dan global, serta mewujudkan pembangunan yang berkesinambungan antara desa dan kota. Keselarasan tersebut mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam memperkuat transformasi ekonomi daerah melalui diversifikasi sektor unggulan, peningkatan nilai tambah produk lokal, penciptaan iklim investasi yang kondusif, serta penguatan konektivitas antarwilayah sebagai upaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Pada **Tujuan 3 (Mewujudkan Birokrasi yang Efektif, Efisien, Transparan, Akuntabel, dan Responsif)**, sasaran dalam RKPD Tahun 2026 juga identik dengan sasaran dalam RPJMD, yaitu terwujudnya tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, adaptif, dan visioner, meningkatnya kualitas layanan publik, serta terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang berkelanjutan, efisien, dan berkualitas. Konsistensi tersebut menunjukkan bahwa reformasi birokrasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan tata kelola keuangan daerah tetap menjadi fokus utama dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Selanjutnya, pada **Tujuan 4 (Mewujudkan Pembangunan yang Merata dan Berkelanjutan)**, RKPD Tahun 2026 juga mempertahankan seluruh sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD, yaitu pembangunan yang ramah lingkungan dan berketahanan terhadap bencana serta terwujudnya kesiapsiagaan daerah terhadap bencana. Keselarasan ini menunjukkan bahwa aspek keberlanjutan pembangunan dan pengurangan risiko bencana tetap menjadi bagian penting dalam kebijakan pembangunan daerah, sejalan dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup, meningkatkan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, serta memperkuat ketangguhan daerah dalam menghadapi berbagai potensi bencana.

Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan bahwa seluruh sasaran pembangunan RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026 memiliki tingkat konsistensi 100 persen terhadap sasaran RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026–2029. Tidak terdapat perbedaan substansi pada setiap sasaran yang telah ditetapkan. Konsistensi ini menunjukkan bahwa proses penyusunan RKPD telah mengacu secara penuh pada dokumen RPJMD sebagai pedoman pembangunan jangka menengah daerah. Dengan demikian, pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2026 diharapkan mampu memberikan kontribusi yang optimal terhadap pencapaian target pembangunan lima tahunan, sekaligus menjamin kesinambungan, sinkronisasi, dan efektivitas pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kutai Timur.

Bagian Atas Formulir

Bagian Bawah Formulir

Secara keseluruhan, konsistensi sasaran pembangunan antara RKPD Tahun 2026 dengan RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026-2029 berada pada tingkat sangat tinggi. Seluruh sasaran yang termuat dalam RKPD secara substansial masih sama dengan sasaran dalam RPJMD, tanpa adanya perubahan mendasar pada arah pembangunan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pada

level sasaran, RKPD Tahun 2026 telah menjaga kesinambungan strategi pembangunan jangka menengah secara baik. Namun demikian, konsistensi sasaran perlu dibaca lebih lanjut bersama indikator, target, program, dan pagu anggaran, karena kualitas penjabaran RPJMD tidak hanya ditentukan oleh kesamaan rumusan, tetapi juga oleh keterjagaan hubungan logis antara sasaran dengan instrumen pelaksanaannya. Dengan demikian, hasil subbab ini menegaskan bahwa dari sisi sasaran, fondasi konsistensi RKPD Tahun 2026 terhadap RPJMD masih kuat dan menjadi dasar yang baik bagi analisis pada subbab berikutnya.

4.3 Konsistensi Program antara RKPD dengan RPJMD

Konsistensi program antara RKPD Tahun 2026 dengan RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026–2029 merupakan salah satu ukuran penting untuk menilai kualitas penjabaran dokumen perencanaan jangka menengah ke dalam perencanaan tahunan. Program merupakan instrumen utama yang menjembatani tujuan dan sasaran pembangunan dengan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah. Tingkat konsistensi program tidak hanya mencerminkan keselarasan administratif antar dokumen, tetapi juga menunjukkan apakah arah kebijakan pembangunan tahunan tetap berada dalam koridor strategi pembangunan jangka menengah daerah. RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026–2029 menegaskan bahwa program pembangunan daerah harus dijabarkan secara tahunan ke dalam RKPD agar tujuan, sasaran, dan prioritas pembangunan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, akuntabel, dan terukur.

Berdasarkan hasil evaluasi, tingkat penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD Tahun 2026 tercatat sebesar **99,73 persen** dari target **100 persen**. Capaian ini menunjukkan bahwa secara umum struktur program pada RKPD Tahun 2026 masih sangat selaras dengan RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026–2029. Pada saat yang sama, penjabaran konsistensi program RPJMD dan RKPD ke dalam Renstra dan Renja Perangkat Daerah tercatat **100 persen**. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara kelembagaan, sinkronisasi program pada tingkat perangkat daerah telah berjalan optimal, meskipun pada tahap penjabaran dari RPJMD ke RKPD masih terdapat sebagian kecil inkonsistensi yang perlu dicermati.

Tabel 4.3 Konsistensi Jumlah Program antara RPJMD dan RKPD Tahun 2026 per Perangkat Daerah

No	Nama OPD pada RPJMD	Jumlah Program RPJMD	Nama OPD pada RKPD	Jumlah Program RKPD	Inkonsistensi	Keterangan
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	9	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	9	0	
2	Dinas Kesehatan	73	Dinas Kesehatan	73	0	
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	21	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	21	0	
4	Dinas Perumahan Rakyat dan	4	Dinas Perumahan Rakyat dan	4	0	

No	Nama OPD pada RPJMD	Jumlah Program RPJMD	Nama OPD pada RKPD	Jumlah Program RKPD	Inkonsistensi	Keterangan
	Kawasan Permukiman		Kawasan Permukiman			
5	Satuan Polisi Pamong Praja	2	Satuan Polisi Pamong Praja	2	0	
6	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	2	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	2	0	
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2	0	
8	Dinas Sosial	5	Dinas Sosial	5	0	
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	9	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	9	0	
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7	0	
11	Dinas Ketahanan Pangan	5	Dinas Ketahanan Pangan	5	0	
12	Dinas Pertanahan	6	Dinas Pertanahan	6	0	
13	Dinas Lingkungan Hidup	7	Dinas Lingkungan Hidup	7	0	
14	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	4	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	4	0	
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5	0	

No	Nama OPD pada RPJMD	Jumlah Program RPJMD	Nama OPD pada RKPD	Jumlah Program RKPD	Inkonsistensi	Keterangan
16	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4	0	
17	Dinas Perhubungan	4	Dinas Perhubungan	3	0	Program Pengelolaan Perkeretaapian tidak diakomodir
18	Dinas Komunikasi, Informastika, Persandian dan Statistik	5	Dinas Komunikasi, Informastika, Persandian dan Statistik	5	0	
19	Dinas Koperasi, dan UMKM	7	Dinas Koperasi dan UMKM	7	0	
20	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	3	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	3	0	
21	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	4	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	4	0	
22	Dinas Perpustakaan & Kearsipan	8	Dinas Perpustakaan & Kearsipan	8	0	
23	Dinas Perikanan	10	Dinas Perikanan	10	0	
24	Dinas Pariwisata	5	Dinas Pariwisata	5	0	
25	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	6	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	6	0	
26	Dinas Perkebunan	6	Dinas Perkebunan	6	0	
27	Dinas Perindustrian	9	Dinas Perindustrian	9	0	

No	Nama OPD pada RPJMD	Jumlah Program RPJMD	Nama OPD pada RKPD	Jumlah Program RKPD	Inkonsistensi	Keterangan
	dan Perdagangan		dan Perdagangan			
28	Sekretariat Daerah	3	Sekretariat Daerah	3	0	
29	Sekretariat DPRD	2	Sekretariat DPRD	2	0	
30	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3	0	
31	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	3	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	3	0	
32	Badan Pendapatan Daerah	2	Badan Pendapatan Daerah	2	0	
33	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan	3	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3	0	
34	Badan Riset dan Inovasi Daerah	2	Badan Riset dan Inovasi Daerah	2	0	
35	Inspektorat Daerah	3	Inspektorat	3	0	
36	Kecamatan Sangkulirang	6	Kecamatan Sangkulirang	6	0	
37	Kecamatan Kaliorang	6	Kecamatan Kaliorang	6	0	
38	Kecamatan Sandaran	6	Kecamatan Sandaran	6	0	
39	Kecamatan Bengalon	6	Kecamatan Bengalon	6	0	
40	Kecamatan Muara Wahau	6	Kecamatan Muara Wahau	6	0	

No	Nama OPD pada RPJMD	Jumlah Program RPJMD	Nama OPD pada RKPD	Jumlah Program RKPD	Inkonsistensi	Keterangan
41	Kecamatan Kombeng	6	Kecamatan Kombeng	6	0	
42	Kecamatan Muara Ancalong	6	Kecamatan Muara Ancalong	6	0	
43	Kecamatan Batu Ampar	6	Kecamatan Batu Ampar	6	0	
44	Kecamatan Long Mesangat	6	Kecamatan Long Mesangat	6	0	
45	Kecamatan Busang	6	Kecamatan Busang	6	0	
46	Kecamatan Karangan	6	Kecamatan Karangan	6	0	
47	Kecamatan Kaubun	6	Kecamatan Kaubun	6	0	
48	Kecamatan Rantau Pulung	6	Kecamatan Rantau Pulung	6	0	
49	Kecamatan Teluk Pandan	6	Kecamatan Teluk Pandan	6	0	
50	Kecamatan Muara Bengkal	6	Kecamatan Muara Bengkal	6	0	
51	Kecamatan Sangatta Utara	6	Kecamatan Sangatta Utara	6	0	
52	Kecamatan Sangatta Selatan	6	Kecamatan Sangatta Selatan	6	0	
53	Kecamatan Telen	6	Kecamatan Telen	6	0	
54	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5	0	

Sumber: diolah dari tabel konsistensi jumlah program RKPD dan RPJMD Tahun 2026.

Berdasarkan hasil perbandingan jumlah program pada **RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026–2029** dengan **RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026**, secara umum terdapat **konsistensi yang sangat tinggi** antara kedua dokumen perencanaan tersebut. Seluruh perangkat daerah telah mengakomodasi program-program yang telah ditetapkan dalam RPJMD ke dalam RKPD Tahun 2026 sebagai penjabaran tahun pertama pelaksanaan RPJMD. Hal ini menunjukkan bahwa proses penyusunan RKPD telah mengacu pada arah kebijakan, strategi, dan

program pembangunan jangka menengah daerah, sehingga pelaksanaan pembangunan tahunan tetap berada dalam koridor pencapaian target RPJMD.

Sebagian besar perangkat daerah memiliki jumlah program yang sama antara RPJMD dan RKPD. Konsistensi tersebut terlihat pada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pelayanan dasar, urusan pemerintahan wajib, maupun urusan pemerintahan pilihan, seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Sosial, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, seluruh kecamatan, serta perangkat daerah lainnya. Kesesuaian jumlah program tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat perubahan arah kebijakan maupun pengurangan ruang lingkup program dalam RKPD Tahun 2026 dibandingkan dengan yang telah direncanakan dalam RPJMD.

Meskipun demikian, terdapat beberapa perangkat daerah yang mengalami penyesuaian pada tingkat implementasi program tanpa mengubah arah kebijakan pembangunan secara substansial. Pada **Dinas Perhubungan**, jumlah program dalam RKPD menjadi **3 program** dibandingkan **4 program** pada RPJMD karena **Program Pengelolaan Perkeretaapian** belum diakomodasi dalam RKPD Tahun 2026. Penyesuaian ini dapat disebabkan oleh pertimbangan prioritas pembangunan, kesiapan pelaksanaan, maupun belum tersedianya kebutuhan pendanaan pada tahun berjalan. Selain itu, **Dinas Perikanan** melaksanakan **5 program** pada RKPD dari **10 program** yang tercantum dalam RPJMD. Kondisi ini menunjukkan adanya tahapan implementasi program sesuai prioritas pembangunan tahun pertama RPJMD, sehingga sebagian program direncanakan untuk dilaksanakan pada tahun-tahun berikutnya tanpa mengurangi pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah.

Selain penyesuaian jumlah program, terdapat pula beberapa perubahan nomenklatur perangkat daerah yang tidak memengaruhi substansi program, seperti perubahan penulisan **Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi** menjadi **Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja**, **Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan** menjadi **Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**, serta **Inspektorat Daerah** menjadi **Inspektorat**. Perubahan tersebut merupakan penyesuaian nomenklatur organisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah fungsi maupun program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah.

Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat konsistensi program antara RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026–2029 dan RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026 **sangat tinggi**, dengan sebagian besar perangkat daerah mempertahankan jumlah program yang sama sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD. Penyesuaian yang terjadi hanya bersifat terbatas dan lebih disebabkan oleh prioritas pelaksanaan program pada tahun pertama RPJMD, bukan karena perubahan arah kebijakan pembangunan. Dengan demikian, RKPD Tahun 2026 telah mencerminkan kesinambungan perencanaan pembangunan daerah dan menjadi instrumen yang efektif dalam mengimplementasikan program-program prioritas menuju pencapaian target RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026–2029.

.

4.4 Konsistensi Indikator Kinerja antara RKPD dengan RPJMD

Konsistensi indikator kinerja antara RKPD Tahun 2026 dengan RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021–2026 merupakan aspek penting dalam memastikan bahwa pelaksanaan

pembangunan tahunan tetap dapat diukur dengan instrumen yang sejalan dengan arah pembangunan jangka menengah. Indikator kinerja tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur keberhasilan program, tetapi juga sebagai penghubung antara sasaran pembangunan, target tahunan, dan evaluasi capaian kinerja perangkat daerah. Perubahan jumlah indikator perlu dicermati secara teknokratik, karena dapat memengaruhi kesinambungan pengukuran kinerja pembangunan daerah dari dokumen jangka menengah ke dokumen tahunan. RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021–2026 menegaskan bahwa indikator kinerja daerah ditetapkan sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif, dan setiap target tahunan harus disusun secara bertahap agar kesinambungan evaluasinya terjaga.

Berdasarkan hasil penelaahan dokumen, jumlah indikator kinerja antara RPJMD dan RKPD Tahun 2026 menunjukkan tingkat konsistensi yang tinggi, namun belum sepenuhnya sama pada semua perangkat daerah. Sebagian besar perangkat daerah mempertahankan jumlah indikator yang sama, sedangkan sebagian lainnya mengalami penambahan, pengurangan, atau perubahan akibat penyesuaian nomenklatur, restrukturisasi kelembagaan, dan penajaman fokus pengukuran kinerja. Secara teknokratik, kondisi ini menunjukkan bahwa RKPD Tahun 2026 pada dasarnya masih menjaga arah pengukuran kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD, meskipun terdapat penyesuaian pada beberapa sektor. Dokumen evaluasi RKPD Tahun 2026 juga menjelaskan bahwa ketidakkonsistenan jumlah indikator terutama dipengaruhi oleh perubahan nomenklatur OPD, penyesuaian terhadap kebijakan nasional dan daerah, serta penyederhanaan atau penyempurnaan metode pengukuran kinerja.

Tabel 4.4 Konsistensi Indikator Kinerja antara RKPD dengan RPJMD Tahun 2026

No.	Persangkat Daerah	Jumlah Indikator Program RPJMD	Jumlah Indikator Program RKPD	Inkonsisten	Keterangan
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	21	21	0	
2	Dinas Kesehatan	39	39	0	
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	12	12	0	
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	7	7	0	
5	Satuan Polisi Pamong Praja	9	9	0	
6	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	5	5	0	
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5	5	0	
8	Dinas Sosial	8	8	0	
9	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	9	9	0	
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	9	9	0	
11	Dinas Ketahanan Pangan	6	6	0	

No.	Persangkat Daerah	Jumlah Indikator Program RPJMD	Jumlah Indikator Program RKPD	Inkonsisten	Keterangan
12	Dinas Pertanahan	7	7	0	
13	Dinas Lingkungan Hidup	12	12	0	
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	9	9	0	
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	6	6	0	
16	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	8	8	0	
17	Dinas Perhubungan	5	4	1	
18	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	7	7	0	
19	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	8	8	0	
20	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	7	7	0	
21	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	7	7	0	
22	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	7	7	0	
23	Dinas Perikanan	6	6	0	
24	Dinas Pariwisata	7	7	0	
25	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	12	12	0	
26	Dinas Perkebunan	9	9	0	
27	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	11	11	0	
28	Sekretariat Daerah	11	11	0	
29	Sekretariat DPRD	3	3	0	
30	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	7	7	0	
31	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	8	8	0	
32	Badan Pendapatan Daerah	6	6	0	
33	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	7	7	0	
34	Badan Riset dan Inovasi Daerah	4	4	0	
35	Inspektorat	6	6	0	

No.	Persangkat Daerah	Jumlah Indikator Program RPJMD	Jumlah Indikator Program RKPD	Inkonsisten	Keterangan
36	Kantor Camat Sangatta Selatan	7	7	0	
37	Kantor Lurah Singa Geweh	3	3	0	
38	Kantor Camat Sangatta Utara	7	7	0	
39	Kantor Lurah Teluk Lingga	3	3	0	
40	Kantor Camat Bengalon	7	7	0	
41	Kantor Camat Kaliorang	7	7	0	
42	Kantor Camat Muara Wahau	7	7	0	
43	Kantor Camat Kombeng	7	7	0	
44	Kantor Camat Muara Ancalong	7	7	0	
45	Kantor Camat Batu Ampar	7	7	0	
46	Kantor Camat Telen	7	7	0	
47	Kantor Camat Busang	7	7	0	
48	Kantor Camat Teluk Pandan	7	7	0	
49	Kantor Camat Rantau Pulung	7	7	0	
50	Kantor Camat Kaubun	7	7	0	
51	Kantor Camat Sangkulirang	7	7	0	
52	Kantor Camat Muara Bengkal	7	7	0	
53	Kantor Camat Long Mesangat	7	7	0	
54	Kantor Camat Karangan	7	7	0	
55	Kantor Camat Sandaran	7	7	0	
56	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8	8	0	
		450	449	1	

Sumber: diolah dari matriks konsistensi indikator kinerja RPJMD dan RKPD Tahun 2026.

Dari hasil rekapitulasi kesesuaian jumlah indikator program RPJMD dan RKPD pada Perangkat Daerah di Kabupaten Kutai Timur, secara umum terdapat tingkat konsistensi yang sangat tinggi. Total keseluruhan indikator program yang direncanakan dalam RPJMD sebanyak 450 indikator, sedangkan pada RKPD tercatat sebanyak 449 indikator, sehingga terdapat selisih 1 indikator. Selisih tersebut menunjukkan tingkat inkonsistensi yang sangat kecil, yaitu hanya terjadi pada 1 Perangkat Daerah dari 56 Perangkat Daerah yang dievaluasi.

Dari 56 Perangkat Daerah, sebanyak 55 Perangkat Daerah (sekitar 98,2%) telah menunjukkan kesesuaian penuh antara jumlah indikator program RPJMD dan RKPD, dengan nilai inkonsistensi 0. Perangkat Daerah tersebut mencerminkan bahwa proses penjabaran perencanaan strategis ke dalam dokumen tahunan telah berjalan dengan baik dan selaras.

Sementara itu, terdapat 1 Perangkat Daerah yang mengalami inkonsistensi, yaitu Dinas Perhubungan, dengan selisih 1 indikator (RPJMD 5 indikator dan RKPD 4 indikator). Kondisi ini menjadi catatan teknis yang perlu dilakukan klarifikasi dan penyesuaian agar konsistensi perencanaan dapat sepenuhnya terjaga.

Secara keseluruhan, konsistensi indikator kinerja antara RKPD Tahun 2026 dengan RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026–2029 berada pada kategori tinggi. Sebagian besar perangkat daerah mempertahankan jumlah indikator yang sama, sementara perubahan yang terjadi pada sebagian perangkat daerah terutama disebabkan oleh penyesuaian nomenklatur, penggabungan atau pemisahan urusan, serta penajaman pengukuran kinerja. Hasil evaluasi ini menunjukkan bahwa secara indikator, RKPD Tahun 2026 masih cukup kuat dalam menjaga kesinambungan sistem pengukuran kinerja pembangunan jangka menengah. Namun demikian, perubahan pada beberapa perangkat daerah tetap perlu menjadi perhatian agar sinkronisasi indikator, target, dan pagu anggaran pada subbab berikutnya tetap terjaga secara utuh.

4.5 Konsistensi Target Kinerja antara RKPD dengan RPJMD

Konsistensi target kinerja antara RKPD Tahun 2026 dengan RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026–2029 merupakan aspek krusial dalam memastikan bahwa pencapaian pembangunan tahunan tetap berada pada jalur yang telah dirancang dalam dokumen pembangunan jangka menengah. Target kinerja yang dimuat dalam RKPD seharusnya mencerminkan tahapan pencapaian yang telah ditetapkan dalam RPJMD, sehingga setiap indikator pembangunan dapat diukur secara berkelanjutan dan sejalan dengan arah kebijakan daerah. Pada dokumen evaluasi RKPD Tahun 2026 ditegaskan bahwa sebagian besar target indikator kinerja dalam RKPD telah disusun dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka menengah yang tertuang dalam RPJMD 2026–2029, sehingga tingkat konsistensinya secara umum tergolong tinggi. Ketidaksesuaian target yang masih muncul terutama dipengaruhi oleh penyesuaian capaian tahun sebelumnya, perubahan nomenklatur OPD, serta kebutuhan penyesuaian terhadap kondisi aktual pembangunan daerah.

Dari sudut pandang teknokratik, konsistensi target kinerja tidak hanya berarti kesamaan angka antara RKPD dan RPJMD, tetapi juga kesesuaian logika tahapan pencapaian. Dalam praktik perencanaan, terdapat target yang memang harus sama karena merupakan milestone tahunan yang sudah ditetapkan secara bertahap dalam RPJMD. Namun terdapat pula target yang disesuaikan di RKPD untuk merespons realisasi tahun sebelumnya, dinamika kebijakan, keterbatasan kapasitas, maupun perubahan kondisi makro pembangunan daerah. Evaluasi pada subbab ini diarahkan untuk menilai apakah perubahan target yang muncul masih berada dalam kerangka pencapaian RPJMD, atau justru berpotensi melemahkan kesinambungan perencanaan pembangunan daerah.

Tabel 4.5 Perbandingan Target Kinerja RPJMD dan RKPD Tahun 2026

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET RPJMD TAHUN 2026	TARGET RKPD TAHUN 2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				
1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Nilai SAKIP (Nilai)	70,50	70,50	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)	82,00	82,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				
MENINGKATNYA PARTISIPASI ANAK USIA SEKOLAH	Angka Partisipasi Sekolah Usia 5-6 Tahun (Angka)	71,72	71,72	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar 7-15 Tahun (Angka)	100,00	100,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Angka Partisipasi Sekolah Kesetaraan 7-18 Tahun (Angka)	42,36	42,36	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Rasio Ketersediaan Sekolah SD/MI terhadap Penduduk Usia Sekolah per 10.000 (Rasio)	46.55:10000	46.55:10000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A (Angka)	104,10	104,10	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Angka Partisipasi Murni (APM) 7-12 Tahun Jenjang SD/MI (Angka)	97,33	97,33	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Rasio Ketersediaan Sekolah SMP/MTs terhadap Penduduk Usia Sekolah per 10.000 (Rasio)	43.64:10000	43.64:10000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET RPJMD TAHUN 2026	TARGET RKPD TAHUN 2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Angka Partisipasi Murni (APM) 13-15 Tahun Jenjang SMP/MTs (Angka)	86,86	86,86	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTS (Angka)	106,00	106,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Angka Partisipasi Murni (APM) 5-6 Tahun Jenjang PAUD (Angka)	79,65	79,65	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan Pendidikan Nonformal yang Terakreditasi (%)	77,78	77,78	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan

MENINGKATNYA KUALITAS KURIKULUM PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal (Persentase)	100,00	100,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN				
MENINGKATNYA MUTU DAN DISTRIBUSI PENDIDIK DAN TENAGA PENDIDIK	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional menurut jenjang pendidikan. (Persentase)	100,00	100,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN	Nilai SAKIP (Nilai)	70,50	70,50	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)	80,00	80,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET RPJMD TAHUN 2026	TARGET RKPD TAHUN 2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				
MENINGKATNYA KUALITAS KESEHATAN PERORANGAN DAN MASYARAKAT DINAS KESEHATAN	Jumlah Kematian Ibu (Orang)	8,00	8,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang memiliki ketersediaan minimal 40% alat kesehatan esensial (%)	48,00	48,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) ((%))	90,45	90,45	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun (%)	0,14	0,14	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))	109,00	109,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (%)	100,00	100,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Jumlah kematian balita (Jiwa)	44,00	44,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Prevalensi Merokok pada Penduduk 10-21 Tahun (Persentase)	12,00	12,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Angka Kematian Balita (Per 100.000 Kelahiran Hidup)	44,00	44,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	45,00	45,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET RPJMD TAHUN 2026	TARGET RKPD TAHUN 2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun (%)	23,40	23,40	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)	10,00	10,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	25,00	25,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	84,00	84,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan kepesertaan aktif jaminan kesehatan nasional (JKN) (%)	98,20	98,20	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100,00	100,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup (%)	68,00	68,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (%)	84,00	84,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional (%)	100,00	100,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna (%)	88,00	88,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar (%)	86,00	86,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET RPJMD TAHUN 2026	TARGET RKPD TAHUN 2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Penemuan Kasus TBC (%)	90,00	90,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Presentase lanjut usia yang mandiri (%)	77,00	77,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup (Orang)	8,90	8,90	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1.000 kelahiran hidup. (Orang)	8,30	8,30	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	24,82	24,82	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Proporsi fasilitas kesehatan dengan paket obat essensial yang tersedia dan terjangkau secara berkelanjutan. ((%))	95,00	95,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
MENINGKATNYA KUALITAS KESEHATAN PERORANGAN DAN MASYARAKAT RSUD KUDUNGA	Peringkat Kelulusan Akreditasi (Nilai Akreditasi)	80,00	80,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
MENINGKATNYA KUALITAS KESEHATAN PERORANGAN DAN MASYARAKAT PUSKESMAS SANDARAN	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	24,82	24,82	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Jumlah Kematian Ibu (Orang)	8,00	8,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Proporsi fasilitas kesehatan dengan paket obat essensial yang tersedia dan terjangkau secara berkelanjutan. ((%))	95,00	95,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET RPJMD TAHUN 2026	TARGET RKPD TAHUN 2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang memiliki ketersediaan minimal 40% alat kesehatan esensial (%)	48,00	48,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) ((%))	90,45	90,45	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun (%)	0,14	0,14	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))	109,00	109,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (%)	100,00	100,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Jumlah kematian balita (Jiwa)	44,00	44,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Prevalensi Merokok pada Penduduk 10-21 Tahun (Persentase)	12,00	12,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Angka Kematian Balita (Per 100.000 Kelahiran Hidup)	44,00	44,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	45,00	45,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun (%)	23,40	23,40	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)	10,00	10,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET RPJMD TAHUN 2026	TARGET RKPD TAHUN 2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	25,00	25,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	84,00	84,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan kepesertaan aktif jaminan kesehatan nasional (JKN) (%)	98,20	98,20	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100,00	100,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup (%)	68,00	68,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (%)	84,00	84,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional (%)	100,00	100,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna (%)	88,00	88,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar (%)	86,00	86,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Penemuan Kasus TBC (%)	90,00	90,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Presentase lanjut usia yang mandiri (%)	77,00	77,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET RPJMD TAHUN 2026	TARGET RKPD TAHUN 2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup (Orang)	8,90	8,90	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1.000 kelahiran hidup. (Orang)	8,30	8,30	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				
MENINGKATNYA MUTU DAN DISTRIBUSI TENAGA KESEHATAN	Rasio Tenaga Kesehatan Terhadap Populasi (Rasio)	6,81	6,81	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Rasio Tenaga Medis Terhadap Populasi (Rasio)	0,85	0,85	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase RS Pemerintah dengan jenis tenaga medis sesuai standar. (%)	67,00	67,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase puskesmas dengan jenis dan jumlah SDM kesehatan sesuai standar (Persentase)	76,19	76,19	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN				
MENINGKATNYA KUALITAS DAN DISTRIBUSI SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen SPP- IRT Sesuai standar (%)	20,00	20,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu (%)	40,00	40,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase sarana IRT yang memenuhi ketentuan (%)	20,00	20,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan (%)	100,00	100,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET RPJMD TAHUN 2026	TARGET RKPD TAHUN 2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah (%)	100,00	100,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				
MENINGKATNYA KUALITAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN DINAS KESEHATAN	Persentase Posyandu Siklus Hidup (%)	32,00	32,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
TERLAKSANYANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Nilai SAKIP (Nilai)	70,50	70,50	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)	79,00	79,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				
MENINGKATNYA PERLINDUNGAN MASYARAKAT TERHADAP BANJIR DAN MENINGKATNYA AKSES MASYARAKAT TERHADAP IRIGASI	Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik (%)	47,00	47,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET RPJMD TAHUN 2026	TARGET RKPD TAHUN 2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
MENINGKATNYA AKSES MASYARAKAT TERHADAP SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Cakupan Layanan Air Minum Layak Perpipaan (%)	62,28	62,28	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL				
MENINGKATNYA LAYANAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Infrstruktur Pengelolaan Sampah Perkotaan (%)	91,59	91,59	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				
MENINGKATNYA AKSES MASYARAKAT TERHADAP SISTEM PENGOLAHAN AIR LIMBAH	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (%)	0,77	0,77	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE				
MENINGKATNYA KUALITAS SISTEM DRAINASE PERKOTAAN	Cakupan Wilayah Saluran Drainase Rawan Genangan Air/Banjir (%)	69,00	69,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				
MENINGKATNYA KUALITAS BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik (Persentase)	64,55	64,55	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA				
MENINGKATNYA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN YANG TERTATA	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB (Rasio)	41,94	41,94	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET RPJMD TAHUN 2026	TARGET RKPD TAHUN 2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				
MENINGKATNYA AKSESIBILITAS MASYARAKAT YANG NYAMAN DAN AMAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Persentase kondisi mantap jalan (%)	42,57	42,57	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI				
MENINGKATNYA KOMPETENSI TENAGA KONSTRUKSI	Rasio tenaga terampil yang memiliki sertifikat kompetensi (Rasio)	11,37	11,37	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				
MENINGKATNYA KUALITAS PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Wilayah Pemanfaatan sesuai Rencana Tata Ruang (%)	70,00	70,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Nilai SAKIP (Nilai)	70,50	70,50	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)	76,00	76,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				
TERPENUHINYA RUMAHLAYAK HUNI BAGI WARGA NEGARA KORBAN BENCANA DAN YANG TERKENA RELOKASI AKIBAT PROGRAM PEMERINTAH	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota (%)	49,95	49,95	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET RPJMD TAHUN 2026	TARGET RKPD TAHUN 2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN				
MENINGKATNYA KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani (%)	38,73	38,73	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH				
TERPENUHINYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TANPA KUMUH	Berkurangnya unit RTLH jumlah (Rumah Tidak Layak Huni) (%)	16.25%	16.25%	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)				
MENINGKATNYA PENYEDIAAN PSU PERMUKIMAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU (%)	32,00	32,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.06 - PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
MENINGKATNYA SERTIFIKASI DAN REGISTRASI BAGI AORANG ATAU BADAN HUKUM YANG MELAKSANAKAN PERENCANAAN DAN PERENCANAAN RUMAH SERTA PERENCANAAN PRASARANA, SARAN DAN UTILITAS UMUM PSU TINGKAT KEMAMPUAN MENEGAH	Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana ()	20,00	20,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET RPJMD TAHUN 2026	TARGET RKPD TAHUN 2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Nilai SAKIP (Nilai)	70,50	70,50	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
	Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)	80,00	80,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	77,00	77,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
	Nilai SAKIP (Nilai)	52,00	52,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	Nilai SAKIP (Nilai)	70,50	70,50	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
	Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)	75,00	75,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET RPJMD TAHUN 2026	TARGET RKPD TAHUN 2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				
MENINGKATNYA PENANGANAN GANGGUAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penurunan gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	20,00	20,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) (%)	100,00	100,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
	Persentase penyelenggaraan Tibumtranmas yang dilaksanakan oleh Satpol PP (%)	100,00	100,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	4,00	4,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
	Persentase SOP yang tersedia dalam penegakan Perda dan Perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas (%)	90,00	90,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET RPJMD TAHUN 2026	TARGET RKPD TAHUN 2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Persentase jumlah sarana dan prasarana minimal yang digunakan sebagai penunjang dalam penegakan Perda dan Perkada serta penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat (%)	80,00	80,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
	Persentase jumlah anggota Satpol PP yang telah mengikuti Diklat Dasar (%)	34,00	34,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				
MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA	Indeks Pra Bencana (Indeks)	0,31	0,31	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
	Indeks Kedaruratan dan Logistik Peralatan (Indeks)	0,13	0,13	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
	Indeks Pasca Bencana (Indeks)	0,04	0,04	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET RPJMD TAHUN 2026	TARGET RKPD TAHUN 2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN				
MENINGKATNYA LAYANAN PENCEGAHAN KEBAKARAN, PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN KEBAKARAN	Tingkat Waktu Tanggap (Time Respon Limit) Daerah Layanan Wilayah Manajemn Kebakaran (WMK) (%)	96,83	96,83	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
	Persentase Desa/Kelurahan yang tersosialisasi atau edukasi dalam Pencegahan Kebakaran (%)	60,28	60,28	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran (%)	50,00	50,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				
1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH	Nilai SAKIP (Nilai)	76,00	76,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)	76,00	76,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				
MENINGKATNYA PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (%)	22,18	22,18	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET RPJMD TAHUN 2026	TARGET RKPD TAHUN 2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1.06.03 - PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN				
MEINGKATNYA LAYANAN PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Mendapat Penanganan (%)	40,00	40,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				
MENINGKATNYA REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial (%)	100,00	100,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				
MENINGKATNYA PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Cakupan Anak-Anak Terlantar yang Ditangani (%)	100,00	100,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Cakupan Fakir Miskin yang Mendapatkan Pelatihan untuk Pengembangan Usaha (%)	35,26	35,26	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA				
MENINGKATNYA PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA	Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Perlindungan Sosial (%)	40,00	40,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				
2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	Nilai SAKIP (Nilai)	70,50	70,50	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET RPJMD TAHUN 2026	TARGET RKPD TAHUN 2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)	79,33	79,33	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI MANDIRI	Nilai SAKIP (Nilai)	75,90	75,90	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
	Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)	79,33	79,33	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA				
TERKELOLANYA INFORMASI TENAGA KERJA	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja (%)	19,97	19,97	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				
MENINGKATNYA PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	Persentase lulusan pelatihan yang memiliki keterampilan/ kompetensi (%)	90,54	90,54	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
	Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja (Juta Rp/Orang) (Juta Rupiah)	571,85	571,85	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
MENINGKATNYA PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI MANDIRI	Persentase lulusan pelatihan yang memiliki keterampilan/ kompetensi (%)	90,54	90,54	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (Rp Juta/Orang/Bulan)	571,85	571,85	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET RPJMD TAHUN 2026	TARGET RKPD TAHUN 2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
MENINGKATNYA PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar kerja dalam wilayah Kabupaten/kota (%)	26,77	26,77	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL				
MENINGKATNYA PEKERJA INDONESIA YANG TERLINDUNGI	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (%)	71,73	71,73	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH	Nilai SAKIP (Nilai)	70,50	70,50	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)	96,00	96,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET RPJMD TAHUN 2026	TARGET RKPD TAHUN 2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
MENINGKATNYA KUALITAS DAN EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN PUG DAN PERAN PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN	Persentase ARG (%)	35,00	35,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				
MENURUNNYA KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	100,00	100,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA				
MENINGKATNYA KUALITAS KELUARGA DALAM Mendukung KESETERAAN GENDER, PEMENUHAN HAK, SERTA PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Persentase Keluarga yang Menerima Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga (%)	100,00	100,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK				
MENINGKATNYA PEMANFAATAN DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Data Gender Anak yang Dimanfaatkan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah (%)	100,00	100,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan (Persentase)	100,00	100,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				
TERJAMINNYA PEMENUHAN HAK SEMUA ANAK SECARA KOMPREHENSIF	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)	63,30	63,30	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET RPJMD TAHUN 2026	TARGET RKPD TAHUN 2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				
MENINGKATNYA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK KEKERASAN, EKSPLOITASI, PENELANTARAN, PERKAWINAN DAN PERLAKUAN SALAH LAINNYA TERHADAP ANAK	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (Persentase)	100,00	100,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				
2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH	Nilai SAKIP (Nilai)	66,72	66,72	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
	Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)	80,50	80,50	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN				
MENINGKATNYA PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Jumlah Cadangan Pangan (Persentase)	81,00	81,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT				
MENINGKATNYA DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)	91,20	91,20	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN				
MENINGKATNYA PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	12,00	12,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET RPJMD TAHUN 2026	TARGET RKPD TAHUN 2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN				
MENINGKATNYA PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan (%)	97,50	97,50	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				
2.10.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH DINAS PERTANAHAN	Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)	83,00	83,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan
	Nilai SAKIP (Nilai)	81,30	81,30	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan
TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH UPT SURVEY DAN PEMETAAN	Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)	83,00	83,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan
	Nilai SAKIP (Nilai)	81,30	81,30	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan
2.10.04 - PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN				
MENINGKATNYA PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Tingkat Penyelesaian Sengketa Tanah (%)	100,00	100,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan
2.10.05 - PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN				
MENINGKATNYA PENYELESAIAN GANTI RUGI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Tingkat Penyelesaian ganti rugi dan santunan tanah untuk pembangunan (%)	80,00	80,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan
2.10.07 - PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET RPJMD TAHUN 2026	TARGET RKPD TAHUN 2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
MENINGKATNYA TATA KELOLA TANAH ULAYAT	Presentase Administrasi Penetapan Tanah Ulayat (%)	100,00	100,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan
2.10.08 - PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG				
MENINGKATNYA PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Tingkat Pemanfaatan Tanah Kosong (%)	100,00	100,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan
2.10.10 - PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH				
MENINGKATNYA TERTIB PERTANAHAN DAN KEPASTIAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK ATAS TANAH	Presentase Administrasi Penggunaan dan Penatagunaan Tanah (%)	100,00	100,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				
2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH	Nilai SAKIP (Nilai)	70,50	70,50	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
	Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)	75,00	75,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP				
MENINGKATNYA EFEKTIVITAS KAJIAN LINGKUNGAN UNTUK MEMITIGASI DAMPAK KRP	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti (%)	100,00	100,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				
MENURUNNYA PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Peningkatan IKLH (%)	0,20	0,20	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET RPJMD TAHUN 2026	TARGET RKPD TAHUN 2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
MENURUNNYA PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP UPT LABORATORIUM LH	Persentase Peningkatan IKLH (%)	0,20	0,20	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)				
MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI	Persentase RTH yang Dikelola (%)	12,87	12,87	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)				
MENINGKATNYA PENANGANAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Penurunan Limbah B3 (%)	4,00	4,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)				
MENINGKATNYA KEPATUHAN USAHA DAN / ATAU KEGIATAN TERHADAP PERSETUJUAN LINGKUNGAN YANG DITERBITKAN	Persentase Peningkatan Tolak Ukur Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH (%)	50,00	50,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.07 - PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET RPJMD TAHUN 2026	TARGET RKPD TAHUN 2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
MENINGKATNYA KAPASITAS MHA DAN KEARIFAN LOKAL, PENGETAHUAN TRADISIONAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase Peningkatan Penetapan Masyarakat Adat Menjadi Masyarakat Hukum Adat (%)	25,00	25,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				
MENINGKATNYA KAPASITAS SDM BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup yang Diberikan Kepada Lembaga Masyarakat / Lembaga Pendidikan (%)	80,00	80,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				
MENINGKATNYA KINERJA PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup (%)	80,00	80,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP				
MENINGKATNYA PENYELESAIAN SENGKETA / KASUS TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penyelesaian Kasus Lingkungan Hidup (%)	80,00	80,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				
MENINGKATNYA TATA KELOLA PERSAMPAHAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Capaian Pengelolaan Persampahan Yang Dikelola pada Fasilitas Pengelolaan Sampah (%)	26,20	26,20	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET RPJMD TAHUN 2026	TARGET RKPD TAHUN 2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH	Nilai SAKIP (Nilai)	70,50	70,50	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)	100,00	100,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK				
MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) dalam pelayanan Adminduk (Persentase)	55,00	55,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL				
MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN PENCATATAN SIPIL	Persentase anak berusia 0 - 4 tahun yang memiliki akta kelahiran (Persentase)	97,00	97,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase penduduk yang memiliki akta perkawinan bagi penduduk yang menikah (Persentase)	63,00	63,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase kepemilikan akta kematian bagi penduduk yang meninggal (Persentase)	65,50	65,50	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET RPJMD TAHUN 2026	TARGET RKPD TAHUN 2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Persentase penduduk yang memiliki akta cerai bagi penduduk yang bercerai (Persentase)	63,00	63,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				
MENINGKATNYA PEMANFAATAN INFORMASI KEPENDUDUKAN	Persentase penduduk yang menggunakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi penduduk wajib KTP (Persentase)	20,00	20,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN				
MENINGKATNYA KUALITAS PROFIL KEPENDUDUKAN	Jumlah data profil kependudukan yang disusun (Dokumen)	1,00	1,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				
2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH	Nilai SAKIP (Nilai)	70,50	70,50	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	80,00	80,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA				
MENINGKATNYA KUALITAS PENATAAN DESA	Persentase Fasilitasi Penataan Desa (%)	57,00	57,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET RPJMD TAHUN 2026	TARGET RKPD TAHUN 2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA				
MENINGKATNYA EFEKTIVITAS KERJA SAMA DESA	Persentase Kerjasama Desa yang Telah Ditindaklanjuti (%)	50,00	50,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA				
MENINGKATNYA KUALITAS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa (%)	65,00	65,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT				
MENINGKATNYA KAPASITAS LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM PEMBANGUNAN	(Persentase LKD dan LAD aktif yang melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan (%))	48,03	48,03	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				
2.14.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH	Nilai SAKIP (Nilai)	70,50	70,50	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)	76,00	76,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET RPJMD TAHUN 2026	TARGET RKPD TAHUN 2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
TERKENDALINYA PERTAMBAHAN JUMLAH PENDUDUK	Total Fertility Rate (TFR) (Rata-Rata Jumlah Anak)	2,08	2,08	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (ASFR 15-19) (%)	16,00	16,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				
MENINGKATNYA PEMBERDAYAAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	"Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR) " (%)	53,40	53,40	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)	15.9%	15.9%	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Presentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri / IKK (%)	22,80	22,80	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)				
MENINGKATNYA PEMBERDAYAAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga (%)	8,00	8,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET RPJMD TAHUN 2026	TARGET RKPD TAHUN 2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH	Nilai SAKIP (Nilai)	70,50	70,50	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
	Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)	80,00	80,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				
MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN TRANSPORTASI DARAT DINAS PERHUBUNGAN	Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Pada Jalan Kabupaten/Kota (Persentase)	82,00	82,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN TRANSPORTASI DARAT UPT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	Persentase Uji Berkala Kendaraan Bermotor (%)	25,20	25,20	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN				
MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN RANSPORTASI LAUT	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Perhubungan (%)	79,57	79,57	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
2.15.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN				
MENINGKATNYA PENGELOLAAN PERLINTASAN KERETA API	Cakupan Dokumen Perencanaan Pengelolaan Perkeretaapian (%)			Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET RPJMD TAHUN 2026	TARGET RKPD TAHUN 2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH	Nilai SAKIP (Nilai)	70,50	70,50	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
	Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)	82,00	82,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				
MENINGKATNYA JANGKAUAN DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH	Indeks Keterbukaan Informasi Publik (Indeks)	98,25	98,25	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA				
MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Aplikasi Pemerintahan yang Terintegrasi (%)	80,00	80,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
	Persentase Lokasi yang Terkoneksi Jaringan Intranet / Internet di Kabupaten Kutai Timur (%)	84,00	84,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				
2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH	Nilai SAKIP (Nilai)	70,50	70,50	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
	Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	76,00	76,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET RPJMD TAHUN 2026	TARGET RKPD TAHUN 2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI				
MENINGKATNYA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (Persentase)	17,88	17,88	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI				
MENINGKATNYA KINERJA PENGELOLAAN KOPERASI	Persentase Koperasi Aktif (Persentase)	44,30	44,30	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN				
MENINGKATNYA KUALITAS SDM PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan (Persentase)	10,22	10,22	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI				
MENINGKATNYA PRODUKTIVITAS KOPERASI	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (Persentase)	46,51	46,51	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)				
MENINGKATNYA KAPASITAS UMKM YANG TANGGUH DAN MANDIRI	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal (Persentase)	13,24	13,24	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM				
MENINGKATNYA DAYA SAING UMKM	Proporsi UKM Menjalinkan Kemitraan dan Ekspor (Persentase)	0,95	0,95	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET RPJMD TAHUN 2026	TARGET RKPD TAHUN 2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				
2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH	Nilai SAKIP (Nilai)	70,50	70,50	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
	Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)	80,20	80,20	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL				
MENINGKATNYA KEMUDAHAN BERINVESTASI	Realisasi Total terhadap Target Investasi (Persentase)	100,00	100,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL				
MENINGKATNYA JANGKAUAN PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Jumlah Promosi yang Diikuti (%)	100,00	100,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL				
MENINGKATNYA PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (Persentase)	100,00	100,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				
TERKENDALINYA PERLAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha (Persentase)	100,00	100,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET RPJMD TAHUN 2026	TARGET RKPD TAHUN 2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
MENINGKATNYA PEMANFAATAN DAN INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (Persentase)	100,00	100,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				
2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Nilai SAKIP (Nilai)	70,50	70,50	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
	Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)	80,00	80,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN				
MENINGKATNYA DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase organisasi pemuda yang aktif (%)	68,75	68,75	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
	Persentase Pemuda yang Pernah Mengikuti Pelatihan/ Kursus/ Training/ dan Memperoleh Sertifikat (%)	4,96	4,96	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN				
MENINGKATNYA PEMBUDAYAAN DAN PRESTASI OLAHRAGA	Cakupan Pembinaan Olahraga (%)	58,33	58,33	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET RPJMD TAHUN 2026	TARGET RKPD TAHUN 2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Persentase Atlet yang Berasal Dari Kab/ Kota yang Masuk Pelatda (%)	13,60	13,60	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN				
MENINGKATNYA KULITAS KEPRAMUKAAN	Presentase Organisasi Kepramukaan yang Aktif (%)	34,02	34,02	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL				
TERCAPAINYA KOLABORASI, INTEGRASI DAN STANDARISASI DALAM PENYELENGGARAAN SISTEM STATISTIK NASIONAL (SSN)	Persentase Publikasi Data Sektoral dalam Portal Satu Data (%)	45,00	45,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Statistik
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				
2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				
MENINGKATNYA KEAMANAN SIBER DAN SANDI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH	Indeks KAMI (Indeks)	2,00	2,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Persandian
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				
2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN				
MENINGKATNYA PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan (Persentase)	30,00	30,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET RPJMD TAHUN 2026	TARGET RKPD TAHUN 2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
MENINGKATNYA PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Prosentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan (Persentase)	40,00	40,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.22.04 - PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH				
MENINGKATNYA AKSES MASYARAKAT TERHADAP INFORMASI SEJARAH	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal (Persentase)	15,00	15,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA				
MENINGKATNYA WARISAN BUDAYA YANG DILESTARIKAN	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan (Persentase)	0,11	0,11	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan (%)	0,11	0,11	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.22.06 - PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN				
MENINGKATNYA TATA KELOLA MUSEUM	Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum (Persentase)	25,00	25,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				
2.23.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Nilai SAKIP (Nilai)	70,50	70,50	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
	Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	77,00	77,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET RPJMD TAHUN 2026	TARGET RKPD TAHUN 2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH UPT PERPUSTAKAAN KECAMATAN MUARA BENGKAL	Nilai SAKIP (Nilai)	74,00	74,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
	Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)	77,00	77,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH UPT PERPUSTAKAAN KECAMATAN SANGKULIRANG	Nilai SAKIP (Nilai)	74,00	74,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
	Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)	77,00	77,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH UPT PERPUSTAKAAN KECAMATAN SANGATTA UTARA	Nilai SAKIP (Nilai)	74,00	74,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
	Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)	77,00	77,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH UPT PERPUSTAKAAN KECAMATAN MUARA WAHAU	Nilai SAKIP (Nilai)	74,00	74,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
	Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)	77,00	77,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN				
MENINGKATNYA LAYANAN PERPUSTAKAAN SESUAI STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (Nilai)	68,23	68,23	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
	Persentase Ketermanfaatan Perpustakaan oleh Masyarakat (%)	1,45	1,45	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET RPJMD TAHUN 2026	TARGET RKPD TAHUN 2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP				
MENINGKATNYA TATA KELOLA ARSIP DINAMIS DAN STATIS	Tingkat Ketersediaan Arsip (Persentase)	29,63	29,63	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kearsipan
	Hasil Pengawasan Kearsipan Perangkat Daerah Minimal B (Rasio)	0,19	0,19	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kearsipan
2.24.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP				
MENINGKATNYA PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP SESUAI NSPK	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip (Persentase)	37,04	37,04	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kearsipan
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				
3.25.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH DINAS PERIKANAN	Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)	80,00	80,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
	Nilai SAKIP (Nilai)	70,50	70,50	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP				
MENINGKATNYA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP DINAS PERIKANAN	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	8.799,28	8.799,28	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET RPJMD TAHUN 2026	TARGET RKPD TAHUN 2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
MENINGKATNYA PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA DINAS PERIKANAN	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	1.138,63	1.138,63	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN				
MENINGKATNYA KELESTARIAN LAUT DAN KEANEKARAGAMAN HAYATI	Persentase Kawasan Perairan Umum Darat yang Diawasi (%)	48,65	48,65	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN				
MENINGKATNYA KONSUMSI IKAN OLEH MASYARAKAT	Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH)	43,49	43,49	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				
3.26.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH	Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	74,00	74,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
	Nilai SAKIP (Nilai)	70,50	70,50	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA				
MENINGKATNYA DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Pertumbuhan Investasi Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum (%)	1,06	1,06	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
	Pertumbuhan Tamu Wisatawan Asing (Hotel Berbintang non Bintang) (%)	1,21	1,21	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET RPJMD TAHUN 2026	TARGET RKPD TAHUN 2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
MENINGKATNYA JANGKAUAN PEMASARAN PARIWISATA	Persentase peningkatan promosi pemasaran pariwisata (%)	16,67	16,67	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL				
MENINGKATNYA KUALITAS EKOSISTEM KREATIF	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual (Persentase)	0,14	0,14	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF				
MENINGKATNYA KAPASITAS SDM PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif yang terlatih (%)	37,82	37,82	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				
3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH DINAS PERKEBUNAN	Nilai SAKIP (Nilai)	65,50	65,50	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)	80,00	80,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN	Nilai SAKIP (Nilai)	70,50	70,50	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	80,00	80,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET RPJMD TAHUN 2026	TARGET RKPD TAHUN 2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
MENINGKATNYA DISTRIBUSI DAN KUALITAS SARANA PERTANIAN DINAS PERKEBUNAN	Tingkat Cakupan Penyediaan Sarana Pertanian (%)	45,00	45,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
MENINGKATNYA DISTRIBUSI DAN KUALITAS SARANA PERTANIAN DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN	Jumlah Produksi Padi (Ton)	26.186,00	26.186,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Jumlah Produksi Jagung (Ton)	1.550,00	1.550,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Produksi Pisang (Ton)	97.417,00	97.417,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Produksi Nanas (Ton)	18.426,00	18.426,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura Jenis Cabai (Ton)	437,00	437,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Jumlah Produksi Daging (sapi, kerbau, domba, kambing, ayam, itik, babi) (Ton)	3.325,00	3.325,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				
MENINGKATNYA DISTRIBUSI DAN KUALITAS PRASARANA PERTANIAN DINAS PERKEBUNAN	Tingkat Penyediaan Prasarana Pertanian (%)	20,00	20,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
MENINGKATNYA DISTRIBUSI DAN KUALITAS PRASARANA PERTANIAN DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN	Proporsi Luas Lahan Pertanian yang ditetapkan Sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (%)	65,33	65,33	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET RPJMD TAHUN 2026	TARGET RKPD TAHUN 2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
MENINGKATNYA PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYRAKAT VETERINER	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (%)	100,00	100,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN				
MENINGKATNYA PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN DINAS PERKEBUNAN	Cakupan Penanggulangan bencana Pertanian (%)	60,00	60,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase peningkatan luas ANKT (%)	0,08	0,08	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI tanaman perkebunan (%)	100,00	100,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
MENINGKATNYA PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN	Persentase Penanganan Bencana Pertanian (Persentase)	55,33	55,33	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.06 - PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN				
MENINGKATNYA KUALITAS DAN KEMUDAHAN PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Perizinan usaha pertanian yang diawasi (%)	20,00	20,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN				
MENINGKATNYA KAPASITAS SDM BIDANG PENYULUH PERTANIAN DINAS PERKEBUNAN	Cakupan Bina Kelompok Tani (%)	0,17	0,17	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
MENINGKATNYA KAPASITAS SDM BIDANG PENYULUH PERTANIAN DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan (Persentase)	19,34	19,34	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET RPJMD TAHUN 2026	TARGET RKPD TAHUN 2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN				
MENINGKATNYA KEMUDAHAN PROSES PERIZINAN DAN PENDAFTARAN BERUSAHA	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi (Persentase)	100,00	100,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN				
MENINGKATNYA KUALITAS SARANA PERDAGANGAN DAN DISTRIBUSI BARANG YANG EFISIEN, MERATA DAN TERINTEGRASI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (Persentase)	33,00	33,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
MENINGKATNYA KUALITAS SARANA PERDAGANGAN DAN DISTRIBUSI BARANG YANG EFISIEN, MERATA DAN TERINTEGRASI UPT PASAR INDUK SANGATTA UTARA	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (Persentase)	33,00	33,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
MENINGKATNYA KUALITAS SARANA PERDAGANGAN DAN DISTRIBUSI BARANG YANG EFISIEN, MERATA DAN TERINTEGRASI UPT PASAR SANGKULIRANG	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (Persentase)	33,00	33,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
MENINGKATNYA KUALITAS SARANA PERDAGANGAN DAN DISTRIBUSI BARANG YANG EFISIEN, MERATA DAN TERINTEGRASI UPT PASAR MUARA WAHAU	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (Persentase)	33,00	33,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING				
MENINGKATNYA KELANCARAN DISTRIBUSI DAN STABILITAS HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (Persentase)	1,08	1,08	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET RPJMD TAHUN 2026	TARGET RKPD TAHUN 2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
MENINGKATNYA PELAKU USAHA YANG BERORIENTASI EKSPOR	Persentase Pelaku usaha yang Melakukan Ekspor (%)	1,50	1,50	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN				
MENINGKATNYA TERTIB NIAGA DAN MUTU PRODUK	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda terasah yang berlaku (%)	100,00	100,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI				
MENINGKATNYA PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan (Persentase)	12,00	12,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				
3.31.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)	82,00	82,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	60,55	60,55	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				
MENINGKATNYA REALISASI PEMBANGUNAN INDUSTRI	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM) (%)	97,11	97,11	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI				
MENINGKATNYA KUALITAS PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PERINDUSTRIAN	persentase kepatuhan berusaha (Persentase)	100,00	100,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET RPJMD TAHUN 2026	TARGET RKPD TAHUN 2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL				
MENINGKATNYA PEMANFAATAN INFORMASI INDUSTRI	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini (Persentase)	6,50	6,50	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI				
3.32.02 - PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI				
MENINGKATNYA PELAKSANAAN TRANSMIGRASI	Persentase Program Transmigrasi yang Dilaksanakan (Persentase)	20,00	20,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Transmigrasi
3.32.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI				
MENINGKATNYA PEMBERDAYAAN DAN KAPASITAS TRANSMIGRAN DALAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan (Persentase)	4,01	4,01	Dinas/Badan yang menangani Bidang Transmigrasi
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH				
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH	Nilai SAKIP (Nilai)	70,50	70,50	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)	78,75	78,75	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				
MENINGKATNYA KUALITAS KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Indeks Reformasi Hukum (Indeks)	71,50	71,50	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Persentase Ketercapaian Kinerja SPM (%)	93,00	93,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET RPJMD TAHUN 2026	TARGET RKPD TAHUN 2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Presentase Penerima Beasiswa (%)	76,00	76,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) (Indeks)	75,00	75,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Efektivitas Kerja Sama Daerah (Persentase)	80,00	80,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				
MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Indeks Tata Kelola Pengadaan (Indeks)	7.190,00	7.190,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Presentase Layanan Elektrifikasi Rumah Tangga (%)	90,42	90,42	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Presentase Pelaksanaan Kebijakan Urusan Pembangunan dan Perekonomian (%)	75,00	75,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Indeks Perkembangan Harga (Indeks)	5,00	5,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
4.02 - SEKRETARIAT DPRD				
4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH	Nilai SAKIP (Nilai)	70,50	70,50	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
	Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)	74,00	74,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET RPJMD TAHUN 2026	TARGET RKPD TAHUN 2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
MENINGKATNYA KUALITAS PERSIDANGAN DAN KAJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD (Indeks)	80,00	80,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
5.01 - PERENCANAAN				
5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Terlaksananya penunjang perangkat daerah	Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)	76,00	76,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
	Nilai SAKIP (Nilai)	70,50	70,50	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				
MENINGKATNYA KUALITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Capaian Kinerja Program (Persentase)	94,50	94,50	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (%)	100,00	100,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				
MENINGKATNYA KUALITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA, BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN, BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (%)	100,00	100,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur Dan Kewilayahan (%)	100,00	100,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET RPJMD TAHUN 2026	TARGET RKPD TAHUN 2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA (%)	100,00	100,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
5.02 - KEUANGAN				
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)	77,00	77,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Nilai SAKIP (Nilai)	70,50	70,50	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH BADAN PENDAPATAN DAERAH	Nilai SAKIP (Nilai)	70,50	70,50	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)	78,00	78,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				
MENINGKATNYA TATA KELOLA ANGGARAN, PENBENDAHARAAN, AKUNTANSI DAN PELAPORAN	Persentase Realisasi SP2D Terhadap Total SPD yang Diterbitkan (%)	83,00	83,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Persentase Belanja Pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD (%)	30,00	30,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar (%)	84,37	84,37	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (%)	40,00	40,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET RPJMD TAHUN 2026	TARGET RKPD TAHUN 2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Presentase Penurunan SILPA (%)	-94,57	-94,57	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				
MENINGKATNYA TATA KELOLA ASET DAERAH	Presentase Penambahan Nilai Aset Tetap (%)	50,47	50,47	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				
MENINGKATNYA UPAYA EKSTENSIFIKASI DAN INTENSIFIKASI PENDAPATAN	Persentase capaian pajak daerah terhadap target yg ditetapkan (%)	100,00	100,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Persentase WP terdaftar aktif terhadap total WP terdata (%)	67,00	67,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Persentase realisasi penagihan terhadap piutang pajak (%)	62,70	62,70	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Persentase Realisasi penerimaan PBB dan BPHTB berdasarkan ketetapan (%)	30,80	30,80	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.03 - KEPEGAWAIAN				
5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH	Nilai SAKIP (Nilai)	70,50	70,50	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
	Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)	82,00	82,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				
MENINGKATNYA PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	15,00	15,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET RPJMD TAHUN 2026	TARGET RKPD TAHUN 2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi (Persentase)	100,00	100,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
MENINGKATNYA KUALITAS PENILAIAN KINERJA ASN	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik (Persentase)	99,88	99,88	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
MENINGKATNYA TATA KELOLA PENGEMBANGAN KARIR ASN	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya (Persentase)	96,00	96,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				
5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				
MENINGKATNYA LAYANAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI DASAR, KADER, MANAJERIAL, DAN FUNGSIONAL	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional (%)	40,14	40,14	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan Dan Pelatihan
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				
5.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH	Nilai SAKIP (Nilai)	62,70	62,70	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan
	Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)	82,20	82,20	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan
5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET RPJMD TAHUN 2026	TARGET RKPD TAHUN 2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
MENINGKATNYA PEMANFAATAN HASIL KELITBANGAN DALAM PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENGEMBANGAN POTENSI UNGGULAN, SERTA PENYELESAIAN PERMASALAHAN DAERAH	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan (Persentase)	29,63	29,63	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan
5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH				
MENINGKATNYA PEMANFAATAN INOVASI DAERAH DALAM PEMBANGUNAN, PENGEMBANGAN POTENSI UNGGULAN DAN PENYELESAIAN PERMASALAHAN DAERAH	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan Pemerintah, Masyarakat, Industri, dan Badan Usaha di Daerah (%)	28,57	28,57	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan
6.01 - INSPEKTORAT DAERAH				
6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
TERWUJUDNYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH	Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)	80,00	80,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
	Nilai SAKIP (Nilai)	70,50	70,50	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN				
MENURUNNYA TERJADINYA PENYELEWENGAN ATAU PENYIMPANGAN, BAIK YANG BERSIFAT ANGGARAN ATAUPUN PROSES DAN KEWENANGAN	Tindakanjuz Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 (%)	83,00	83,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI				
MENINGKATNYA KUALITAS PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Maturitas SPIP SKPD Level 3 (%)	55,00	55,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET RPJMD TAHUN 2026	TARGET RKPD TAHUN 2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (Nilai)	3,00	3,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
	Manajemen Risiko Indeks (Nilai)	3,00	3,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
7.01 - KECAMATAN				
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEC. SANGATTA SELATAN	Nilai SAKIP (Nilai)	70,50	70,50	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	78,00	78,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEC. SANGATTA UTARA	Nilai SAKIP (Nilai)	70,50	70,50	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	78,00	78,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEC. BENGALON	Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	73,00	73,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Nilai Sakip Pemerintah Daerah (Nilai)	73,00	73,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEC. KALIORANG	Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	78,00	78,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Nilai SAKIP (Nilai)	70,50	70,50	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEC. MUARA WAHAU	Nilai SAKIP (Nilai)	70,50	70,50	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	73,00	73,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET RPJMD TAHUN 2026	TARGET RKPD TAHUN 2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEC. KOMBENG	Nilai SAKIP (Nilai)	70,50	70,50	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	77,00	77,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEC. MUARA ANCALONG	Nilai SAKIP (Nilai)	70,50	70,50	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)	72,50	72,50	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEC. BATU AMPAR	Nilai SAKIP (Nilai)	70,50	70,50	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	79,00	79,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEC. TELEN	Nilai SAKIP (Nilai)	70,50	70,50	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	75,00	75,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEC. BUSANG	Nilai SAKIP (Nilai)	70,50	70,50	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	79,00	79,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEC TELUK PANDAN	Nilai SAKIP (Nilai)	70,50	70,50	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	78,00	78,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEC. RANTAU PULUNG	Nilai SAKIP (Nilai)	70,50	70,50	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET RPJMD TAHUN 2026	TARGET RKPD TAHUN 2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	76,00	76,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEC. KAUBUN	Nilai SAKIP (Nilai)	70,50	70,50	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	74,00	74,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEC. SANGKULIRANG	Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	73,00	73,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Nilai SAKIP (Nilai)	64,15	64,15	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEC. MUARA BENGKAL	Nilai SAKIP (Nilai)	70,50	70,50	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	80,00	80,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEC. LONG MESANGAT	Nilai SAKIP (Nilai)	70,50	70,50	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	80,00	80,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEC. KARANGAN	Nilai SAKIP (Nilai)	70,50	70,50	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	76,00	76,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEC. SANDARAN	Nilai SAKIP (Nilai)	70,50	70,50	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	74,00	74,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET RPJMD TAHUN 2026	TARGET RKPD TAHUN 2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KANTOR LURAH SINGA GEWEH	Nilai SAKIP (Nilai)	70,50	70,50	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	78,00	78,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KANTOR LURAH TELUK LINGGA	Nilai SAKIP (Nilai)	70,50	70,50	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	78,00	78,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
MENINGKATNYA PEMBERIAN LAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI KECAMATAN SANGATTA SELATAN	Persentase Masyarakat yang dilayani (%)	71,00	71,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
MENINGKATNYA PEMBERIAN LAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI KECAMATAN SANGATTA UTARA	Persentase Masyarakat yang dilayani (%)	75,00	75,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
MENINGKATNYA PEMBERIAN LAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI KECAMATAN BENGALON	Persentase Masyarakat yang dilayani (%)	57,00	57,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
MENINGKATNYA PEMBERIAN LAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI KECAMATAN KALIORANG	Persentase Masyarakat yang dilayani (%)	82,00	82,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
MENINGKATNYA PEMBERIAN LAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI KECAMATAN MUARA WAHAU	Persentase Masyarakat yang dilayani (%)	73,00	73,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
MENINGKATNYA PEMBERIAN LAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI KECAMATAN KOMBENG	Persentase Masyarakat yang dilayani (%)	76,00	76,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
MENINGKATNYA PEMBERIAN LAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI KECAMATAN MUARA ANCALONG	Persentase Masyarakat yang dilayani (%)	80,00	80,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET RPJMD TAHUN 2026	TARGET RKPD TAHUN 2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
MENINGKATNYA PEMBERIAN LAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI KECAMATAN BATU AMPAR	Persentase Masyarakat yang dilayani (%)	77,00	77,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
MENINGKATNYA PEMBERIAN LAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI KECAMATAN TELEN	Persentase Masyarakat yang dilayani (%)	74,00	74,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
MENINGKATNYA PEMBERIAN LAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI KECAMATAN BUSANG	Persentase Masyarakat yang dilayani (%)	70,00	70,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
MENINGKATNYA PEMBERIAN LAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI KECAMATAN TELUK PANDAN	Persentase Masyarakat yang dilayani (%)	94,00	94,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
MENINGKATNYA PEMBERIAN LAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI KECAMATAN RANTAU PULUNG	Persentase Masyarakat yang dilayani (%)	87,00	87,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
MENINGKATNYA PEMBERIAN LAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI KECAMATAN KAUBUN	Persentase Masyarakat yang dilayani (%)	55,00	55,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
MENINGKATNYA PEMBERIAN LAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI KECAMATAN SANGKULIRANG	Persentase Masyarakat yang dilayani (%)	65,00	65,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
MENINGKATNYA PEMBERIAN LAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI KECAMATAN MUARA BENGKAL	Persentase Masyarakat yang dilayani (%)	80,00	80,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
MENINGKATNYA PEMBERIAN LAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI KECAMATAN LONG MESANGAT	Persentase Masyarakat yang dilayani (%)	90,00	90,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
MENINGKATNYA PEMBERIAN LAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI KECAMATAN KARANGAN	Persentase Masyarakat yang dilayani (%)	52,00	52,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
MENINGKATNYA PEMBERIAN LAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI KECAMATAN SANDARAN	Persentase Masyarakat yang dilayani (%)	49,00	49,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
MENINGKATNYA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI WILAYAH KECAMATAN SANGATTA SELATAN	Presentase Usulan Masyarakat yang di akomodir (%)	65,00	65,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET RPJMD TAHUN 2026	TARGET RKPD TAHUN 2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
MENINGKATNYA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI WILAYAH KECAMATAN SANGATTA UTARA	Presentase Usulan Masyarakat yang di akomodir (%)	75,00	75,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
MENINGKATNYA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI WILAYAH KECAMATAN BENGALON	Presentase Usulan Masyarakat yang di akomodir (%)	60,02	60,02	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
MENINGKATNYA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI WILAYAH KECAMATAN KALIORANG	Presentase Usulan Masyarakat yang di akomodir (%)	100,00	100,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
MENINGKATNYA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI WILAYAH KECAMATAN MUARA WAHAU	Presentase Usulan Masyarakat yang di akomodir (%)	98,00	98,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
MENINGKATNYA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI WILAYAH KECAMATAN KOMBENG	Presentase Usulan Masyarakat yang di akomodir (%)	74,00	74,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
MENINGKATNYA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI WILAYAH KECAMATAN MUARA ANCALONG	Presentase Usulan Masyarakat yang di akomodir (%)	78,57	78,57	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
MENINGKATNYA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI WILAYAH KECAMATAN BATU AMPAR	Presentase Usulan Masyarakat yang di akomodir (%)	79,00	79,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
MENINGKATNYA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI WILAYAH KECAMATAN TELEN	Presentase Usulan Masyarakat yang di akomodir (%)	74,00	74,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
MENINGKATNYA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI WILAYAH KECAMATAN BUSANG	Presentase Usulan Masyarakat yang di akomodir (%)	55,00	55,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
MENINGKATNYA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI WILAYAH KECAMATAN TELUK PANDAN	Presentase Usulan Masyarakat yang di akomodir (%)	60,00	60,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET RPJMD TAHUN 2026	TARGET RKPD TAHUN 2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
MENINGKATNYA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI WILAYAH KECAMATAN RANTAU PULUNG	Presentase Usulan Masyarakat yang di akomodir (%)	85,00	85,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
MENINGKATNYA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI WILAYAH KECAMATAN KAUBUN	Presentase Usulan Masyarakat yang di akomodir (%)	77,00	77,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
MENINGKATNYA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI WILAYAH KECAMATAN SANGKULIRANG	Presentase Usulan Masyarakat yang di akomodir (%)	75,00	75,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
MENINGKATNYA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI WILAYAH KECAMATAN MUARA BENGKAL	Presentase Usulan Masyarakat yang di akomodir (%)	73,00	73,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
MENINGKATNYA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI WILAYAH KECAMATAN LONG MESANGAT	Presentase Usulan Masyarakat yang di akomodir (%)	98,00	98,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
MENINGKATNYA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI WILAYAH KECAMATAN KARANGAN	Presentase Usulan Masyarakat yang di akomodir (%)	82,00	82,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
MENINGKATNYA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI WILAYAH KECAMATAN SANDARAN	Presentase Usulan Masyarakat yang di akomodir (%)	79,00	79,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
MENINGKATNYA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI WILAYAH KANTOR LURAH SINGA GEWEH	Presentase Usulan Masyarakat yang di akomodir (%)	65,00	65,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
MENINGKATNYA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI WILAYAH KANTOR LURAH TELUK LINGGA	Presentase Usulan Masyarakat yang di akomodir (%)	75,00	75,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET RPJMD TAHUN 2026	TARGET RKPD TAHUN 2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
MENINGKATNYA KETENTRAN DAN KETERTIBAN UMUM DI WILAYAH KECAMATAN SANGATTA SELATAN	Presentase Penegakan Peraturan Terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	60,00	60,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
MENINGKATNYA KETENTRAN DAN KETERTIBAN UMUM DI WILAYAH KECAMATAN SANGATTA UTARA	Presentase Penegakan Peraturan Terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	55,00	55,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
MENINGKATNYA KETENTRAN DAN KETERTIBAN UMUM DI WILAYAH KECAMATAN BENGALON	Presentase Penegakan Peraturan Terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	59,50	59,50	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
MENINGKATNYA KETENTRAN DAN KETERTIBAN UMUM DI WILAYAH KECAMATAN KALIORANG	Presentase Penegakan Peraturan Terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	100,00	100,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
MENINGKATNYA KETENTRAN DAN KETERTIBAN UMUM DI WILAYAH KECAMATAN MJUARA WAHAU	Presentase Penegakan Peraturan Terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	98,00	98,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
MENINGKATNYA KETENTRAN DAN KETERTIBAN UMUM DI WILAYAH KECAMATAN KOMBENG	Presentase Penegakan Peraturan Terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	100,00	100,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
MENINGKATNYA KETENTRAN DAN KETERTIBAN UMUM DI WILAYAH KECAMATAN MUARA ANCALONG	Presentase Penegakan Peraturan Terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	100,00	100,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
MENINGKATNYA KETENTRAN DAN KETERTIBAN UMUM DI WILAYAH KECAMATAN BATU AMPAR	Presentase Penegakan Peraturan Terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	77,00	77,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
MENINGKATNYA KETENTRAN DAN KETERTIBAN UMUM DI WILAYAH KECAMATAN TELEN	Presentase Penegakan Peraturan Terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	100,00	100,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
MENINGKATNYA KETENTRAN DAN KETERTIBAN UMUM DI WILAYAH KECAMATAN BUSANG	Presentase Penegakan Peraturan Terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	80,00	80,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET RPJMD TAHUN 2026	TARGET RKPD TAHUN 2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
MENINGKATNYA KETENTRAN DAN KETERTIBAN UMUM DI WILAYAH KECAMATAN TELUK PANDAN	Presentase Penegakan Peraturan Terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	81,00	81,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
MENINGKATNYA KETENTRAN DAN KETERTIBAN UMUM DI WILAYAH KECAMATAN RANTAU PULUNG	Presentase Penegakan Peraturan Terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	81,00	81,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
MENINGKATNYA KETENTRAN DAN KETERTIBAN UMUM DI WILAYAH KECAMATAN KAUBUN	Presentase Penegakan Peraturan Terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	94,00	94,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
MENINGKATNYA KETENTRAN DAN KETERTIBAN UMUM DI WILAYAH KECAMATAN SANGKULIRANG	Presentase Penegakan Peraturan Terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	100,00	100,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
MENINGKATNYA KETENTRAN DAN KETERTIBAN UMUM DI WILAYAH KECAMATAN MUARA BENGKAL	Presentase Penegakan Peraturan Terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	100,00	100,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
MENINGKATNYA KETENTRAN DAN KETERTIBAN UMUM DI WILAYAH KECAMATAN LONG MESANGAT	Presentase Penegakan Peraturan Terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	100,00	100,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
MENINGKATNYA KETENTRAN DAN KETERTIBAN UMUM DI WILAYAH KECAMATAN KARANGAN	Presentase Penegakan Peraturan Terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	82,00	82,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
MENINGKATNYA KETENTRAN DAN KETERTIBAN UMUM DI WILAYAH KECAMATAN SANDARAN	Presentase Penegakan Peraturan Terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	40,00	40,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				
MENINGKATNYA WAWASAN KEBANGSAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN SANGATTA SELATAN	Presentase Masyarakat yang Memahami Wawasan Kebangsaan (%)	90,83	90,83	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET RPJMD TAHUN 2026	TARGET RKPD TAHUN 2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
MENINGKATNYA WAWASAN KEBANGSAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN SANGATTA UTARA	Persentase masyarakat yang memahami wawasan kebangsaan (%)	20,00	20,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
MENINGKATNYA WAWASAN KEBANGSAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN BENGALON	Presentase Masyarakat yang Memahami Wawasan Kebangsaan (%)	66,00	66,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
MENINGKATNYA WAWASAN KEBANGSAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN KALIORANG	Presentase Masyarakat yang Memahami Wawasan Kebangsaan (%)	70,00	70,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
MENINGKATNYA WAWASAN KEBANGSAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN MUARA WAHAU	Presentase Masyarakat yang Memahami Wawasan Kebangsaan (%)	70,30	70,30	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
MENINGKATNYA WAWASAN KEBANGSAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN KOMBENG	Presentase Masyarakat yang Memahami Wawasan Kebangsaan (%)	73,00	73,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
MENINGKATNYA WAWASAN KEBANGSAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN MUARA ANCALONG	Presentase Masyarakat yang Memahami Wawasan Kebangsaan (%)	60,00	60,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
MENINGKATNYA WAWASAN KEBANGSAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN BATU AMPAR	Presentase Masyarakat yang Memahami Wawasan Kebangsaan (%)	79,00	79,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
MENINGKATNYA WAWASAN KEBANGSAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN TELEN	Presentase Masyarakat yang Memahami Wawasan Kebangsaan (%)	75,00	75,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
MENINGKATNYA WAWASAN KEBANGSAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN BUSANG	Presentase Masyarakat yang Memahami Wawasan Kebangsaan (%)	65,00	65,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
MENINGKATNYA WAWASAN KEBANGSAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN TELUK PANDAN	Presentase Masyarakat yang Memahami Wawasan Kebangsaan (%)	79,00	79,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET RPJMD TAHUN 2026	TARGET RKPD TAHUN 2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
MENINGKATNYA WAWASAN KEBANGSAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN RANTAU PULUNG	Presentase Masyarakat yang Memahami Wawasan Kebangsaan (%)	75,00	75,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
MENINGKATNYA WAWASAN KEBANGSAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN KAUBUN	Persentase masyarakat yang memahami wawasan kebangsaan (%)	30,00	30,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
MENINGKATNYA WAWASAN KEBANGSAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN SANGKULIRANG	Presentase Masyarakat yang Memahami Wawasan Kebangsaan (%)	90,00	90,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
MENINGKATNYA WAWASAN KEBANGSAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN MUARA BENGKAL	Presentase Masyarakat yang Memahami Wawasan Kebangsaan (%)	90,00	90,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
MENINGKATNYA WAWASAN KEBANGSAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN LONG MESANGAT	Presentase Masyarakat yang Memahami Wawasan Kebangsaan (%)	85,00	85,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
MENINGKATNYA WAWASAN KEBANGSAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN KARANGAN	Presentase Masyarakat yang Memahami Wawasan Kebangsaan (%)	65,00	65,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
MENINGKATNYA WAWASAN KEBANGSAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN SANDARAN	Presentase Masyarakat yang Memahami Wawasan Kebangsaan (%)	41,00	41,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				
MENINGKATNYA PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BAIK DI WILAYAH KECAMATAN SANGATTA SELATAN	Presentase Desa yang menerapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (%)	100,00	100,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
MENINGKATNYA PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BAIK DI WILAYAH KECAMATAN SANGATTA UTARA	Presentase Desa yang menerapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (%)	75,00	75,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET RPJMD TAHUN 2026	TARGET RKPD TAHUN 2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
MENINGKATNYA PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BAIK DI WILAYAH KECAMATAN BENGALON	Presentase Desa yang menerapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (%)	75,00	75,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
MENINGKATNYA PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BAIK DI WILAYAH KECAMATAN KALIORANG	Presentase Desa yang menerapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (%)	80,00	80,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
MENINGKATNYA PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BAIK DI WILAYAH KECAMATAN MUARA WAHAU	Presentase Desa yang menerapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (%)	70,30	70,30	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
MENINGKATNYA PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BAIK DI WILAYAH KECAMATAN KOMBENG	Presentase Desa yang menerapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (%)	76,00	76,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
MENINGKATNYA PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BAIK DI WILAYAH KECAMATAN MUARA ANCALONG	Presentase Desa yang menerapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (%)	60,00	60,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
MENINGKATNYA PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BAIK DI WILAYAH KECAMATAN BATU AMPAR	Presentase Desa yang menerapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (%)	72,00	72,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
MENINGKATNYA PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BAIK DI WILAYAH KECAMATAN TELEN	Presentase Desa yang menerapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (%)	75,00	75,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
MENINGKATNYA PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BAIK DI WILAYAH KECAMATAN BUSANG	Presentase Desa yang menerapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (%)	70,00	70,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
MENINGKATNYA PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BAIK DI WILAYAH KECAMATAN TTELUK PANDAN	Presentase Desa yang menerapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (%)	73,00	73,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
MENINGKATNYA PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BAIK DI WILAYAH KECAMATAN RANTAU PULUNG	Presentase Desa yang menerapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (%)	78,00	78,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET RPJMD TAHUN 2026	TARGET RKPD TAHUN 2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
MENINGKATNYA PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BAIK DI WILAYAH KECAMATAN KAUBUN	Presentase Desa yang menerapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (%)	75,00	75,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
MENINGKATNYA PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BAIK DI WILAYAH KECAMATAN SANGKULIRANG	Presentase Desa yang menerapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (%)	73,00	73,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
MENINGKATNYA PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BAIK DI WILAYAH KECAMATAN MUARA BENGKAL	Presentase Desa yang menerapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (%)	100,00	100,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
MENINGKATNYA PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BAIK DI WILAYAH KECAMATAN LONG MESANGAT	Presentase Desa yang menerapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (%)	57,00	57,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
MENINGKATNYA PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BAIK DI WILAYAH KECAMATAN KARANGAN	Presentase Desa yang menerapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (%)	82,00	82,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
MENINGKATNYA PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BAIK DI WILAYAH KECAMATAN SANDARAN	Presentase Desa yang menerapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (%)	56,00	56,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				
8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH	Nilai SAKIP (Nilai)	70,50	70,50	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
	Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)	80,00	80,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET RPJMD TAHUN 2026	TARGET RKPD TAHUN 2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
MENINGKATNYA KESADARAN MSYARAKAT AKAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase sekolah dan Forum yang mendapatkan pembinaan penguatan ideologi Pancasila, Karakter Kebangsaan dan Bela Negara (%)	40,40	40,40	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK				
MENINGKATNYA ETIKA DAN BUDAYA POLITIK	Persentase pembinaan pendidikan politik di wilayah Kutai Timur (%)	28,00	28,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN				
MENINGKATNYA KETERTIBAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (%)	30,00	30,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA				
MENINGKATNYA KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT	Persentase ASN dan Forum yang mendapatkan Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama yang bersih dari narkoba (%)	27,00	27,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	TARGET RPJMD TAHUN 2026	TARGET RKPD TAHUN 2026	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Jumlah Konflik Sosial (Angka)	0,00	0,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
	Persentase penanganan konflik sosial (%)	100,00	100,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik

Sumber : olah data

4.6 Konsistensi Pagu Anggaran antara RKPD dengan RPJMD

Konsistensi pagu anggaran antara RPJMD dan RKPD merupakan salah satu unsur penting dalam pengendalian perencanaan pembangunan daerah. Pagu anggaran menunjukkan sejauh mana prioritas, program, dan arah pembangunan jangka menengah diterjemahkan ke dalam dukungan pendanaan tahunan pada masing-masing perangkat daerah. Perbandingan pagu antara RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026–2029 dan RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026 diperlukan untuk menilai keterjagaan hubungan antara perencanaan strategis dan perencanaan tahunan. Dalam subbab ini, perbandingan dilakukan pada tingkat perangkat daerah dengan tetap memperhatikan adanya perubahan nomenklatur OPD antara dokumen RPJMD dan RKPD. Hal ini penting agar perbedaan pagu dibaca secara proporsional, baik sebagai bentuk penyesuaian kelembagaan maupun sebagai cerminan perubahan prioritas pendanaan pembangunan daerah. RKPD 2026 sendiri memuat rekapitulasi pagu indikatif berdasarkan perangkat daerah, sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk melihat konsistensi pendanaan tahunan terhadap arah pembiayaan yang dirumuskan dalam RPJMD.

Tabel 4.6 Konsistensi Pagu Anggaran antara RPJMD dengan RKPD Tahun 2026

No.	Perangkat Daerah	Pagu RPJMD 2026	Pagu RKPD 2026
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	787.051.543.867	1.073.036.291.636
2	Dinas Kesehatan	372.780.293.280	307.454.824.282
3	RSUD Kudungga Sangatta	163.410.539.520	136.342.366.781
4	RSUD Sangkulirang	11.489.803.560	12.992.657.000
5	RSUD Muara Bengkal		7.501.386.000
6	PUSKESMAS SANDARAN	2.753.289.680	2.249.629.000
7	PUSKESMAS SANGKULIRANG	3.191.612.100	3.179.111.000
8	PUSKESMAS KALIORANG	3.829.934.521	3.405.414.000
9	PUSKESMAS KAUBUN	3.191.612.100	3.500.963.000
10	PUSKESMAS KARANGAN	3.191.612.100	3.257.514.000
11	PUSKESMAS SEPASO	3.829.934.520	3.422.129.600
12	PUSKESMAS BUSANG	2.553.289.680	2.125.960.000
13	PUSKESMAS LONG MESANGAT	2.553.289.680	2.322.043.000
14	PUSKESMAS MUARA ANCALONG	2.553.289.679	2.912.324.000
15	PUSKESMAS MUARA BENGKAL	2.553.289.680	2.526.444.000
16	PUSKESMAS BATU AMPAR	2.553.289.680	2.029.718.000
17	PUSKESMAS KOMBENG	3.829.934.520	4.069.341.000

No.	Perangkat Daerah	Pagu RPJMD 2026	Pagu RKPD 2026
18	PUSKESMAS TELEN	2.553.289.680	1.931.754.000
19	PUSKESMAS MUARA WAHAU 1	2.553.289.680	2.367.142.000
20	PUSKESMAS MUARA WAHAU 2	3.191.612.100	2.781.032.400
21	PUSKESMAS RANTAU PULUNG	2.553.289.680	2.430.481.000
22	PUSKESMAS TEPIAN BARU	2.553.289.680	2.462.299.000
23	PUSKESMAS TELUK LINGGA	4.468.256.940	3.345.645.000
24	PUSKESMAS SANGATTA UTARA	2.553.289.679	2.783.218.000
25	PUSKESMAS SANGATTA SELATAN	2.553.289.680	2.500.302.000
26	PUSKESMAS TELUK PANDAN	1.914.967.260	2.041.271.000
27	Instalasi Farmasi Kabupaten	1.595.806.050	1.044.543.500
28	Laboratorium Kesehatan Daerah	1.595.806.050	1.200.793.000
29	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.433.521.613.435	688.338.153.751
30	UPT Laboratorium Kontruksi dan Unit Pemeliharaan Rutin Jalan/Alat Berat	2.553.289.680	2.000.000.000
31	UPT Peralatan dan Pemeliharaan Rutin jalan/alat berat Kec. Sangatta Utara	1.276.644.840	750.000.000
32	UPT Peralatan dan Pemeliharaan Rutin jalan/alat berat Kec. Sangkulirang	1.276.644.840	750.000.000
33	UPT Peralatan dan Pemeliharaan Rutin jalan/alat berat Kec. Muara Wahau	1.276.644.840	750.000.000
34	UPT Peralatan dan Pemeliharaan Rutin jalan/alat berat Kec. Muara Bengkal	1.276.644.840	750.000.000
35	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	288.405.733.840	148.071.980.288
36	UPT Pertamanan dan Pemakaman Sangatta Utara	2.350.128.470	2.410.000.000
37	UPT Pertamanan dan Pemakaman Sangatta Selatan	1.276.644.840	1.040.000.000
38	Satuan Polisi Pamong Praja	38.937.667.620	32.340.512.155
39	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	65.961.521.720	29.113.108.133
40	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	24.256.251.960	14.580.216.255
41	Dinas Sosial	22.341.284.700	13.387.475.620
42	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	56.810.695.380	43.672.163.076
43	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Mandiri	5.106.579.360	2.280.000.000
44	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	19.787.995.019	11.490.930.423
45	Dinas Ketahanan Pangan	30.639.476.159	10.422.057.359
46	Dinas Pertanahan	22.341.284.701	20.404.292.352
47	UPT Survey dan Pemetaan	1.914.967.260	70.000.000
48	Dinas Lingkungan Hidup	46.503.461.220	30.817.315.149
49	UPT Kebersihan Sangatta Utara	11.873.027.760	8.100.000.000
50	UPT Kebersihan Sangatta Selatan	7.766.448.400	2.235.920.000

No.	Perangkat Daerah	Pagu RPJMD 2026	Pagu RKPD 2026
51	UPT TPA, Pengelolaan Limbah Domestik dan Lumpur Tinja	3.829.934.520	7.721.600.000
52	UPT Laboratorium LH	695.806.050	27.590.067
53	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	22.341.284.701	13.705.738.695
54	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	49.789.148.759	19.877.481.243
55	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	22.341.284.700	22.769.468.145
56	Dinas Perhubungan	81.918.428.480	82.499.914.278
57	UPT Pengujian Kendaraan Bermotor	1.914.967.260	277.000.000
58	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	121.472.871.900	78.600.873.522
59	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	25.702.962.280	15.456.023.335
60	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	26.838.733.738	13.971.126.923
61	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	58.198.621.529	38.495.180.065
62	UPTD Sarana Prasarana Olahraga	4.553.289.680	1.000.000.000
63	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	33.863.207.534	27.053.943.936
64	UPT Perpustakaan Kecamatan Muara Bengkal	376.644.840	25.000.000
65	UPT Perpustakaan Kecamatan Sangkulirang	376.644.840	25.000.000
66	UPT Perpustakaan Kecamatan Sangatta Utara	376.644.840	25.000.000
67	UPT Perpustakaan Kecamatan Muara Wahau	376.644.840	25.000.000
68	Dinas Perikanan	62.146.769.901	20.325.866.301
69	UPT Balai Benih Ikan Kaliorang	1.276.644.840	100.000.000
70	UPT Balai Benih Ikan Air Laut Teluk Kaba	969.934.757	25.000.000
71	UPT Balai Benih Udang Teluk Lombok	1.276.644.840	
72	UPT Tempat Pelelangan Ikan Kenyamukan	1.276.644.840	50.000.000
73	UPT Tempat Pelelangan Ikan Sangkulirang	1.276.644.840	50.000.000
74	Dinas Pariwisata	38.746.055.521	18.374.157.576
75	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	143.622.544.500	96.759.309.387
76	Dinas Perkebunan	36.645.933.220	14.947.384.357
77	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	38.169.410.682	21.877.291.678
78	UPT Pasar Induk Sangatta Utara	1.595.806.050	1.000.000.000
79	UPT Pasar Sangkulirang	1.276.644.840	400.000.000
80	UPT Pasar Muara Wahau	1.595.806.050	600.000.000
81	Sekretariat Daerah	356.394.761.599	267.188.245.859
82	Sekretariat DPRD	86.282.413.540	70.394.577.286
83	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	37.661.022.779	21.871.519.774

No.	Perangkat Daerah	Pagu RPJMD 2026	Pagu RKPD 2026
84	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1.234.515.560.280	1.045.986.611.806
85	Badan Pendapatan Daerah	49.789.148.760	44.391.933.619
86	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	32.977.798.579	27.416.891.232
87	Badan Riset dan Inovasi Daerah	13.043.093.239	7.314.532.199
88	Inspektorat	45.565.793.601	40.288.303.647
89	Kantor Camat Sangatta Selatan	18.082.599.038	8.921.940.269
90	Kantor Lurah Singa Geweh	13.807.604.000	13.232.604.000
91	Kantor Camat Sangatta Utara	26.809.541.639	8.905.760.589
92	Kantor Lurah Teluk Lingga	19.669.674.000	19.594.674.000
93	Kantor Camat Bengalon	13.460.257.770	7.745.904.764
94	Kantor Camat Kaliorang	6.844.901.780	5.055.109.044
95	Kantor Camat Muara Wahau	9.091.191.460	7.264.501.362
96	Kantor Camat Kombeng	8.091.546.619	6.537.947.200
97	Kantor Camat Muara Ancalong	7.916.853.306	7.243.190.325
98	Kantor Camat Batu Ampar	6.576.556.254	4.925.881.735
99	Kantor Camat Telen	6.936.224.261	5.468.619.536
100	Kantor Camat Busang	5.878.256.940	4.701.256.689
101	Kantor Camat Teluk Pandan	8.301.546.621	6.595.490.826
102	Kantor Camat Rantau Pulung	5.101.256.940	4.294.764.001
103	Kantor Camat Kaubun	5.718.538.738	4.502.473.437
104	Kantor Camat Sangkulirang	7.833.224.200	5.876.648.728
105	Kantor Camat Muara Bengkal	10.213.158.720	8.965.957.095
106	Kantor Camat Long Mesangat	7.741.546.619	5.990.809.196
107	Kantor Camat Karang	5.167.934.521	3.836.522.000
108	Kantor Camat Sandaran	5.382.520.696	4.369.969.659
109	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	21.669.672.599	16.430.890.113
Jumlah		6.348.224.200.000	4.842.369.201.258

Sumber: diolah dari RPJMD dan RKPD 2026 Kabupaten Kutai Timur

Berdasarkan hasil perbandingan pagu indikatif Tahun 2026 antara dokumen RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026–2029 dengan RKPD Tahun 2026, dapat disimpulkan bahwa **secara umum terdapat konsistensi dalam struktur pengalokasian anggaran**, dimana seluruh Perangkat Daerah yang tercantum dalam RPJMD telah terakomodasi dalam RKPD Tahun 2026. Namun demikian, **nilai pagu pada sebagian besar Perangkat Daerah mengalami penyesuaian** sebagai konsekuensi dari penyusunan RKPD yang mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, arah kebijakan pembangunan tahunan, prioritas pembangunan, serta hasil pembahasan bersama pemerintah daerah.

Secara agregat, **total pagu RPJMD Tahun 2026 sebesar Rp6.348.224.200.000**, sedangkan **total pagu RKPD Tahun 2026 sebesar Rp4.842.369.201.258**. Dengan demikian terdapat **selisih sebesar Rp1.505.854.998.742** atau sekitar **23,72% lebih rendah** dibandingkan pagu yang direncanakan dalam RPJMD. Penurunan tersebut menunjukkan bahwa penyusunan RKPD Tahun 2026 telah disesuaikan dengan kapasitas fiskal daerah yang tersedia tanpa mengubah arah pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Beberapa Perangkat Daerah mengalami **peningkatan pagu** dibandingkan alokasi dalam RPJMD, antara lain:

- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dari Rp787,05 miliar menjadi Rp1,07 triliun;
- Dinas Perhubungan, dari Rp81,92 miliar menjadi Rp82,50 miliar;
- Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dari Rp22,34 miliar menjadi Rp22,77 miliar;
- RSUD Sangkulirang, beberapa UPT Puskesmas, serta UPT TPA, Pengelolaan Limbah Domestik dan Lumpur Tinja yang memperoleh tambahan anggaran untuk mendukung peningkatan pelayanan dasar.

Sebaliknya, sebagian besar Perangkat Daerah mengalami **penyesuaian pagu ke arah yang lebih rendah**, terutama pada perangkat daerah yang memiliki program pembangunan infrastruktur dan sektor ekonomi, seperti:

- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dari Rp1,43 triliun menjadi Rp688,34 miliar;
- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dari Rp288,41 miliar menjadi Rp148,07 miliar;
- Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
- Dinas Perikanan;
- Dinas Pariwisata;
- Dinas Ketahanan Pangan; serta beberapa perangkat daerah lainnya.

Selain itu, terdapat beberapa UPT yang memperoleh pagu sangat kecil atau bahkan belum dialokasikan pada RKPD Tahun 2026, seperti UPT Balai Benih Udang Teluk Lombok, UPT Perpustakaan Kecamatan, dan beberapa UPT lainnya. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kebutuhan pendanaannya telah disesuaikan dengan prioritas tahunan atau dialihkan melalui program induk pada perangkat daerah pembinaanya.

Secara keseluruhan, **konsistensi antara RPJMD dan RKPD Tahun 2026 tetap terjaga**, karena tidak terdapat perubahan terhadap struktur perangkat daerah maupun arah kebijakan pembangunan. Perbedaan yang muncul hanya berupa **penyesuaian besaran pagu indikatif**, yang merupakan hal yang lazim dalam implementasi perencanaan tahunan. Penyesuaian tersebut dilakukan agar program dan kegiatan yang dilaksanakan tetap selaras dengan target RPJMD, namun tetap memperhatikan kemampuan fiskal daerah, proyeksi pendapatan, serta prioritas pembangunan Kabupaten Kutai Timur pada Tahun 2026

4.7 Konsistensi antara RKPD dengan RPJMD per Perangkat Daerah

Konsistensi antara RKPD dengan RPJMD per perangkat daerah menunjukkan sejauh mana penjabaran program pembangunan, indikator kinerja, target, dan pagu anggaran pada dokumen tahunan masih berada dalam koridor dokumen jangka menengah. Pada tingkat perangkat daerah, kualitas konsistensi menjadi lebih konkret karena dapat langsung dilihat pada hubungan antara program yang direncanakan dalam RPJMD dengan program yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2026. Analisis pada subbab ini tidak hanya menilai ada atau tidaknya kesesuaian, tetapi juga membaca bentuk penyesuaian yang terjadi pada indikator, target, maupun pagu. Dalam dokumen Evaluasi RKPD Kutim 2026 triwulan I, penyajian konsistensi pada tingkat perangkat daerah juga ditampilkan secara rinci per OPD melalui tabel yang membandingkan program, indikator, target, dan pagu antara RPJMD dan RKPD. Pola yang sama digunakan pada subbab ini agar keterlacakan konsistensi lebih jelas dan lebih mudah diverifikasi.

Secara umum, konsistensi antara RKPD Tahun 2026 dengan RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021–2026 pada tingkat perangkat daerah berada pada kategori tinggi. Namun demikian, tingkat konsistensi tersebut tidak selalu berarti seluruh indikator, target, dan pagu bersifat sama persis. Pada beberapa perangkat daerah terjadi penyesuaian karena penggabungan urusan, perubahan

nomenklatur, penajaman indikator, perubahan kapasitas fiskal, dan penyesuaian prioritas pembangunan Tahun 2026. Oleh sebab itu, pembacaan konsistensi per perangkat daerah perlu dilakukan secara hati-hati agar perubahan yang terjadi dapat dipahami dalam konteks teknokratik, bukan semata-mata sebagai inkonsistensi administratif.

Tabel 4.7 Konsistensi Program Renja OPD Tahun 2026 dengan RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026-2029

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja				Indikator		Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		SKPD Penanggung jawab	Ket
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							784.039.296.873,00		1.058.036.291.636,00		
1.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						329.404.083.563,00		648.036.241.951,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)	82,00			82,00				
				Nilai SAKIP (Nilai)	70,50			70,50				
1.01.02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						399.844.429.242,00		330.611.649.685,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		MENINGKATNYA PARTISIPASI ANAK USIA SEKOLAH		Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A (Angka)	104,10			104,10				
				Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar 7-15 Tahun (Angka)	100			100				
				Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan Pendidikan Nonformal yang Terakreditasi (%)	77,78			77,78				

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja		Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		SKPD Penanggung jawab	Ket
			Angka Partisipasi Sekolah Usia 5-6 Tahun (Angka)	71,72		71,72			
			Angka Partisipasi Murni (APM) 5-6 Tahun Jenjang PAUD (Angka)	79,65		79,65			
			Angka Partisipasi Sekolah Kesetaran 7-18 Tahun (Angka)	42,36		42,36			
			Angka Partisipasi Murni (APM) 13-15 Tahun Jenjang SMP/MTs (Angka)	86,86		86,86			
			Rasio Ketersediaan Sekolah SD/MI terhadap Penduduk Usia Sekolah per 10.000 (Rasio)	46.55:10000		46.55:10000			
			Rasio Ketersediaan Sekolah SMP/MTs terhadap Penduduk Usia Sekolah per 10.000 (Rasio)	43.64:10000		43.64:10000			
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs (Angka)	106,00		106,00			
			Angka Partisipasi Murni (APM) 7-12 Tahun Jenjang SD/MI (Angka)	97,33		97,33			

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		SKPD Penanggung jawab	Ket
1.01.03		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM		227.831.615,00		4.000.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	MENINGKATNYA KUALITAS KURIKULUM PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal (Persentase)	100		100			
1.01.04		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		54.562.952.453,00		75.388.400.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	MENINGKATNYA MUTU DAN DISTRIBUSI PENDIDIK DAN TENAGA PENDIDIK	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional menurut jenjang pendidikan. (Persentase)	100		100			
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			612.351.200.779,00		524.180.305.563,00		
1.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		390.943.742.770,00		335.225.516.269,00	Dinas Kesehatan	
	TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN	Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)	80		80			
		Nilai SAKIP (Nilai)	70,50		70,50			
1.02.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		206.045.691.401,00		171.973.110.294,00	Dinas Kesehatan	
	MENINGKATNYA KUALITAS KESEHATAN PERORANGAN DAN MASYARAKAT DINAS KESEHATAN	Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))	109		109			

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja		Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		SKPD Penanggung jawab	Ket
			Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	25		25			
			Jumlah kematian balita (Jiwa)	44		44			
			Jumlah Kematian Ibu (Orang)	8		8			
			Presentase lanjut usia yang mandiri (%)	77		77			
			Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)	10		10			
			Cakupan kepesertaan aktif jaminan kesehatan nasional (JKN) (%)	98,2		98,2			
			Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1.000 kelahiran hidup. (Orang)	8,3		8,3			
			Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun (%)	0,14		0,14			
			Angka Kematian Bayi (AKB) per	8,9		8,9			

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja		Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		SKPD Penanggung jawab	Ket
			1.000 kelahiran hidup (Orang)						
			proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup (%)	68		68			
			Angka Kematian Balita (Per 100.000 Kelahiran Hidup)	44		44			
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna (%)	88		88			
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar (%)	86		86			
			Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (%)	100		100			
			Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (%)	84		84			

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja		Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		SKPD Penanggung jawab	Ket
			Prevalensi Merokok pada Penduduk 10-21 Tahun (Persentase)	12		12			
			Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) ((%))	90,45		90,45			
			Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun (%)	23,4		23,4			
			Proporsi fasilitas kesehatan dengan paket obat essensial yang tersedia dan terjangkau secara berkelanjutan. ((%))	95		95			
			Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	45		45			
			Penemuan Kasus TBC (%)	90		90			
			Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	84		84			

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja		Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		SKPD Penanggung jawab	Ket
			Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional (%)	100		100			
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	24,82		24,82			
			Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100		100			
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang memiliki ketersediaan minimal 40% alat kesehatan esensial (%)	48		48			
1.02.03		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			1.834.663.980,00		3.445.870.000,00	Dinas Kesehatan	
		MENINGKATNYA MUTU DAN DISTRIBUSI TENAGA KESEHATAN	Rasio Tenaga Kesehatan Terhadap Populasi (Rasio)	6,81		6,81			

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja		Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		SKPD Penanggung jawab	Ket
			Persentase RS Pemerintah dengan jenis tenaga medis sesuai standar. (%)	67		67			
			Presentase puskesmas dengan jenis dan jumlah SDM kesehatan sesuai standar (Persentase)	76,19		76,19			
			Rasio Tenaga Medis Terhadap Populasi (Rasio)	0,85		0,85			
1.02.04		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN			1.532.691.310,00		1.617.000.000,00	Dinas Kesehatan	
		MENINGKATNYA KUALITAS DAN DISTRIBUSI SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu (%)	40		40			
			Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan (%)	20		20			
			Persentase apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan (%)	100		100			
			Persentase rekomendasi hasil pengawasan	100		100			

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja		Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		SKPD Penanggung jawab	Ket
			sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah (%)						
			Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen SPP- IRT Sesuai standar (%)	20		20			
1.02.05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			11.994.411.318,00		11.918.809.000,00	Dinas Kesehatan	
		MENINGKATNYA KUALITAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN DINAS KESEHATAN	Persentase Posyandu Siklus Hidup (%)	32		32			
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				1.441.181.482.475,00		693.338.153.751,00		
1.03.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			48.296.410.988,00		38.377.544.815,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Nilai SAKIP (Nilai)	70,50		70,50			
			Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)	79		79			

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		SKPD Penanggung jawab	Ket
1.03.02		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		78.812.376.580,00		10.860.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	MENINGKATNYA PERLINDUNGAN MASYARAKAT TERHADAP BANJIR DAN MENINGKATNYA AKSES MASYARAKAT TERHADAP IRIGASI	Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik (%)	47		47			
1.03.03		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		95.906.440.319,00		43.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	MENINGKATNYA AKSES MASYARAKAT TERHADAP SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Cakupan Layanan Air Minum Layak Perpipaan	62,28		62,28			
1.03.04		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL		4.615.609.822,00		430.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	MENINGKATNYA LAYANAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Infrastruktur Pengelolaan Sampah Perkotaan	91,59		91,59			
1.03.05		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		1.897.947.003,00		1.200.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	MENINGKATNYA AKSES MASYARAKAT TERHADAP SISTEM PENGOLAHAN AIR LIMBAH	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	0,77		0,77			

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja		Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		SKPD Penanggung jawab	Ket
1.03.06		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE			66.239.389.964,00		120.150.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		MENINGKATNYA KUALITAS SISTEM DRAINASE PERKOTAAN	Cakupan Wilayah Saluran Drainase Rawan Genangan Air/Banjir (%)	69		69			
1.03.07		PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN			-		200.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.03.08		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG			361.289.741.547,00		88.866.713.936,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		MENINGKATNYA KUALITAS BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik (Persentase)	64,55		64,55			
1.03.09		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA			131.888.979.070,00		12.200.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		MENINGKATNYA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN YANG TERTATA	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB (Rasio)	41,94		41,94			
1.03.10		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			644.191.832.360,00		371.053.895.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		MENINGKATNYA AKSESIBILITAS MASYARAKAT YANG NYAMAN DAN AMAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Persentase kondisi mantap jalan (%)	42,57		42,57			

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja		Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		SKPD Penanggung jawab	Ket
1.03.11		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI			4.220.350.912,00		3.500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		MENINGKATNYA KOMPETENSI TENAGA KONSTRUKSI	Rasio tenaga terampil yang memiliki sertifikat kompetensi (Rasio)	11,37		11,37			
1.03.12		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			3.822.403.910,00		3.500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		MENINGKATNYA KUALITAS PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Wilayah Pemanfaatan sesuai Rencana Tata Ruang (%)	70		70			
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				292.032.507.150,00		151.521.980.288,00		
1.04.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			33.275.429.764,00		22.041.980.288,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
		TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH UPT PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN SANGATTA UTARA	Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)	76		76			
			Nilai SAKIP (Nilai)	70,50		70,50			
1.04.02		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			32.075.456.610,00		10.000.000.000,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
		TERPENUHINYA RUMAHLAYAK HUNI BAGI	Penyediaan dan rehabilitasi rumah	49,95		49,95			

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja		Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		SKPD Penanggung jawab	Ket
		WARGA NEGARA KORBAN BENCANA DAN YANG TERKENA RELOKASI AKIBAT PROGRAM PEMERINTAH	layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota						
1.04.05		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)			110.324.583.871,00		53.800.000.000,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
		MENINGKATNYA PENYEDIAAN PSU PERMUKIMAN UPT PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN SANGATTA UTARA	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU (%)	32		32			
1.04.03		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			97.507.110.898,00		64.720.000.000,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
		MENINGKATNYA KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani (%)	38,73		38,73			
1.04.04		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH			18.449.071.173,00		860.000.000,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
		TERPENUHINYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TANPA KUMUH	Berkurangnya unit RTLH jumlah (Rumah Tidak Layak Huni) (%)	16,25		16,25			
1.04.06		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			400.854.834,00		100.000.000,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja		Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		SKPD Penanggung jawab	Ket
		MENINGKATNYA SERTIFIKASI DAN REGISTRASI BAGI AORANG ATAU BADAN HUKUM YANG MELAKSANAKAN PERENCANGAN DAN PERENCANAAN RUMAH SERTA PERENCANAAN PRASARANA, SARAN DAN UTILITAS UMUM PSU TINGKAT KEMAMPUAN MENEGAH	Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana ()	20		20			
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				129.155.441.300,00		76.033.836.543,00		
1.05.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			15.395.056.655,00		14.332.744.957,00	Satuan Polisi Pamong Praja	
1.05.02		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			23.542.610.965,00		18.007.767.198,00	Satuan Polisi Pamong Praja	
		MENINGKATNYA PENANGANAN GANGGUAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penurunan gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	20		20			
			Persentase jumlah sarana dan prasarana minimal yang digunakan sebagai penunjang dalam penegakan Perda dan Perkada serta penyelenggaraan	80		80			

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja		Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		SKPD Penanggung jawab	Ket
			ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat (%)						
			Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) (%)	100		100			
			Persentase jumlah anggota Satpol PP yang telah mengikuti Diklat Dasar (%)	34		34			
			Persentase penyelenggaraan Tibumtranmas yang dilaksanakan oleh Satpol PP (%)	100		100			
			Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	4		4			
			Persentase SOP yang tersedia dalam penegakan Perda dan Perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas (%)	90		90			

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja		Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		SKPD Penanggung jawab	Ket
1.05.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			35.008.371.191,00		27.093.108.133,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
		TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	Nilai SAKIP (Nilai)	70,50		70,50			
			Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)	75		75			
1.05.04		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			30.953.150.529,00		2.020.000.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
		MENINGKATNYA LAYANAN PENCEGAHAN KEBAKARAN, PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN KEBAKARAN	Tingkat Waktu Tanggap (Time Respon Limit) Daerah Layanan Wilayah Manajemn Kebakaran (WMK) (%)	96,83		96,83			
			Persentase Desa/Kelurahan yang tersosialisasi atau edukasi dalam Pencegahan Kebakaran (%)	60,28		60,28			
			Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran (%)	50,00		50,00			

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja		Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		SKPD Penanggung jawab	Ket
1.05.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			15.778.062.246,00		11.176.216.255,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	77		77			
			Nilai SAKIP (Nilai)	52		52			
1.05.03		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			8.478.189.714,00		3.404.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA	Indeks Kedaruratan dan Logistik Peralatan (Indeks)	0,131		0,131			
			Indeks Pasca Bencana (Indeks)	0,042		0,042			
			Indeks Pra Bencana (Indeks)	0,317		0,317			
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				22.341.284.700,00		13.387.475.620,00		
1.06.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			13.647.039.795,00		10.525.315.620,00	Dinas Sosial	
		TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH	Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)	76,00		76,00			
			Nilai SAKIP (Nilai)	76,00		76,00			
1.06.02		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			1.602.211.063,00		400.000.000,00	Dinas Sosial	
		MENINGKATNYA PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi Sumber	22,18		22,18			

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja		Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		SKPD Penanggung jawab	Ket
			Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (%)						
1.06.03		PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN			202.279.485,00		-	Dinas Sosial	
		MEINGKATNYA LAYANAN PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Mendapat Penanganan (%)	40,00		40,00			
1.06.04		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			2.166.385.362,00		1.650.000.000,00	Dinas Sosial	
		MENINGKATNYA REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial (%)	100		100			
1.06.05		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			2.600.243.404,00		250.000.000,00	Dinas Sosial	
		MENINGKATNYA PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Cakupan Fakir Miskin yang Mendapatkan Pelatihan untuk Pengembangan Usaha (%)	35,26		35,26			
			Cakupan Anak-Anak Terlantar yang Ditangani (%)	100		100			
1.06.06		PROGRAM PENANGANAN BENCANA			2.123.125.591,00		562.160.000,00	Dinas Sosial	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja		Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		SKPD Penanggung jawab	Ket
		MENINGKATNYA PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA	Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Perlindungan Sosial (%)	40,00		40,00			
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				58.556.590.453,00		44.902.163.076,00		
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				19.294.033.865,00		11.800.848.676,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
		TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)	0		79,33			
			Nilai SAKIP (Nilai)	60,5		70,50			
2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA				647.028.649,00		10.000.000,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
		TERKELOLANYA INFORMASI TENAGA KERJA	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja (%)	65,48		19,97			
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				6.405.823.203,00		3.040.000.000,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
		MENINGKATNYA PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja (Juta Rp/Orang) (Juta Rupiah)	514,92		571,85			
			Persentase lulusan pelatihan yang memiliki	35,98		90,54			

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja		Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		SKPD Penanggung jawab	Ket
			keterampilan/ kompetensi (%)						
2.07.04		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			1.246.902.177,00		87.500.000,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
		MENINGKATNYA PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar kerja dalam wilayah Kabupaten/kota (%)	37,64		26,77			
2.07.05		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			30.962.802.559,00		29.963.814.400,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
		MENINGKATNYA PEKERJA INDONESIA YANG TERLINDUNGI	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (%)	20,96		71,73			
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				19.787.995.019,00		11.490.930.423,00		
2.08.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			11.152.900.894,00		7.072.930.423,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja		Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		SKPD Penanggung jawab	Ket
		TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH	Nilai SAKIP (Nilai)	70,50		70,50			
			Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)	96		96			
2.08.02		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			2.120.257.964,00		850.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		MENINGKATNYA KUALITAS DAN EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN PUG DAN PERAN PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN	Persentase ARG (%)	35		35			
2.08.03		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			1.227.632.974,00		173.320.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		MENURUNNYA KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	100		100			
2.08.04		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA			886.689.776,00		650.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		MENINGKATNYA KUALITAS KELUARGA DALAM MENDUKUNG KESETARAAN GENDER, PEMENUHAN HAK, SERTA	Persentase Keluarga yang Menerima Layanan Peningkatan	100		100			

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja		Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		SKPD Penanggung jawab	Ket
		PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Kualitas Keluarga (%)						
2.08.05		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK			352.051.475,00		1.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		MENINGKATNYA PEMANFAATAN DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Data Gender Anak yang Dimanfaatkan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah (%)	100		100			
			Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan (Persentase)	100		100			
2.08.06		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)			2.998.317.977,00		2.500.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		TERJAMINNYA PEMENUHAN HAK SEMUA ANAK SECARA KOMPREHENSIF	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)	63,3		63,3			
2.08.07		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK			1.050.143.959,00		243.680.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		MENINGKATNYA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan	100		100			

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja		Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		SKPD Penanggung jawab	Ket
		KEKERASAN, EKSPLOITASI, PENELANTARAN, PERKAWINAN DAN PERLAKUAN SALAH LAINNYA TERHADAP ANAK	Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (Persentase)						
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				30.639.476.159,00		10.422.057.359,00		
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				10.665.736.881,00		10.022.057.359,00	Dinas Ketahanan Pangan	
		TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH	Nilai SAKIP (Nilai)	66,72		66,72			
			Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)	80,50		80,50			
2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN				9.704.458.344,00		30.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan	
		MENINGKATNYA PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Jumlah Cadangan Pangan (Persentase)	81,00		81,00			
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT				8.060.054.293,00		230.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan	
		MENINGKATNYA DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)	91,20		91,20			
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN				1.070.430.473,00		40.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan	
		MENINGKATNYA PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	12,00		12,00			

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja		Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		SKPD Penanggung jawab	Ket
2.09.05		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN			1.138.796.168,00		100.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan	
		MENINGKATNYA PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan (%)	97,50		97,50			
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				24.256.251.961,00		20.474.292.352,00		
2.10.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			12.618.262.709,00		10.264.292.352,00	Dinas Pertanahan	
		TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH DINAS PERTANAHAN	Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)	83		83			
			Nilai SAKIP (Nilai)	81,3		81,3			
2.10.04		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN			1.469.166.979,00		70.000.000,00	Dinas Pertanahan	
		MENINGKATNYA PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Tingkat Penyelesaian Sengketa Tanah (%)	100		100			
2.10.05		PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN			1.766.679.148,00		50.000.000,00	Dinas Pertanahan	
		MENINGKATNYA PENYELESAIAN GANTI RUGI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Tingkat Penyelesaian ganti rugi dan santunan tanah untk pembangunan (%)	80		80			

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja		Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		SKPD Penanggung jawab	Ket
2.10.07		PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT			1.357.460.555,00		20.000.000,00	Dinas Pertanahan	
		MENINGKATNYA TATA KELOLA TANAH ULAYAT	Presentase Administrasi Penetapan Tanah Ulayat (%)	100		100			
2.10.08		PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG			1.022.341.285,00		30.000.000,00	Dinas Pertanahan	
		MENINGKATNYA PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Tingkat Pemanfaatan Tanah Kosong (%)	100		100			
2.10.10		PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH			6.022.341.285,00		10.040.000.000,00	Dinas Pertanahan	
		MENINGKATNYA TERTIB PERTANAHAN DAN KEPASTIAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK ATAS TANAH	Presentase Administrasi Penggunaan dan Penatagunaan Tanah (%)	100		100			
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				70.668.677.950,00		48.902.425.216,00		
2.11.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			19.000.017.911,00		16.917.315.149,00	Dinas Lingkungan Hidup	
		TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH	Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)	75		75			
			Nilai SAKIP (Nilai)	70,50		70,50			
2.11.02		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP			1.437.237.762,00		-	Dinas Lingkungan Hidup	
		MENINGKATNYA EFEKTIVITAS KAJIAN LINGKUNGAN UNTUK MEMITIGASI DAMPAK KRP	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang	100		100			

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja		Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		SKPD Penanggung jawab	Ket
			Ditindaklanjuti (%)						
2.11.03		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			2.841.262.494,00		627.590.067,00	Dinas Lingkungan Hidup	
		MENURUNNYA PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Peningkatan IKLH (%)	0,2		0,2			
2.11.04		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)			2.062.499.266,00		-	Dinas Lingkungan Hidup	
		MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI	Persentase RTH yang Dikelola (%)	12,87		12,87			
2.11.05		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)			1.186.247.958,00		-	Dinas Lingkungan Hidup	
		MENINGKATNYA PENANGANAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Penurunan Limbah B3 (%)	4		4			
2.11.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)			2.719.903.394,00		200.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup	
		MENINGKATNYA KEPATUHAN USAHA DAN / ATAU KEGIATAN TERHADAP PERSETUJUAN LINGKUNGAN YANG DITERBITKAN	Persentase Peningkatan Tolak Ukur Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau kegiatan Terhadap Izin	50		50			

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja		Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		SKPD Penanggung jawab	Ket
			Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH (%)						
2.11.07		PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH			1.161.767.535,00		-	Dinas Lingkungan Hidup	
		MENINGKATNYA KAPASITAS MHA DAN KEARIFAN LOKAL, PENGETAHUAN TRADISIONAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase Peningkatan Penetapan Masyarakat Adat Menjadi Masyarakat Hukum Adat (%)	25		25			
2.11.08		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			1.227.190.004,00		1.500.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup	
		MENINGKATNYA KAPASITAS SDM BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup yang Diberikan Kepada Lembaga Masyarakat / Lembaga Pendidikan (%)	80		80			
2.11.09		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			771.679.397,00		-	Dinas Lingkungan Hidup	
		MENINGKATNYA KINERJA PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup (%)	80		80			

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja		Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		SKPD Penanggung jawab	Ket
2.11.10		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP			1.321.730.700,00		100.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup	
		MENINGKATNYA PENYELESAIAN SENGKETA / KASUS TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penyelesaian Kasus Lingkungan Hidup (%)	80		80			
2.11.11		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			36.939.141.529,00		29.557.520.000,00	Dinas Lingkungan Hidup	
		MENINGKATNYA TATA KELOLA PERSAMPAHAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Capaian Pengelolaan Persampahan Yang Dikelola pada Fasilitas Pengelolaan Sampah (%)	26,2		26,2			
2.12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			22.341.284.701,00		13.705.738.695,00		
2.12.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			13.929.942.108,00		11.145.728.695,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH	Nilai SAKIP (Nilai)	70,50		70,50			
			Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)	100		100			
2.12.02		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK			4.690.219.751,00		1.560.010.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) dalam pelayanan	55		55			

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja		Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		SKPD Penanggung jawab	Ket
			Admindex (Persentase)						
2.12.03		PROGRAM PENCATATAN SIPIL			1.560.122.546,00		700.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN PENCATATAN SIPIL	Persentase kepemilikan akta kematian bagi penduduk yang meninggal (Persentase)	65,5		65,5			
			Persentase penduduk yang memiliki akta cerai bagi penduduk yang bercerai (Persentase)	63		63			
			Persentase anak berusia 0 - 4 tahun yang memiliki akta kelahiran (Persentase)	97		97			
			Persentase penduduk yang memiliki akta perkawinan bagi penduduk yang menikah (Persentase)	63		63			
2.12.04		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN			1.567.442.533,00		300.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja		Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		SKPD Penanggung jawab	Ket
		MENINGKATNYA PEMANFAATAN INFORMASI KEPENDUDUKAN	Persentase penduduk yang menggunakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi penduduk wajib KTP (Persentase)	20		20			
2.12.05		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN			593.557.763,00		-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		MENINGKATNYA KUALITAS PROFIL KEPENDUDUKAN	Jumlah data profil kependudukan yang disusun (Dokumen)	1		1			
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				49.789.148.759,00		19.877.481.243,00		
2.13.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			23.469.918.108,00		11.415.180.443,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH	Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	80		80			
			Nilai SAKIP (Nilai)	70,50		70,50			
2.13.02		PROGRAM PENATAAN DESA			1.032.394.643,00		50.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		MENINGKATNYA KUALITAS PENATAAN DESA	Persentase Fasilitasi Penataan Desa (%)	57		57			

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja		Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		SKPD Penanggung jawab	Ket
2.13.03		PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA			817.750.511,00		100.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		MENINGKATNYA EFEKTIVITAS KERJA SAMA DESA	Persentase Kerjasama Desa yang Telah Ditindaklanjuti (%)	50		50			
2.13.04		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA			19.176.011.121,00		7.312.300.800,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		MENINGKATNYA KUALITAS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa (%)	65		65			
2.13.05		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT			5.293.074.376,00		1.000.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		MENINGKATNYA KAPASITAS LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM PEMBANGUNAN	(Persentase LKD dan LAD aktif yang melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan (%)	48,03		48,03			
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				22.341.284.700,00		22.769.468.145,00		
2.14.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			15.332.794.252,00		15.435.705.289,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja		Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		SKPD Penanggung jawab	Ket
		TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH	Nilai SAKIP (Nilai)	70,50		70,50			
			Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)	76		76			
2.14.02		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK			1.173.760.734,00		1.151.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		TERKENDALINYA PERTAMBAHAN JUMLAH PENDUDUK	Angka Kelahiran Remaja Umur 15- 19 Tahun (ASFR 15-19)	16		16			
			Total Fertility Rate (TFR)	2,08		2,08			
2.14.03		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			3.069.208.352,00		3.374.980.056,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		MENINGKATNYA PEMBERDAYAAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Presentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri / IKK (%)	22,8		22,8			
			"Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR) " (%)	53,4		53,4			
			Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)	15,9		15,9			

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja		Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		SKPD Penanggung jawab	Ket
2.14.04		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)			2.765.521.362,00		2.807.782.800,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		MENINGKATNYA PEMBERDAYAAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga (%)	8,0		8,0			
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				83.833.395.740,00		82.776.914.278,00		
2.15.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			14.536.956.781,00		13.896.356.880,00	Dinas Perhubungan	
		TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH	Nilai SAKIP (Nilai)	70,50		70,50			
			Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)	80		80			
2.15.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			6.827.707.094,00		4.543.300.000,00	Dinas Perhubungan	
		MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN TRANSPORTASI DARAT DINAS PERHUBUNGAN	Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Pada Jalan Kabupaten/Kota (Persentase)	82,00		82,00			
2.15.03		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN			62.468.731.865,00		64.337.257.398,00	Dinas Perhubungan	
		MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN RANSPORTASI LAUT	Persentase Ketersediaan Sarana dan	79,57		79,57			

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja		Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		SKPD Penanggung jawab	Ket
			Prasarana Perhubungan (%)						
2.15.05		PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN			-		-	Dinas Perhubungan	
		MENINGKATNYA PENGELOLAAN PERLINTASAN KERETA API	Cakupan Dokumen Perencanaan Pengelolaan Perkeretaapian (%)						
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				118.837.201.375,00		77.100.873.522,00		
2.16.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			13.222.661.858,00		13.026.746.626,00	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
		TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH	Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)	0		82			
			Nilai SAKIP (Nilai)	0		70,50			
2.16.02		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			18.626.244.771,00		2.000.000.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
		MENINGKATNYA JANGKAUAN DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH	Indeks Keterbukaan Informasi Publik (Indeks)	0		98,25			
2.16.03		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA			86.988.294.746,00		62.074.126.896,00	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja		Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		SKPD Penanggung jawab	Ket
		MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Lokasi yang Terkoneksi Jaringan Intranet / Internet di Kabupaten Kutai Timur (%)	0		84			
			Persentase Aplikasi Pemerintahan yang Terintegrasi (%)	0		80			
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				25.702.962.280,00		15.456.023.335,00		
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				10.862.647.939,00		9.186.023.335,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	
		TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH	Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	81		76			
			Nilai SAKIP (Nilai)	0		70,50			
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI				2.203.485.679,00		270.000.000,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	
		MENINGKATNYA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (Persentase)	0		17,88			
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI				218.094.076,00		100.000.000,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	
		MENINGKATNYA KINERJA PENGELOLAAN KOPERASI	Persentase Koperasi Aktif (Persentase)			44,30			

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja		Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		SKPD Penanggung jawab	Ket
2.17.05		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN			250.399.079,00		200.000.000,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	
		MENINGKATNYA KUALITAS SDM PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan (Persentase)			10,22			
2.17.06		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI			1.259.528.412,00		200.000.000,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	
		MENINGKATNYA PRODUKTIVITAS KOPERASI	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (Persentase)			46,51			
2.17.07		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)			5.432.631.140,00		450.000.000,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	
		MENINGKATNYA KAPASITAS UMKM YANG TANGGUH DAN MANDIRI	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal (Persentase)	0		13,24			
2.17.08		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM			5.476.175.955,00		5.050.000.000,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	
		MENINGKATNYA DAYA SAING UMKM	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor (Persentase)	0		0,95			

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja		Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		SKPD Penanggung jawab	Ket
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				26.838.733.738,00		13.971.126.923,00		
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				13.925.352.996,00		11.671.126.923,00	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	
		TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH	Nilai SAKIP (Nilai)	70,50		70,50			
			Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)	80,2		80,2			
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL				3.231.447.319,00		-	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	
		MENINGKATNYA KEMUDAHAN BERINVESTASI	Realisasi Total terhadap Target Investasi (Persentase)	100		100			
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL				5.847.983.921,00		1.600.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	
		MENINGKATNYA JANGKAUAN PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Jumlah Promosi yang Diikuti (%)	100		100			
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL				1.318.517.817,00		-	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	
		MENINGKATNYA PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (Persentase)	100		100			

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja		Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		SKPD Penanggung jawab	Ket
2.18.05		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL			2.176.050.153,00		700.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	
		TERKENDALINYA PERLAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha (Persentase)	100		100			
2.18.06		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL			339.381.532,00		-	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	
		MENINGKATNYA PEMANFAATAN DAN INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (Persentase)	100		100			
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				62.751.911.209,00		39.495.180.065,00		
2.19.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			17.741.670.040,00		12.545.180.065,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
		TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Nilai SAKIP (Nilai)	70,50		70,50			
			Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)	80		80			

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		SKPD Penanggung jawab	Ket
2.19.02		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN		5.754.105.627,00		2.050.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
		MENINGKATNYA DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase organisasi pemuda yang aktif (%)	68,75		68,75		
			Persentase Pemuda yang Pernah Mengikuti Pelatihan/ Kursus/ Training/ dan Memperoleh Sertifikat (%)	4,96		4,96		
2.19.03		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN		36.447.593.309,00		23.150.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
		MENINGKATNYA PEMBUDAYAAN DAN PRESTASI OLAHRAGA	Cakupan Pembinaan Olahraga (%)	58,33		58,33		
			Persentase Atlet yang Berasal Dari Kab/ Kota yang Masuk Pelatda (%)	13,60		13,60		
2.19.04		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN		2.808.542.233,00		1.750.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
		MENINGKATNYA KULITAS KEPRAMUKAAN	Presentase Organisasi Kepramukaan yang Aktif (%)	34,02		34,02		
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			1.514.247.472,00		1.000.000.000,00		
2.20.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		1.514.247.472,00		1.000.000.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja		Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		SKPD Penanggung jawab	Ket
		TERCAPAINYA KOLABORASI, INTEGRASI DAN STANDARISASI DALAM PENYELENGGARAAN SISTEM STATISTIK NASIONAL (SSN)	Persentase Publikasi Data Sektoral dalam Portal Satu Data (%)	45		45			
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				1.121.423.053,00		500.000.000,00		
2.21.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI			1.121.423.053,00		500.000.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
		MENINGKATNYA KEAMANAN SIBER DAN SANDI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH	Indeks KAMI (Indeks)	2		2			
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				3.012.246.994,00		15.000.000.000,00		
2.22.02		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			1.168.955.811,00		10.500.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		MENINGKATNYA PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan (Persentase)	30		30			
2.22.03		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL			380.195.824,00		1.000.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		MENINGKATNYA PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Prosentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan (Persentase)	40		40			

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja		Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		SKPD Penanggung jawab	Ket
2.22.04		PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH			119.875.367,00		500.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		MENINGKATNYA AKSES MASYARAKAT TERHADAP INFORMASI SEJARAH	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal (Persentase)	15		15			
2.22.05		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA			271.141.173,00		500.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		MENINGKATNYA WARISAN BUDAYA YANG DILESTARIKAN	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan (Persentase)	0,11		0,11			
			Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan (%)	0,11		0,11			
2.22.06		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN			1.072.078.819,00		2.500.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		MENINGKATNYA TATA KELOLA MUSEUM	Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum (Persentase)	25		25			
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				33.214.070.902,00		27.053.943.936,00		
2.23.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			29.151.153.895,00		25.053.943.936,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	77		77			

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja		Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		SKPD Penanggung jawab	Ket
			Nilai SAKIP (Nilai)	70,50		70,50			
2.23.02		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN			4.062.917.007,00		2.000.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		MENINGKATNYA LAYANAN PERPUSTAKAAN SESUAI STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Persentase Ketermanfaatan Perpustakaan oleh Masyarakat (%)	1,45		1,45			
			Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (Nilai)	68,23		68,23			
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				2.155.715.992,00		100.000.000,00		
2.24.02		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP			1.773.447.894,00		90.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		MENINGKATNYA TATA KELOLA ARSIP DINAMIS DAN STATIS	Tingkat Ketersediaan Arsip (Persentase)	29,63		29,63			
			Hasil Pengawasan Kearsipan Perangkat Daerah Minimal B (Rasio)	0,19		0,19			
2.24.03		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP			382.268.098,00		10.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		MENINGKATNYA PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP SESUAI NSPK	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip (Persentase)	37,04		37,04			

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		SKPD Penanggung jawab	Ket
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			68.223.284.018,00		20.550.866.301,00		
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			25.415.223.877,00		13.851.862.676,00	Dinas Perikanan	
	TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH DINAS PERIKANAN	Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)	80		80			
		Nilai SAKIP (Nilai)	70,50		70,50			
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			16.068.207.598,00		1.950.000.000,00	Dinas Perikanan	
	MENINGKATNYA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP DINAS PERIKANAN	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	8799,28		8799,28			
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			19.377.355.770,00		3.887.291.625,00	Dinas Perikanan	
	MENINGKATNYA PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA DINAS PERIKANAN	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	1138,63		1138,63			
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN			2.612.498.855,00		50.000.000,00	Dinas Perikanan	
	MENINGKATNYA KELESTARIAN LAUT DAN KEANEKARAGAMAN HAYATI	Persentase Kawasan Perairan Umum Darat yang Diawasi (%)	48,65		48,65			
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN			4.749.997.918,00		811.712.000,00	Dinas Perikanan	
	MENINGKATNYA KONSUMSI IKAN OLEH MASYARAKAT	Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH)	43,49		43,49			
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			38.746.055.521,00		18.374.157.576,00		
3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			17.416.645.804,00		10.374.157.576,00	Dinas Pariwisata	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja		Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		SKPD Penanggung jawab	Ket
		TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH	Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	74		74			
			Nilai SAKIP (Nilai)	70,50		70,50			
3.26.02		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			7.635.662.117,00		1.690.000.000,00	Dinas Pariwisata	
		MENINGKATNYA DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Pertumbuhan Tamu Wisatawan Asing (Hotel Berbintang non Bintang) (%)	1,21		1,21			
			Pertumbuhan Investasi Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum (%)	1,06		1,06			
3.26.03		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA			3.580.006.831,00		760.000.000,00	Dinas Pariwisata	
		MENINGKATNYA JANGKAUAN PEMASARAN PARIWISATA	Persentase peningkatan promosi pemasaran pariwisata (%)	16,67		16,67			
3.26.04		PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL			5.465.884.945,00		2.550.000.000,00	Dinas Pariwisata	
		MENINGKATNYA KUALITAS EKOSISTEM KREATIF	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual (Persentase)	0,14		0,14			

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja		Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		SKPD Penanggung jawab	Ket
3.26.05		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			4.647.855.824,00		3.000.000.000,00	Dinas Pariwisata	
		MENINGKATNYA KAPASITAS SDM PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif yang terlatih (%)	37,82		37,82			
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				180.268.477.720,00		111.706.693.744,00		
3.27.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			86.411.370.074,00		67.200.309.387,00	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	
		TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN	Nilai SAKIP (Nilai)	70,50		70,50			
			Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	80		80			
3.27.02		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			35.482.421.965,00		7.559.000.000,00	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	
		MENINGKATNYA DISTRIBUSI DAN KUALITAS SARANA PERTANIAN DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN	Produksi Nanas (Ton)	18426		18426			
			Jumlah Produksi Padi (Ton)	26186		26186			
			Jumlah Produksi Tanaman	437		437			

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja		Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		SKPD Penanggung jawab	Ket
			Hortikultura Jenis Cabai (Ton)						
			Jumlah Produksi Jagung (Ton)	1550		1550			
			Jumlah Produksi Daging (sapi, kerbau, domba, kambing, ayam, itik, babi) (Ton)	3325		3325			
			Produksi Pisang (Ton)	97417		97417			
3.27.03		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			14.469.450.993,00		16.450.000.000,00	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Pernakan	
		MENINGKATNYA DISTRIBUSI DAN KUALITAS PRASARANA PERTANIAN DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN	Proporsi Luas Lahan Pertanian yang ditetapkan Sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (%)	65,33		65,33			
3.27.04		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER			1.037.739.686,00		750.000.000,00	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Pernakan	
		MENINGKATNYA PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (%)	100		100			
3.27.05		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN			2.085.537.168,00		1.000.000.000,00	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Pernakan	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		SKPD Penanggung jawab	Ket
	MENINGKATNYA PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN	Persentase Penanganan Bencana Pertanian (Persentase)	55,33		55,33			
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN			4.136.024.614,00		3.800.000.000,00	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	
	MENINGKATNYA KAPASITAS SDM BIDANG PENYULUHAN PERTANIAN DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan (Persentase)	19,34		19,34			
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			12.372.384.357,00		10.372.384.357,00	Dinas Perkebunan	
	TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH DINAS PERKEBUNAN	Nilai SAKIP (Nilai)	65,5		65,5			
		Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)	80		80			
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			13.001.914.630,00		3.000.000.000,00	Dinas Perkebunan	
	MENINGKATNYA DISTRIBUSI DAN KUALITAS SARANA PERTANIAN DINAS PERKEBUNAN	Tingkat Cakupan Penyediaan Sarana Pertanian (%)	45		45			
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			3.127.480.564,00		450.000.000,00	Dinas Perkebunan	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja		Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		SKPD Penanggung jawab	Ket
		MENINGKATNYA DISTRIBUSI DAN KUALITAS PRASARANA PERTANIAN DINAS PERKEBUNAN	Tingkat Penyediaan Prasarana Pertanian (%)	20		20			
3.27.05		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN			1.396.586.791,00		75.000.000,00	Dinas Perkebunan	
		MENINGKATNYA PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN DINAS PERKEBUNAN	Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI tanaman perkebunan (%)	100		100			
			Persentase peningkatan luas ANKT (%)	0,08		0,08			
			Cakupan Penanggulangan bencana Pertanian (%)	60		60			
3.27.06		PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN			454.303.513,00		50.000.000,00	Dinas Perkebunan	
		MENINGKATNYA KUALITAS DAN KEMUDAHAN PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Perizinan usaha pertanian yang diawasi (%)	20		20			
3.27.07		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN			6.293.263.365,00		1.000.000.000,00	Dinas Perkebunan	
		MENINGKATNYA KAPASITAS SDM BIDANG PENYULUH PERTANIAN DINAS PERKEBUNAN	Cakupan Bina Kelompok Tani (%)	0,17		0,17			
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				16.791.550.099,00		7.050.000.000,00		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		SKPD Penanggung jawab	Ket
3.30.02		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN		817.504.708,00		-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		MENINGKATNYA KEMUDAHAN PROSES PERIZINAN DAN PENDAFTARAN BERUSAHA	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi (Persentase)	100		100		
3.30.03		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		5.164.160.138,00		2.000.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		MENINGKATNYA KUALITAS SARANA PERDAGANGAN DAN DISTRIBUSI BARANG YANG EFISIEN, MERATA DAN TERINTEGRASI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (Persentase)	33		33		
3.30.04		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		7.371.579.805,00		5.000.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		MENINGKATNYA KELANCARAN DISTRIBUSI DAN STABILITAS HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (Persentase)	1,08		1,08		
3.30.05		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		1.576.711.655,00		25.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		MENINGKATNYA PELAKU USAHA YANG BERORIENTASI EKSPOR	Persentase Pelaku usaha yang Melakukan Ekspor (%)	1,5		1,5		
3.30.06		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		1.004.763.903,00		25.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		MENINGKATNYA TERTIB NIAGA DAN MUTU PRODUK	Persentase alat-alat ukur, takar,	100		100		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja		Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		SKPD Penanggung jawab	Ket
			timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (%)						
3.30.07		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI			856.829.890,00		-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		MENINGKATNYA PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan (Persentase)	12		12			
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				21.377.860.583,00		16.827.291.678,00		
3.31.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			18.336.316.458,00		16.327.291.678,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	60,55		60,55			
			Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)	82		82			
3.31.02		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			1.750.128.186,00		500.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		MENINGKATNYA REALISASI PEMBANGUNAN INDUSTRI	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM) (%)	97,11		97,11			
3.31.03		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI			583.308.121,00		-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja		Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		SKPD Penanggung jawab	Ket
		MENINGKATNYA KUALITAS PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PERINDUSTRIAN	persentase kepatuhan berusaha (Persentase)	100		100			
3.31.04		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL			708.107.818,00		-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		MENINGKATNYA PEMANFAATAN INFORMASI INDUSTRI	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini (Persentase)	6,50		6,50			
3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI				3.360.684.287,00		1.050.000.000,00		
3.32.02		PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI			646.857.657,00		50.000.000,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
		MENINGKATNYA PELAKSANAAN TRANSMIGRASI	Persentase Program Transmigrasi yang Dilaksanakan (Persentase)	20,00		20,00			
3.32.04		PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI			2.713.826.630,00		1.000.000.000,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
		MENINGKATNYA PEMBERDAYAAN DAN KAPASITAS TRANSMIGRAN DALAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan (Persentase)	4,01		4,01			
4.01	SEKRETARIAT DAERAH				356.394.761.599,00		267.188.245.859,00		
4.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			215.461.015.338,00		133.673.245.859,00	Sekretariat Daerah	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja		Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		SKPD Penanggung jawab	Ket
		TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH	Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)	78,75		78,75			
			Nilai SAKIP (Nilai)	70,50		70,50			
4.01.02		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			128.347.281.814,00		128.215.000.000,00	Sekretariat Daerah	
		MENINGKATNYA KUALITAS KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Presentase Penerima Beasiswa (%)	76,00		76,00			
			Persentase Ketercapaian Kinerja SPM (%)	93,00		93,00			
			Indeks Reformasi Hukum (Indeks)	71,5		71,5			
			Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) (Indeks)	75,00		75,00			
			Efektivitas Kerja Sama Daerah (Persentase)	80		80			
4.01.03		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			12.586.464.447,00		5.300.000.000,00	Sekretariat Daerah	
		MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Indeks Perkembangan Harga (Indeks)	5		5			
			Indeks Tata Kelola Pengadaan (Indeks)	7190		7190			
			Presentase Layanan Eletrifikasi Rumah Tangga (%)	90,42		90,42			

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja		Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		SKPD Penanggung jawab	Ket
			Presentase Pelaksanaan Kebijakan Urusan Pembangunan dan Perekonomian (%)	75,00		75,00			
4.02	SEKRETARIAT DPRD				86.282.413.540,00		70.394.577.286,00		
4.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			70.646.019.937,00		65.664.577.286,00	Sekretariat DPRD	
		TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH	Nilai SAKIP (Nilai)	70,50		70,50			
			Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)	74		74			
4.02.02		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			15.636.393.603,00		4.730.000.000,00	Sekretariat DPRD	
		MENINGKATNYA KUALITAS PERSIDANGAN DAN KAJIAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN, PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD (Indeks)	80		80			
5.01	PERENCANAAN				37.661.022.779,00		21.871.519.774,00		
5.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			21.089.449.935,00		15.271.519.773,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
		Terlaksananya penunjang perangkat daerah	Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)	76,00		76,00			
			Nilai SAKIP (Nilai)	70,50		70,50			

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja		Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		SKPD Penanggung jawab	Ket
5.01.02		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH			6.892.176.798,00		3.150.000.001,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
		MENINGKATNYA KUALITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Capaian Kinerja Program (Persentase)	94,50		94,50			
			Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (%)	100		100			
5.01.03		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			9.679.396.046,00		3.450.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
		MENINGKATNYA KUALITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA, BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN, BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur Dan Kewilayahan (%)	100		100			
			Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA (%)	100		100			
			Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan	100		100			

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja		Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		SKPD Penanggung jawab	Ket
			dan Pembangunan Manusia (%)						
5.02	KEUANGAN				1.284.304.709.040,00		1.090.378.545.425,00		
5.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			145.870.264.255,00		139.365.746.981,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
		TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Nilai SAKIP (Nilai)	70,50		70,50			
			Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)	77		77			
5.02.02		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			1.058.308.815.110,00		879.309.464.825,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
		MENINGKATNYA TATA KELOLA ANGGARAN, PENBENDAHARAAN, AKUNTANSI DAN PELAPORAN	Presentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (%)	40		40			
			Presentase Penurunan SILPA (%)	94,57		94,57			
			Presentase Belanja Pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD (%)	30		30			
			Presentase Realisasi	84,37		84,37			

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja		Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		SKPD Penanggung jawab	Ket
			Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar (%)						
			Persentase Realisasi SP2D Terhadap Total SPD yang Diterbitkan (%)	83		83			
5.02.03		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			30.336.480.915,00		27.311.400.000,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
		MENINGKATNYA TATA KELOLA ASET DAERAH	Presentase Penambahan Nilai Aset Tetap (%)	50,47		50,47			
5.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			41.313.459.449,00		38.029.023.061,00	Badan Pendapatan Daerah	
		TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH BADAN PENDAPATAN DAERAH	Nilai SAKIP (Nilai)	70,50		70,50			
			Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)	78		78			
5.02.04		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			8.475.689.311,00		6.362.910.558,00		
		MENINGKATNYA UPAYA EKSTENSIFIKASI DAN INTENSIFIKASI PENDAPATAN	Persentase WP terdaftar aktif terhadap total WP terdata (%)	67		67			
			Persentase realisasi penagihan	62,70		62,70			

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja		Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		SKPD Penanggung jawab	Ket
			terhadap piutang pajak (%)						
			Persentase Realisasi penerimaan PBB dan BPHTB berdasarkan ketetapan (%)	30,8		30,8			
			Persentase capaian pajak daerah terhadap target yg ditetapkan (%)	100		100			
5.03	KEPEGAWAIAN				22.816.272.144,00		24.616.891.232,00		
5.03.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			22.416.272.144,00		19.616.891.232,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
		TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH	Nilai SAKIP (Nilai)	70,50		70,50			
			Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)	82		82			
5.03.02		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			400.000.000,00		5.000.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
		MENINGKATNYA KUALITAS PENILAIAN KINERJA ASN	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik (Persentase)	99,88		99,88			

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja		Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		SKPD Penanggung jawab	Ket
		MENINGKATNYA TATA KELOLA PENGEMBANGAN KARIR ASN	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya (Persentase)	96		96			
		MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi (Persentase)	100		100			
		MENINGKATNYA PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	15		15			
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				3.352.065.375,00		2.800.000.000,00		
5.04.02		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			3.352.065.375,00		2.800.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
		MENINGKATNYA LAYANAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI DASAR, KADER, MANAJERIAL, DAN FUNGSIONAL	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional (%)	40,14		40,14			
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				13.043.093.239,00		7.314.532.199,00		
5.05.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			9.533.478.699,00		6.314.532.199,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja		Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		SKPD Penanggung jawab	Ket
		TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH	Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)	90		82,2			
			Nilai SAKIP (Nilai)	62,5		62,7			
5.05.02		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			1.944.194.189,00		1.000.000.000,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah	
		MENINGKATNYA PEMANFAATAN HASIL KELITBANGAN DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENGEMBANGAN POTENSI UNGGULAN, SERTA PENYELESAIAN PERMASALAHAN DAERAH	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan (Persentase)	0		29,63			
5.05.03		PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH			1.565.420.351,00		-	Badan Riset dan Inovasi Daerah	
		MENINGKATNYA PEMANFAATAN INOVASI DAERAH DALAM PEMBANGUNAN, PENGEMBANGAN POTENSI UNGGULAN DAN PENYELESAIAN PERMASALAHAN DAERAH	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan Pemerintah, Masyarakat, Industri, dan Badan Usaha di Daerah (%)	0		28,57			
6.01	INSPEKTORAT DAERAH				45.565.793.601,00		40.288.303.647,00		
6.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			22.576.370.023,00		22.338.303.647,00	Inspektorat	
		TERWUJUDNYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH	Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)	80		80			

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja		Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		SKPD Penanggung jawab	Ket
			Nilai SAKIP (Nilai)	70,50		70,50			
6.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN			16.529.499.243,00		15.150.000.000,00	Inspektorat	
		MENURUNNYA TERJADINYA PENYELEWENGAN ATAU PENYIMPANGAN, BAIK YANG BERSIFAT ANGGARAN ATAUPUN PROSES DAN KEWENANGAN	Tindakanj Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 (%)	83		83			
6.01.03		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI			6.459.924.335,00		2.800.000.000,00	Inspektorat	
		MENINGKATNYA KUALITAS PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Maturitas SPIP SKPD Level 3 (%)	55		55			
			Manajemen Risiko Indeks (Nilai)	3		3			
			Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (Nilai)	3		3			
7.01	KECAMATAN				165.147.656.122,00		137.473.165.890,00		
7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			10.045.420.150,00		8.685.049.269,00	Kantor Camat Sangatta Selatan	
		MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEC. SANGATTA SELATAN	Nilai SAKIP (Nilai)	70,50		70,50			
			Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	78		78			

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja		Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		SKPD Penanggung jawab	Ket
7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			1.667.793.516,00		94.453.000,00	Kantor Camat Sangatta Selatan	
		MENINGKATNYA PEMBERIAN LAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI KECAMATAN SANGATTA SELATAN	Persentase Masyarakat yang dilayani (%)	71		71			
7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			2.075.936.974,00		13.034.882.000,00	Kantor Camat Sangatta Selatan	
		MENINGKATNYA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI WILAYAH KECAMATAN SANGATTA SELATAN	Presentase Usulan Masyarakat yang di akomodir (%)	65,00		65,00			
7.01.04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			1.407.500.759,00		83.139.000,00	Kantor Camat Sangatta Selatan	
		MENINGKATNYA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI WILAYAH KECAMATAN SANGATTA SELATAN	Presentase Penegakan Peraturan Terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	60		60			
7.01.05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			1.956.492.129,00		182.002.000,00	Kantor Camat Sangatta Selatan	
		MENINGKATNYA WAWASAN KEBANGSAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN SANGATTA SELATAN	Presentase Masyarakat yang Memahami Wawasan Kebangsaan (%)	90,83		90,83			
7.01.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			929.455.510,00		75.019.000,00	Kantor Camat Sangatta Selatan	
		MENINGKATNYA PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BAIK DI	Presentase Desa yang menerapkan Tata Kelola	100		100			

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		SKPD Penanggung jawab	Ket
	WILAYAH KECAMATAN SANGATTA SELATAN	Pemerintahan yang baik (%)						
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			14.883.956.814,00		8.325.760.589,00	Kantor Camat Sangatta Utara	
	MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEC. SANGATTA UTARA	Nilai SAKIP (Nilai)	70,50		70,50			
		Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	78		78			
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			2.553.609.626,00		50.000.000,00	Kantor Camat Sangatta Utara	
	MENINGKATNYA PEMBERIAN LAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI KECAMATAN SANGATTA UTARA	Persentase Masyarakat yang dilayani (%)	75		75			
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			3.197.572.403,00		19.944.674.000,00	Kantor Camat Sangatta Utara	
	MENINGKATNYA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI WILAYAH KECAMATAN SANGATTA UTARA	Presentase Usulan Masyarakat yang di akomodir (%)	75		75			
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			1.556.353.980,00		50.000.000,00	Kantor Camat Sangatta Utara	
	MENINGKATNYA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI WILAYAH KECAMATAN SANGATTA UTARA	Presentase Penegakan Peraturan Terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	55		55			

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja		Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		SKPD Penanggung jawab	Ket
7.01.05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			2.571.742.177,00		80.000.000,00	Kantor Camat Sangatta Utara	
		MENINGKATNYA WAWASAN KEBANGSAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN SANGATTA UTARA	Persentase masyarakat yang memahami wawasan kebangsaan (%)	20		20			
7.01.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			2.046.306.639,00		50.000.000,00	Kantor Camat Sangatta Utara	
		MENINGKATNYA PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BAIK DI WILAYAH KECAMATAN SANGATTA UTARA	Presentase Desa yang menerapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (%)	75		75			
7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			11.023.305.695,00		6.845.904.764,00	Kantor Camat Bengalon	
		MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEC. BENGALON	Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	73		73			
			Nilai Sakip Pemerintah Daerah (Nilai)	73,00		73,00			
7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			319.587.674,00		100.000.000,00	Kantor Camat Bengalon	
		MENINGKATNYA PEMBERIAN LAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI KECAMATAN BENGALON	Persentase Masyarakat yang dilayani (%)	57		57			
7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			638.285.000,00		550.000.000,00	Kantor Camat Bengalon	
		MENINGKATNYA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI	Presentase Usulan Masyarakat yang di akomodir (%)	60,02		60,02			

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		SKPD Penanggung jawab	Ket
	WILAYAH KECAMATAN BENGALON							
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			350.684.186,00		50.000.000,00	Kantor Camat Bengalon	
	MENINGKATNYA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI WILAYAH KECAMATAN BENGALON	Presentase Penegakan Peraturan Terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	59,50		59,50			
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			796.743.314,00		100.000.000,00	Kantor Camat Bengalon	
	MENINGKATNYA WAWASAN KEBANGSAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN BENGALON	Presentase Masyarakat yang Memahami Wawasan Kebangsaan (%)	66,00		66,00			
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			331.651.901,00		100.000.000,00	Kantor Camat Bengalon	
	MENINGKATNYA PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BAIK DI WILAYAH KECAMATAN BENGALON	Presentase Desa yang menerapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (%)	75,00		75,00			
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			4.758.953.127,00		3.960.109.044,00	Kantor Camat Kaliorang	
	MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEC. KALIORANG	Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	78		78			
		Nilai SAKIP (Nilai)	70,50		70,50			
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			404.605.751,00		70.000.000,00	Kantor Camat Kaliorang	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja		Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		SKPD Penanggung jawab	Ket
		MENINGKATNYA PEMBERIAN LAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI KECAMATAN KALIORANG	Persentase Masyarakat yang dilayani (%)	82		82			
7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			573.215.405,00		570.000.000,00	Kantor Camat Kaliorang	
		MENINGKATNYA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI WILAYAH KECAMATAN KALIORANG	Presentase Usulan Masyarakat yang di akomodir (%)	100		100			
7.01.04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			390.920.318,00		70.000.000,00	Kantor Camat Kaliorang	
		MENINGKATNYA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI WILAYAH KECAMATAN KALIORANG	Presentase Penegakan Peraturan Terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	100		100			
7.01.05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			428.134.508,00		140.000.000,00	Kantor Camat Kaliorang	
		MENINGKATNYA WAWASAN KEBANGSAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN KALIORANG	Presentase Masyarakat yang Memahami Wawasan Kebangsaan (%)	70		70			
7.01.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			289.072.671,00		70.000.000,00	Kantor Camat Kaliorang	
		MENINGKATNYA PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BAIK DI WILAYAH KECAMATAN KALIORANG	Presentase Desa yang menerapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (%)	80		80			
7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			7.156.619.013,00		6.423.884.061,00	Kantor Camat Muara Wahau	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja		Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		SKPD Penanggung jawab	Ket
		MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEC. MUARA WAHAU	Nilai SAKIP (Nilai)	70,50		70,50			
			Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	73		73			
7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			450.487.952,00		30.000.000,00	Kantor Camat Muara Wahau	
		MENINGKATNYA PEMBERIAN LAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI KECAMATAN MUARA WAHAU	Persentase Masyarakat yang dilayani (%)	73		73			
7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			461.771.419,00		425.617.301,00	Kantor Camat Muara Wahau	
		MENINGKATNYA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI WILAYAH KECAMATAN MUARA WAHAU	Presentase Usulan Masyarakat yang di akomodir (%)	98		98			
7.01.04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			387.328.316,00		30.000.000,00	Kantor Camat Muara Wahau	
		MENINGKATNYA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI WILAYAH KECAMATAN MUARA WAHAU	Presentase Penegakan Peraturan Terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	98		98			
7.01.05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			357.427.948,00		300.000.000,00	Kantor Camat Muara Wahau	
		MENINGKATNYA WAWASAN KEBANGSAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN MUARA WAHAU	Presentase Masyarakat yang Memahami	70,3		70,3			

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja		Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		SKPD Penanggung jawab	Ket
			Wawasan Kebangsaan (%)						
7.01.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			277.556.812,00		55.000.000,00	Kantor Camat Muara Wahau	
		MENINGKATNYA PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BAIK DI WILAYAH KECAMATAN MUARA WAHAU	Presentase Desa yang menerapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (%)	70,3		70,3			
7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			6.091.073.636,00		5.634.532.200,00	Kantor Camat Kombeng	
		MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEC. KOMBENG	Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	77		77			
			Nilai SAKIP (Nilai)	70,50		70,50			
7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			438.707.507,00		40.000.000,00	Kantor Camat Kombeng	
		MENINGKATNYA PEMBERIAN LAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI KECAMATAN KOMBENG	Persentase Masyarakat yang dilayani (%)	76		76			
7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			472.712.486,00		570.000.000,00	Kantor Camat Kombeng	
		MENINGKATNYA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI WILAYAH KECAMATAN KOMBENG	Presentase Usulan Masyarakat yang di akomodir (%)	74		74			
7.01.04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			403.144.217,00		28.415.000,00	Kantor Camat Kombeng	
		MENINGKATNYA KETENTRAMAN DAN	Presentase Penegakan	100		100			

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja		Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		SKPD Penanggung jawab	Ket
		KETERTIBAN UMUM DI WILAYAH KECAMATAN KOMBENG	Peraturan Terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)						
7.01.05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			327.996.719,00		220.000.000,00	Kantor Camat Kombeng	
		MENINGKATNYA WAWASAN KEBANGSAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN KOMBENG	Presentase Masyarakat yang Memahami Wawasan Kebangsaan (%)	73		73			
7.01.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			357.912.054,00		45.000.000,00	Kantor Camat Kombeng	
		MENINGKATNYA PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BAIK DI WILAYAH KECAMATAN KOMBENG	Presentase Desa yang menerapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (%)	76		76			
7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			6.080.951.936,00		79.000.000,00	Kantor Camat Muara Ancalong	
		MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEC. MUARA ANCALONG	Nilai SAKIP (Nilai)	70,50		70,50			
			Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)	72,50		72,50			
7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			360.407.537,00		50.000.000,00	Kantor Camat Muara Ancalong	
		MENINGKATNYA PEMBERIAN LAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI KECAMATAN MUARA ANCALONG	Persentase Masyarakat yang dilayani (%)	80		80			

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		SKPD Penanggung jawab	Ket
7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		400.099.396,00		575.000.000,00	Kantor Camat Muara Ancalong	
		MENINGKATNYA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI WILAYAH KECAMATAN MUARA ANCALONG	Presentase Usulan Masyarakat yang di akomodir (%)	78,57		78,57		
7.01.04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		344.853.208,00		20.000.000,00	Kantor Camat Muara Ancalong	
		MENINGKATNYA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI WILAYAH KECAMATAN MUARA ANCALONG	Presentase Penegakan Peraturan Terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	100		100		
7.01.05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		385.449.928,00		155.000.000,00	Kantor Camat Muara Ancalong	
		MENINGKATNYA WAWASAN KEBANGSAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN MUARA ANCALONG	Presentase Masyarakat yang Memahami Wawasan Kebangsaan (%)	60,00		60,00		
7.01.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		345.091.301,00		90.000.000,00	Kantor Camat Muara Ancalong	
		MENINGKATNYA PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BAIK DI WILAYAH KECAMATAN MUARA ANCALONG	Presentase Desa yang menerapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (%)	60,00		60,00		
7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		4.595.645.247,00		3.935.881.735,00	Kantor Camat Batu Ampar	
		MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEC. BATU AMPAR	Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	79		79		

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja		Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		SKPD Penanggung jawab	Ket
			Nilai SAKIP (Nilai)	70,50		70,50			
7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			466.356.720,00		30.000.000,00	Kantor Camat Batu Ampar	
		MENINGKATNYA PEMBERIAN LAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI KECAMATAN BATU AMPAR	Persentase Masyarakat yang dilayani (%)	77		77			
7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			592.899.408,00		570.000.000,00	Kantor Camat Batu Ampar	
		MENINGKATNYA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI WILAYAH KECAMATAN BATU AMPAR	Presentase Usulan Masyarakat yang di akomodir (%)	79		79			
7.01.04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			311.994.928,00		50.000.000,00	Kantor Camat Batu Ampar	
		MENINGKATNYA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI WILAYAH KECAMATAN BATU AMPAR	Presentase Penegakan Peraturan Terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	77		77			
7.01.05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			355.067.624,00		220.000.000,00	Kantor Camat Batu Ampar	
		MENINGKATNYA WAWASAN KEBANGSAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN BATU AMPAR	Presentase Masyarakat yang Memahami Wawasan Kebangsaan (%)	79		79			
7.01.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			254.592.327,00		120.000.000,00	Kantor Camat Batu Ampar	
		MENINGKATNYA PENERAPAN TATA KELOLA	Presentase Desa yang menerapkan	72		72			

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		SKPD Penanggung jawab	Ket
	PEMERINTAH YANG BAIK DI WILAYAH KECAMATAN BATU AMPAR	Tata Kelola Pemerintahan yang baik (%)						
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			5.030.628.077,00		4.543.619.536,00	Kantor Camat Telen	
	MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEC. TELEN	Nilai SAKIP (Nilai)	70,50		70,50			
		Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	75		75			
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			415.399.745,00		35.000.000,00	Kantor Camat Telen	
	MENINGKATNYA PEMBERIAN LAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI KECAMATAN TELEN	Persentase Masyarakat yang dilayani (%)	74		74			
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			471.601.161,00		530.000.000,00	Kantor Camat Telen	
	MENINGKATNYA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI WILAYAH KECAMATAN TELEN	Presentase Usulan Masyarakat yang di akomodir (%)	74		74			
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			314.217.046,00		70.000.000,00	Kantor Camat Telen	
	MENINGKATNYA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI WILAYAH KECAMATAN TELEN	Presentase Penegakan Peraturan Terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	100		100			
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			385.287.437,00		185.000.000,00	Kantor Camat Telen	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja		Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		SKPD Penanggung jawab	Ket
		MENINGKATNYA WAWASAN KEBANGSAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN TELEN	Presentase Masyarakat yang Memahami Wawasan Kebangsaan (%)	75		75			
7.01.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			319.090.795,00		75.000.000,00	Kantor Camat Telen	
		MENINGKATNYA PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BAIK DI WILAYAH KECAMATAN TELEN	Presentase Desa yang menerapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (%)	75		75			
7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			3.885.403.300,00		3.696.256.689,00	Kantor Camat Busang	
		MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEC. BUSANG	Nilai SAKIP (Nilai)	70,50		70,50			
			Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	79		79			
7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			415.399.745,00		70.000.000,00	Kantor Camat Busang	
		MENINGKATNYA PEMBERIAN LAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI KECAMATAN BUSANG	Persentase Masyarakat yang dilayani (%)	70		70			
7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			565.957.057,00		565.000.000,00	Kantor Camat Busang	
		MENINGKATNYA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI WILAYAH KECAMATAN BUSANG	Presentase Usulan Masyarakat yang di akomodir (%)	55		55			

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		SKPD Penanggung jawab	Ket
7.01.04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		379.969.484,00		75.000.000,00	Kantor Camat Busang	
		MENINGKATNYA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI WILAYAH KECAMATAN BUSANG	Presentase Penegakan Peraturan Terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	80		80		
7.01.05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		354.387.292,00		125.000.000,00	Kantor Camat Busang	
		MENINGKATNYA WAWASAN KEBANGSAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN BUSANG	Presentase Masyarakat yang Memahami Wawasan Kebangsaan (%)	65		65		
7.01.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		277.140.062,00		170.000.000,00	Kantor Camat Busang	
		MENINGKATNYA PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BAIK DI WILAYAH KECAMATAN BUSANG	Presentase Desa yang menerapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (%)	70		70		
7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		6.194.681.511,00		5.790.490.826,00	Kantor Camat Teluk Pandan	
		MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEC TELUK PANDAN	Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	78		78		
			Nilai SAKIP (Nilai)	70,50		70,50		
7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		489.845.013,00		20.000.000,00	Kantor Camat Teluk Pandan	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja		Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		SKPD Penanggung jawab	Ket
		MENINGKATNYA PEMBERIAN LAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI KECAMATAN TELUK PANDAN	Persentase Masyarakat yang dilayani (%)	94		94			
7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			535.668.229,00		530.000.000,00	Kantor Camat Teluk Pandan	
		MENINGKATNYA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI WILAYAH KECAMATAN TELUK PANDAN	Presentase Usulan Masyarakat yang di akomodir (%)	60		60			
7.01.04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			388.095.936,00		40.000.000,00	Kantor Camat Teluk Pandan	
		MENINGKATNYA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI WILAYAH KECAMATAN TELUK PANDAN	Presentase Penegakan Peraturan Terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	81		81			
7.01.05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			361.959.869,00		165.000.000,00	Kantor Camat Teluk Pandan	
		MENINGKATNYA WAWASAN KEBANGSAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN TELUK PANDAN	Presentase Masyarakat yang Memahami Wawasan Kebangsaan (%)	79		79			
7.01.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			331.296.063,00		50.000.000,00	Kantor Camat Teluk Pandan	
		MENINGKATNYA PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BAIK DI WILAYAH KECAMATAN TTELUK PANDAN	Presentase Desa yang menerapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (%)	73		73			

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		SKPD Penanggung jawab	Ket
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			3.384.563.951,00		3.381.632.001,00	Kantor Camat Rantau Pulung	
	MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEC. RANTAU PULUNG	Nilai SAKIP (Nilai)	70,50		70,50			
		Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	76		76			
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			409.229.940,00		59.560.000,00	Kantor Camat Rantau Pulung	
	MENINGKATNYA PEMBERIAN LAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI KECAMATAN RANTAU PULUNG	Persentase Masyarakat yang dilayani (%)	87		87			
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			404.285.282,00		399.718.000,00	Kantor Camat Rantau Pulung	
	MENINGKATNYA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI WILAYAH KECAMATAN RANTAU PULUNG	Presentase Usulan Masyarakat yang di akomodir (%)	85		85			
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			301.918.193,00		87.420.000,00	Kantor Camat Rantau Pulung	
	MENINGKATNYA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI WILAYAH KECAMATAN RANTAU PULUNG	Presentase Penegakan Peraturan Terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	81		81			
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			308.459.000,00		304.025.000,00	Kantor Camat Rantau Pulung	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja		Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		SKPD Penanggung jawab	Ket
		MENINGKATNYA WAWASAN KEBANGSAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN RANTAU PULUNG	Presentase Masyarakat yang Memahami Wawasan Kebangsaan (%)	75		75			
7.01.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			292.800.574,00		62.409.000,00	Kantor Camat Rantau Pulung	
		MENINGKATNYA PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BAIK DI WILAYAH KECAMATAN RANTAU PULUNG	Presentase Desa yang menerapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (%)	78		78			
7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			3.680.870.024,00		3.677.473.437,00	Kantor Camat Kaubun	
		MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEC. KAUBUN	Nilai SAKIP (Nilai)	70,50		70,50			
			Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	74		74			
7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			464.088.445,00		50.000.000,00	Kantor Camat Kaubun	
		MENINGKATNYA PEMBERIAN LAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI KECAMATAN KAUBUN	Persentase Masyarakat yang dilayani (%)	55		55			
7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			582.193.610,00		570.000.000,00	Kantor Camat Kaubun	
		MENINGKATNYA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI WILAYAH KECAMATAN KAUBUN	Presentase Usulan Masyarakat yang di akomodir (%)	77		77			

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		SKPD Penanggung jawab	Ket
7.01.04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		357.638.311,00		50.000.000,00	Kantor Camat Kaubun	
		MENINGKATNYA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI WILAYAH KECAMATAN KAUBUN	Presentase Penegakan Peraturan Terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	94		94		
7.01.05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		320.443.504,00		85.000.000,00	Kantor Camat Kaubun	
		MENINGKATNYA WAWASAN KEBANGSAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN KAUBUN	Persentase masyarakat yang memahami wawasan kebangsaan (%)	30		30		
7.01.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		313.304.844,00		70.000.000,00	Kantor Camat Kaubun	
		MENINGKATNYA PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BAIK DI WILAYAH KECAMATAN KAUBUN	Presentase Desa yang menerapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (%)	75		75		
7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		5.783.716.542,00		5.250.668.728,00	Kantor Camat Sangkulirang	
		MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEC. SANGKULIRANG	Nilai SAKIP (Nilai)	64,15		64,15		
			Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	73		73		
7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		429.384.264,00		16.830.000,00	Kantor Camat Sangkulirang	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja		Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		SKPD Penanggung jawab	Ket
		MENINGKATNYA PEMBERIAN LAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI KECAMATAN SANGKULIRANG	Persentase Masyarakat yang dilayani (%)	65		65			
7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			530.784.039,00		508.415.000,00	Kantor Camat Sangkulirang	
		MENINGKATNYA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI WILAYAH KECAMATAN SANGKULIRANG	Presentase Usulan Masyarakat yang di akomodir (%)	75		75			
7.01.04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			346.818.522,00		16.830.000,00	Kantor Camat Sangkulirang	
		MENINGKATNYA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI WILAYAH KECAMATAN SANGKULIRANG	Presentase Penegakan Peraturan Terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	100		100			
7.01.05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			392.811.512,00		33.415.000,00	Kantor Camat Sangkulirang	
		MENINGKATNYA WAWASAN KEBANGSAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN SANGKULIRANG	Presentase Masyarakat yang Memahami Wawasan Kebangsaan (%)	90		90			
7.01.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			349.709.321,00		50.490.000,00	Kantor Camat Sangkulirang	
		MENINGKATNYA PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BAIK DI WILAYAH KECAMATAN SANGKULIRANG	Presentase Desa yang menerapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (%)	73		73			

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		SKPD Penanggung jawab	Ket
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			8.191.728.612,00		8.039.659.565,00	Kantor Camat Muara Bengkal	
	MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEC. MUARA BENGKAL	Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	80		80			
		Nilai SAKIP (Nilai)	70,50		70,50			
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			404.945.045,00		21.130.000,00	Kantor Camat Muara Bengkal	
	MENINGKATNYA PEMBERIAN LAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI KECAMATAN MUARA BENGKAL	Persentase Masyarakat yang dilayani (%)	80		80			
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			541.362.655,00		553.973.000,00	Kantor Camat Muara Bengkal	
	MENINGKATNYA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI WILAYAH KECAMATAN MUARA BENGKAL	Presentase Usulan Masyarakat yang di akomodir (%)	73		73			
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			320.330.917,00		33.845.000,00	Kantor Camat Muara Bengkal	
	MENINGKATNYA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI WILAYAH KECAMATAN MUARA BENGKAL	Presentase Penegakan Peraturan Terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	100		100			
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			382.665.521,00		260.807.530,00	Kantor Camat Muara Bengkal	
	MENINGKATNYA WAWASAN KEBANGSAAN MASYARAKAT	Presentase Masyarakat yang	90		90			

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		SKPD Penanggung jawab	Ket
	DI KECAMATAN MUARA BENGKAL	Memahami Wawasan Kebangsaan (%)						
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			372.125.970,00		56.542.000,00	Kantor Camat Muara Bengkal	
	MENINGKATNYA PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BAIK DI WILAYAH KECAMATAN MUARA BENGKAL	Presentase Desa yang menerapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (%)	100		100			
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			5.978.828.050,00		5.323.140.956,00	Kantor Camat Long Mesangat	
	MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEC. LONG MESANGAT	Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	80		80			
		Nilai SAKIP (Nilai)	70,50		70,50			
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			405.524.327,00		80.000.000,00	Kantor Camat Long Mesangat	
	MENINGKATNYA PEMBERIAN LAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI KECAMATAN LONG MESANGAT	Persentase Masyarakat yang dilayani (%)	90		90			
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			331.151.002,00		210.000.000,00	Kantor Camat Long Mesangat	
	MENINGKATNYA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI WILAYAH KECAMATAN LONG MESANGAT	Presentase Usulan Masyarakat yang di akomodir (%)	98		98			
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			305.524.327,00		100.000.000,00	Kantor Camat Long Mesangat	

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja		Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		SKPD Penanggung jawab	Ket
		MENINGKATNYA KETENTRAN DAN KETERTIBAN UMUM DI WILAYAH KECAMATAN LONG MESANGAT	Presentase Penegakan Peraturan Terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	100		100			
7.01.05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			393.153.143,00		100.000.000,00	Kantor Camat Long Mesangat	
		MENINGKATNYA WAWASAN KEBANGSAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN LONG MESANGAT	Presentase Masyarakat yang Memahami Wawasan Kebangsaan (%)	85		85			
7.01.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			327.365.770,00		100.000.000,00	Kantor Camat Long Mesangat	
		MENINGKATNYA PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BAIK DI WILAYAH KECAMATAN LONG MESANGAT	Presentase Desa yang menerapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (%)	57		57			
7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			3.286.839.333,00		3.281.042.000,00	Kantor Camat Karangan	
		MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEC. KARANGAN	Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	76		76			
			Nilai SAKIP (Nilai)	70,50		70,50			
7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			459.140.745,00		50.000.000,00	Kantor Camat Karangan	
		MENINGKATNYA PEMBERIAN LAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI KECAMATAN KARANGAN	Persentase Masyarakat yang dilayani (%)	52		52			

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja		Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		SKPD Penanggung jawab	Ket
7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			360.864.621,00		330.480.000,00	Kantor Camat Karangan	
		MENINGKATNYA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI WILAYAH KECAMATAN KARANGAN	Presentase Usulan Masyarakat yang di akomodir (%)	82		82			
7.01.04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			313.795.210,00		50.000.000,00	Kantor Camat Karangan	
		MENINGKATNYA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI WILAYAH KECAMATAN KARANGAN	Presentase Penegakan Peraturan Terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	82		82			
7.01.05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			368.215.406,00		75.000.000,00	Kantor Camat Karangan	
		MENINGKATNYA WAWASAN KEBANGSAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN KARANGAN	Presentase Masyarakat yang Memahami Wawasan Kebangsaan (%)	65		65			
7.01.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			379.079.206,00		50.000.000,00	Kantor Camat Karangan	
		MENINGKATNYA PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BAIK DI WILAYAH KECAMATAN KARANGAN	Presentase Desa yang menerapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (%)	82		82			
7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			3.620.514.751,00		3.619.969.659,00	Kantor Camat Sandaran	
		MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEC. SANDARAN	Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	74		74			

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja		Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		SKPD Penanggung jawab	Ket
			Nilai SAKIP (Nilai)	70,50		70,50			
7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			409.311.196,00		15.000.000,00	Kantor Camat Sandaran	
		MENINGKATNYA PEMBERIAN LAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI KECAMATAN SANDARAN	Persentase Masyarakat yang dilayani (%)	49		49			
7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			375.303.735,00		575.000.000,00	Kantor Camat Sandaran	
		MENINGKATNYA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI WILAYAH KECAMATAN SANDARAN	Presentase Usulan Masyarakat yang di akomodir (%)	79		79			
7.01.04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			300.694.400,00		10.000.000,00	Kantor Camat Sandaran	
		MENINGKATNYA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI WILAYAH KECAMATAN SANDARAN	Presentase Penegakan Peraturan Terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	40		40			
7.01.05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			389.636.177,00		100.000.000,00	Kantor Camat Sandaran	
		MENINGKATNYA WAWASAN KEBANGSAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN SANDARAN	Presentase Masyarakat yang Memahami Wawasan Kebangsaan (%)	41		41			
7.01.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			287.060.437,00		50.000.000,00	Kantor Camat Sandaran	
		MENINGKATNYA PENERAPAN TATA KELOLA	Presentase Desa yang menerapkan	56		56			

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		SKPD Penanggung jawab	Ket
	PEMERINTAH YANG BAIK DI WILAYAH KECAMATAN SANDARAN	Tata Kelola Pemerintahan yang baik (%)						
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			21.669.672.599,00		16.430.890.113,00		
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			7.450.355.210,00		7.450.108.113,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	TERLAKSANANYA PENUNJANG PERANGKAT DAERAH	Nilai SAKIP (Nilai)	70,50		70,50			
		Indeks Profesionalisme ASN (Indeks)	80		80			
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN			5.665.734.337,00		5.000.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	MENINGKATNYA KESADARAN MSYARAKAT AKAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase sekolah dan Forum yang mendapatkan pembinaan penguatan ideologi Pancasila, Karakter Kebangsaan dan Bela Negara (%)	40,40		40,40			
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK			2.348.208.693,00		1.606.782.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	MENINGKATNYA ETIKA DAN BUDAYA POLITIK	Persentase pembinaan pendidikan politik di wilayah Kutai Timur (%)	28		28			

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja		Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		SKPD Penanggung jawab	Ket
8.01.04		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN			1.324.617.596,00		1.200.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		MENINGKATNYA KETERTIBAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (%)	30		30			
8.01.05		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA			1.878.424.889,00		-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		MENINGKATNYA KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT	Persentase ASN dan Forum yang mendapatkan Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial,Budaya dan Agama yang bersih dari narkoba (%)	27,00		27,00			
8.01.06		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL			3.002.331.874,00		1.174.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Jumlah Konflik Sosial (Angka)	0		0			
			Persentase penanganan konflik sosial (%)	100		100			

Secara umum, Tabel 4.7 menunjukkan bahwa keterkaitan antara RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026–2029 dengan Renja OPD/RKPD Tahun 2026 telah dapat ditelusuri melalui kesesuaian perangkat daerah, program, indikator, target, dan pagu indikatif. Sebagian besar program yang tercantum dalam Renja OPD Tahun 2026 memiliki hubungan substansial dengan arah program dalam RPJMD, meskipun terdapat penyesuaian nomenklatur perangkat daerah, penggabungan urusan, serta perubahan struktur kelembagaan pada beberapa OPD.

Perbedaan yang muncul pada sejumlah perangkat daerah perlu dipahami sebagai bagian dari penyesuaian teknokratik dalam penyusunan RKPD Tahun 2026. Beberapa program memiliki padanan langsung dengan RPJMD, sedangkan sebagian lainnya belum memiliki keterhubungan eksplisit pada kolom target atau pagu RPJMD.

Tabel ini juga memberikan dasar bagi penajaman evaluasi pada tahap berikutnya, terutama dalam menilai kesesuaian antara prioritas pembangunan daerah, program perangkat daerah, indikator kinerja, target tahunan, dan dukungan pendanaan. Program yang sudah memiliki kesesuaian dapat dipertahankan sebagai bentuk konsistensi perencanaan, sementara program yang belum sepenuhnya memiliki padanan RPJMD perlu diberi penjelasan teknis dalam narasi evaluasi. Langkah ini penting agar dokumen Evaluasi RKPD Tahun 2026 memiliki dasar analisis yang akuntabel, terukur, dan dapat digunakan sebagai masukan bagi penyusunan RKPD tahun berikutnya.

BAB 5

PENGENDALIAN PELAKSANAAN RKPD TERHADAP APBD

Bab ini menguraikan tingkat kesesuaian antara Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026 dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Pengendalian ini dilakukan untuk menilai sejauh mana program pembangunan daerah yang telah direncanakan dalam RKPD memperoleh dukungan penganggaran dalam APBD, sehingga dapat dilaksanakan secara efektif untuk mencapai sasaran pembangunan tahunan daerah.

Kesesuaian antara RKPD dan APBD merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan pembangunan daerah karena menunjukkan keterhubungan antara proses perencanaan dan proses penganggaran. RKPD memuat arah kebijakan, prioritas pembangunan, program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, target, dan kebutuhan pendanaan tahunan daerah. Sementara itu, APBD menjadi instrumen fiskal yang menentukan apakah keseluruhan rencana tersebut dapat diimplementasikan sesuai prioritas yang telah ditetapkan. Tingkat konsistensi antara kedua dokumen tersebut mencerminkan kualitas tata kelola pembangunan daerah secara lebih operasional.

Pengendalian pelaksanaan RKPD terhadap APBD pada bab ini dilakukan melalui penilaian terhadap enam aspek utama, yaitu konsistensi program, konsistensi kegiatan, konsistensi subkegiatan, konsistensi indikator kinerja, konsistensi target kinerja, dan konsistensi pagu anggaran. Melalui pendekatan tersebut, evaluasi tidak hanya melihat ada atau tidaknya dukungan anggaran, tetapi juga menilai ketepatan penerjemahan rencana ke dalam struktur pelaksanaan pembangunan daerah.

Analisis dalam bab ini juga perlu dipahami dalam konteks dinamika pelaksanaan pembangunan tahun berjalan. Dalam praktiknya, proses penganggaran dapat mengalami penyesuaian sebagai akibat perubahan kapasitas fiskal daerah, penajaman prioritas pembangunan, kebijakan efisiensi belanja, maupun kebutuhan penyesuaian terhadap kondisi aktual yang berkembang. Adanya perbedaan antara RKPD dan APBD tidak selalu menunjukkan kelemahan dalam perencanaan, tetapi dapat pula mencerminkan proses adaptasi kebijakan agar pelaksanaan pembangunan tetap berjalan sesuai kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan prioritas yang berkembang.

Dengan demikian, Bab V disusun untuk memberikan gambaran yang sistematis mengenai tingkat sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran daerah Tahun 2026. Hasil evaluasi ini diharapkan dapat menunjukkan bagian-bagian yang telah selaras, sekaligus mengidentifikasi aspek-aspek yang masih memerlukan penyempurnaan, sehingga dapat menjadi dasar perbaikan dalam penguatan integrasi antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran pada periode berikutnya.

5.1 Konsistensi Program antara RKPD dengan APBD

Konsistensi program antara RKPD dengan APBD merupakan salah satu ukuran awal untuk menilai keterpaduan antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran daerah. Pada level ini, evaluasi diarahkan untuk melihat apakah seluruh program yang telah dirumuskan dalam RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026 telah terakomodasi dalam APBD Tahun Anggaran 2026.

Penilaian ini penting karena program merupakan bentuk operasional dari kebijakan pembangunan tahunan yang menjadi wadah bagi pelaksanaan kegiatan dan subkegiatan perangkat daerah.

Tingkat konsistensi program menunjukkan sejauh mana prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RKPD dapat diterjemahkan secara utuh ke dalam kebijakan penganggaran. Semakin tinggi tingkat kesesuaian antara jumlah dan struktur program pada RKPD dan APBD, maka semakin kuat pula indikasi bahwa proses perencanaan dan penganggaran telah berjalan secara selaras. Sebaliknya, apabila terdapat perbedaan jumlah atau struktur program, maka hal tersebut perlu dicermati lebih lanjut karena dapat memengaruhi kesinambungan pelaksanaan prioritas pembangunan daerah.

Dalam pelaksanaannya, perbedaan antara RKPD dan APBD pada level program dapat terjadi karena beberapa faktor, antara lain penyesuaian terhadap kapasitas fiskal daerah, perubahan kebijakan pada tahun berjalan, penyelarasan nomenklatur, maupun penajaman prioritas pembangunan. Oleh sebab itu, analisis konsistensi program pada subbab ini tidak hanya dimaksudkan untuk menghitung tingkat kesesuaian secara kuantitatif, tetapi juga untuk memberikan gambaran mengenai kualitas sinkronisasi antara arah kebijakan pembangunan dengan dukungan anggaran yang tersedia.

Berdasarkan hal tersebut, pembahasan pada subbab ini disajikan menurut perangkat daerah untuk menunjukkan tingkat konsistensi program RKPD dengan APBD secara lebih rinci. Penyajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai perangkat daerah yang telah memiliki tingkat konsistensi tinggi, sekaligus perangkat daerah yang masih memerlukan penguatan dalam integrasi antara perencanaan dan penganggaran.

Tabel 5.1 Konsistensi Program RKPD dengan APBD Tahun Anggaran 2026

No	Perangkat Daerah	Program RKPD	Program APBD	Konsistensi Program RKPD-APBD	Inkonsistensi Program RKPD-APBD
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	9	9	9	0
2	Dinas Kesehatan	5	5	5	0
3	RSUD Kudungga Sangatta	2	2	2	0
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	12	12	12	0
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	6	6	6	0
6	Satuan Polisi Pamong Praja	2	2	2	0
7	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	2	2	2	0

No	Perangkat Daerah	Program RKPD	Program APBD	Konsistensi Program RKPD-APBD	Inkonsistensi Program RKPD-APBD
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2	2	2	0
9	Dinas Sosial	6	6	6	0
10	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	7	7	7	0
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7	7	7	0
12	Dinas Ketahanan Pangan	5	5	5	0
13	Dinas Pertanahan	5	5	5	0
14	Dinas Lingkungan Hidup	11	11	11	0
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5	5	5	0
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5	5	5	0
17	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4	4	4	0
18	Dinas Perhubungan	3	3	3	0
19	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	5	5	5	0
20	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	7	7	7	0
21	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	6	6	6	0
22	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	4	4	4	0
23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5	5	5	0
24	Dinas Perikanan	5	5	5	0
25	Dinas Pariwisata	5	5	5	0

No	Perangkat Daerah	Program RKPD	Program APBD	Konsistensi Program RKPD-APBD	Inkonsistensi Program RKPD-APBD
26	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	5	5	5	0
27	Dinas Perkebunan	6	6	6	0
28	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	10	10	10	0
29	Sekretariat Daerah	3	3	3	0
30	Sekretariat DPRD	2	2	2	0
31	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3	3	3	0
32	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3	3	3	0
33	Badan Pendapatan Daerah	2	2	2	0
34	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3	3	3	0
35	Badan Riset dan Inovasi Daerah	1	1	1	0
36	Inspektorat	3	3	3	0
37	Kantor Camat Sangatta Selatan	6	6	6	0
38	Kantor Camat Sangatta Utara	7	7	7	0
39	Kantor Camat Bengalon	6	6	6	0
40	Kantor Camat Kaliorang	6	6	6	0
41	Kantor Camat Muara Wahau	6	6	6	0
42	Kantor Camat Kombeng	6	6	6	0
43	Kantor Camat Muara Ancalong	6	6	6	0
44	Kantor Camat Batu Ampar	6	6	6	0
45	Kantor Camat Telen	6	6	6	0

No	Perangkat Daerah	Program RKPD	Program APBD	Konsistensi Program RKPD-APBD	Inkonsistensi Program RKPD-APBD
46	Kantor Camat Busang	6	6	6	0
47	Kantor Camat Teluk Pandan	6	6	6	0
48	Kantor Camat Rantau Pulung	6	6	6	0
49	Kantor Camat Kaubun	6	6	6	0
50	Kantor Camat Sangkulirang	6	6	6	0
51	Kantor Camat Muara Bengkal	6	6	6	0
52	Kantor Camat Long Mesangat	6	6	6	0
53	Kantor Camat Karangan	6	6	6	0
54	Kantor Camat Sandaran	6	6	6	0
55	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6	6	6	0
	TOTAL	291	291	291	0

Berdasarkan Tabel 5.1, konsistensi program antara RKPD dengan APBD Tahun Anggaran 2026 menunjukkan tingkat keselarasan yang sangat baik. Hal ini terlihat dari kesesuaian jumlah program RKPD dan program APBD pada seluruh perangkat daerah, sehingga pada level program tidak ditemukan adanya inkonsistensi. Arah kebijakan pembangunan daerah yang telah dirumuskan dalam RKPD mampu diterjemahkan secara utuh ke dalam struktur penganggaran tahunan. Dengan demikian, pada tataran program, keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran daerah telah terbentuk secara kuat. Namun demikian, konsistensi pada level program tetap perlu dibaca secara berjenjang bersama hasil evaluasi pada level kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, target, dan pagu anggaran, karena kualitas sinkronisasi pembangunan daerah pada akhirnya ditentukan oleh keterhubungan seluruh komponen tersebut secara menyeluruh.

5.2 Konsistensi Kegiatan antara RKPD dengan APBD

Konsistensi kegiatan antara RKPD dengan APBD merupakan indikator penting untuk menilai apakah program yang telah direncanakan benar-benar diterjemahkan ke dalam tindakan operasional perangkat daerah. Pada level ini, evaluasi diarahkan untuk melihat kesesuaian jumlah kegiatan antara dokumen RKPD dan APBD, karena kegiatan menjadi jembatan utama antara program pembangunan dengan pelaksanaan teknis di lapangan. Tingginya konsistensi kegiatan menunjukkan bahwa proses penganggaran telah mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan secara lebih konkret, sedangkan inkonsistensi kegiatan dapat mengindikasikan

adanya penyesuaian struktur pelaksanaan, perubahan prioritas, atau pengaruh kapasitas fiskal daerah dalam tahun berjalan.

Tabel 5.2 Konsistensi Kegiatan RKPD dengan APBD Tahun Anggaran 2026

No	Perangkat Daerah	Kegiatan RKPD/Renja	Kegiatan APBD	Konsistensi Kegiatan RKPD/Renja-APBD	Inkonsistensi Kegiatan RKPD/Renja-APBD
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	23	23	23	0
2	Dinas Kesehatan	20	20	20	0
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	26	26	26	0
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	16	16	16	0
5	Satuan Polisi Pamong Praja	11	11	11	0
6	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	11	11	11	0
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	11	11	11	0
8	Dinas Sosial	15	15	15	0
9	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	20	20	20	0
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	22	22	22	0
11	Dinas Ketahanan Pangan	16	16	16	0
12	Dinas Pertanahan	12	12	12	0
13	Dinas Lingkungan Hidup	16	16	16	0
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	18	18	18	0

No	Perangkat Daerah	Kegiatan RKPD/Renja	Kegiatan APBD	Konsistensi Kegiatan RKPD/Renja- APBD	Inkonsistensi Kegiatan RKPD/Renja- APBD
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	10	10	10	0
16	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	15	15	15	0
17	Dinas Perhubungan	17	17	17	0
18	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	12	12	12	0
19	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	13	13	13	0
20	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	14	14	14	0
21	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	15	15	15	0
22	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	18	18	18	0
23	Dinas Perikanan	19	19	19	0
24	Dinas Pariwisata	15	15	15	0
25	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	19	19	19	0
26	Dinas Perkebunan	14	14	14	0
27	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	18	18	18	0
28	Sekretariat Daerah	20	20	20	0
29	Sekretariat DPRD	18	18	18	0
30	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	15	15	15	0

No	Perangkat Daerah	Kegiatan RKPD/Renja	Kegiatan APBD	Konsistensi Kegiatan RKPD/Renja- APBD	Inkonsistensi Kegiatan RKPD/Renja- APBD
31	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	12	12	12	0
32	Badan Pendapatan Daerah	9	9	9	0
33	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	14	14	14	0
34	Badan Riset dan Inovasi Daerah	7	7	7	0
35	Inspektorat	12	12	12	0
36	Kantor Camat Sangatta Selatan	17	17	17	0
37	Kantor Camat Sangatta Utara	18	18	18	0
38	Kantor Camat Bengalon	16	16	16	0
39	Kantor Camat Kaliorang	17	17	17	0
40	Kantor Camat Muara Wahau	17	17	17	0
41	Kantor Camat Kombeng	18	18	18	0
42	Kantor Camat Muara Ancalong	16	16	16	0
43	Kantor Camat Batu Ampar	17	17	17	0
44	Kantor Camat Telen	19	19	19	0
45	Kantor Camat Busang	18	18	18	0
46	Kantor Camat Teluk Pandan	17	17	17	0
47	Kantor Camat Rantau Pulung	18	18	18	0

No	Perangkat Daerah	Kegiatan RKPD/Renja	Kegiatan APBD	Konsistensi Kegiatan RKPD/Renja- APBD	Inkonsistensi Kegiatan RKPD/Renja- APBD
48	Kantor Camat Kaubun	18	18	18	0
49	Kantor Camat Sangkulirang	17	17	17	0
50	Kantor Camat Muara Bengkal	17	17	17	0
51	Kantor Camat Long Mesangat	17	17	17	0
52	Kantor Camat Karangan	18	18	18	0
53	Kantor Camat Sandaran	17	17	17	0
54	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	13	13	13	0
	TOTAL	868	868	868	0

Sumber: Diolah dari Tabel 2.2 Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam Renja dan APBD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026 pada dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026.

Berdasarkan hasil analisis konsistensi antara dokumen RKPD/Renja Perangkat Daerah dengan APBD, dapat diketahui bahwa seluruh **54 Perangkat Daerah** telah menunjukkan tingkat konsistensi yang sangat baik pada level **kegiatan**. Dari total **868 kegiatan** yang direncanakan dalam RKPD/Renja, seluruhnya telah terakomodasi dalam APBD dengan jumlah yang sama, yaitu **868 kegiatan**. Dengan demikian, terdapat **868 kegiatan yang konsisten** atau mencapai **100% tingkat konsistensi**, serta **tidak terdapat kegiatan yang mengalami inkonsistensi (0 kegiatan)**.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa proses penyusunan APBD telah mengacu secara penuh pada dokumen perencanaan tahunan yang telah ditetapkan dalam RKPD dan Renja Perangkat Daerah. Keselarasan ini mencerminkan bahwa mekanisme perencanaan dan penganggaran di Pemerintah Kabupaten Kutai Timur telah berjalan dengan baik, sehingga tidak terdapat penambahan maupun pengurangan kegiatan pada saat penyusunan APBD yang berpotensi mengganggu pencapaian target pembangunan daerah.

Tingkat konsistensi sebesar **100%** pada level kegiatan juga mengindikasikan adanya sinergi yang kuat antara tahapan perencanaan dan penganggaran, serta kepatuhan Perangkat Daerah terhadap prinsip *money follows program* dan *planning follows budgeting*. Kondisi ini menjadi modal yang positif dalam mendukung efektivitas pelaksanaan program pembangunan, mempermudah proses pengendalian dan evaluasi, serta meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah karena seluruh kegiatan yang dilaksanakan telah direncanakan sebelumnya dalam dokumen perencanaan resmi.

5.3 Konsistensi Subkegiatan antara RKPD dengan APBD

Konsistensi subkegiatan antara RKPD dengan APBD merupakan tahapan evaluasi yang lebih rinci untuk melihat tingkat kesesuaian antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran pada level pelaksanaan teknis. Pada level ini, evaluasi tidak lagi berhenti pada program dan kegiatan, tetapi menilai apakah rincian subkegiatan yang menjadi unit operasional pelaksanaan pembangunan telah terakomodasi secara selaras dalam APBD. Analisis pada subbab ini menjadi penting karena pada level subkegiatan biasanya mulai tampak penyesuaian yang lebih detail, baik dalam bentuk penambahan, pengurangan, maupun pergeseran struktur belanja pelaksanaan.

Tabel 5.3 Konsistensi Sub Kegiatan RKPD dengan APBD

No	Perangkat Daerah	Sub Kegiatan RKPD/Renja	Sub Kegiatan APBD	Konsistensi Sub Kegiatan RKPD/Renja–APBD	Inkonsistensi Sub Kegiatan RKPD/Renja–APBD
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	115	119	115	4
2	Dinas Kesehatan	87	89	87	2
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	111	112	111	1
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	41	41	41	0
5	Satuan Polisi Pamong Praja	39	39	39	0
6	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	35	35	35	0
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	31	31	31	0
8	Dinas Sosial	46	46	46	0
9	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	52	52	52	0
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	47	48	47	1

No	Perangkat Daerah	Sub Kegiatan RKPD/Renja	Sub Kegiatan APBD	Konsistensi Sub Kegiatan RKPD/Renja-APBD	Inkonsistensi Sub Kegiatan RKPD/Renja-APBD
11	Dinas Ketahanan Pangan	47	47	47	0
12	Dinas Pertanahan	22	22	22	0
13	Dinas Lingkungan Hidup	36	36	36	0
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	39	39	39	0
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	30	30	30	0
16	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	40	40	40	0
17	Dinas Perhubungan	44	44	44	0
18	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	43	43	43	0
19	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	32	32	32	0
20	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	36	37	36	1
21	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	39	39	39	0
22	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	49	49	49	0
23	Dinas Perikanan	40	40	40	0
24	Dinas Pariwisata	51	51	51	0
25	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	47	49	47	2

No	Perangkat Daerah	Sub Kegiatan RKPD/Renja	Sub Kegiatan APBD	Konsistensi Sub Kegiatan RKPD/Renja-APBD	Inkonsistensi Sub Kegiatan RKPD/Renja-APBD
26	Dinas Perkebunan	31	31	31	0
27	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	45	46	45	1
28	Sekretariat Daerah	73	72	72	1
29	Sekretariat DPRD	72	72	72	0
30	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	57	57	57	0
31	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	60	60	60	0
32	Badan Pendapatan Daerah	38	38	38	0
33	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	52	52	52	2
34	Badan Riset dan Inovasi Daerah	20	20	20	0
35	Inspektorat	46	46	46	0
36	Kantor Camat Sangatta Selatan	44	44	44	0
37	Kantor Camat Sangatta Utara	42	41	41	1
38	Kantor Camat Bengalon	34	34	34	0
39	Kantor Camat Kaliorang	40	41	40	1
40	Kantor Camat Muara Wahau	39	39	39	0
41	Kantor Camat Kombeng	41	41	41	0
42	Kantor Camat Muara Ancalong	49	49	49	0

No	Perangkat Daerah	Sub Kegiatan RKPD/Renja	Sub Kegiatan APBD	Konsistensi Sub Kegiatan RKPD/Renja-APBD	Inkonsistensi Sub Kegiatan RKPD/Renja-APBD
43	Kantor Camat Batu Ampar	42	42	42	1
44	Kantor Camat Telen	39	39	39	0
45	Kantor Camat Busang	47	47	47	0
46	Kantor Camat Teluk Pandan	41	41	41	0
47	Kantor Camat Rantau Pulung	36	36	36	0
48	Kantor Camat Kaubun	43	43	43	0
49	Kantor Camat Sangkulirang	48	47	47	1
50	Kantor Camat Muara Bengkal	35	35	35	0
51	Kantor Camat Long Mesangat	37	37	37	0
52	Kantor Camat Karangan	42	42	42	0
53	Kantor Camat Sandaran	39	39	39	0
54	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	47	46	46	1
	TOTAL	2.478	2.487	2.474	20

5.4 Konsistensi Target Kinerja antara RKPD dengan APBD

Konsistensi target kinerja antara RKPD dengan APBD merupakan aspek penting dalam menilai kualitas keterhubungan antara perencanaan dan penganggaran daerah. Pada level ini, evaluasi diarahkan untuk melihat apakah besaran target yang telah ditetapkan dalam RKPD tetap dipertahankan secara selaras dalam APBD sebagai dasar pelaksanaan dan pengendalian pembangunan tahunan. Target kinerja memiliki posisi yang sangat strategis karena menjadi tolok ukur kuantitatif atas keberhasilan program dan kegiatan perangkat daerah. Oleh sebab itu, kesesuaian target antara kedua dokumen tersebut sangat menentukan kejelasan arah pelaksanaan pembangunan, keterukuran hasil, dan objektivitas evaluasi kinerja daerah.

Berbeda dengan konsistensi indikator kinerja yang menitikberatkan pada kesamaan rumusan ukuran keberhasilan, konsistensi target kinerja lebih berfokus pada besaran capaian yang hendak diwujudkan. Dengan demikian, meskipun indikator yang digunakan dapat tetap sama, perbedaan target antara RKPD dan APBD tetap dapat menimbulkan implikasi yang signifikan terhadap orientasi pelaksanaan, kebutuhan sumber daya, serta tingkat ambisi pembangunan daerah pada tahun berjalan. Apabila target yang tercantum dalam APBD lebih rendah atau lebih tinggi dibandingkan dengan target dalam RKPD, maka hal tersebut dapat memengaruhi keterbandingan capaian, konsistensi pelaksanaan program, dan validitas penilaian terhadap keberhasilan pembangunan daerah.

Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah, perubahan target kinerja dapat terjadi karena berbagai faktor, antara lain penyesuaian terhadap kapasitas fiskal, perubahan prioritas pembangunan, dinamika kebutuhan pelayanan publik, hasil evaluasi pelaksanaan periode sebelumnya, maupun penajaman kebijakan teknis pada saat penganggaran. Penilaian terhadap konsistensi target kinerja dalam subbab ini tidak hanya dimaksudkan untuk mengidentifikasi adanya perbedaan angka target, tetapi juga untuk melihat apakah perubahan tersebut masih berada dalam kerangka kebijakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara teknokratik. Dengan kata lain, evaluasi pada level target kinerja diperlukan untuk memastikan bahwa proses penganggaran tidak mengubah orientasi capaian pembangunan secara substantif tanpa dasar yang memadai.

Konsistensi target kinerja juga berkaitan erat dengan efektivitas pengendalian pembangunan daerah. Target yang dirumuskan secara selaras antara RKPD dan APBD akan memudahkan perangkat daerah dalam menyusun rencana pelaksanaan, menetapkan strategi pencapaian, mengalokasikan sumber daya, serta melakukan monitoring dan evaluasi secara lebih terukur. Sebaliknya, ketidaksesuaian target dapat menimbulkan persoalan dalam penafsiran capaian, penyusunan laporan kinerja, dan penilaian efektivitas program. Oleh sebab itu, evaluasi terhadap target kinerja menjadi bagian penting untuk melihat sejauh mana integrasi antara perencanaan dan penganggaran benar-benar terjaga sampai pada tataran hasil yang hendak dicapai.

Pada beberapa perangkat daerah, dinamika pelaksanaan menunjukkan bahwa pencapaian target dipengaruhi oleh faktor yang bersifat teknis maupun kelembagaan, seperti koordinasi lintas perangkat daerah, ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan, dukungan data, kesiapan sumber daya manusia, serta efektivitas pengelolaan anggaran. Dalam dokumen rekonsiliasi capaian kinerja perangkat daerah yang tersedia, misalnya, terdapat gambaran bahwa pencapaian target tidak hanya dipengaruhi oleh besarnya alokasi anggaran, tetapi juga oleh kualitas koordinasi, dukungan administrasi, dan kelancaran pelaksanaan program pada masing-masing urusan. Evaluasi target kinerja perlu dibaca tidak hanya sebagai perbandingan angka, tetapi juga sebagai refleksi atas kualitas implementasi pembangunan daerah secara lebih menyeluruh.

Dengan demikian, subbab ini disusun untuk memberikan gambaran mengenai tingkat kesesuaian target kinerja antara RKPD dan APBD Tahun Anggaran 2026 pada masing-masing perangkat daerah. Hasil evaluasi pada bagian ini diharapkan dapat menunjukkan perangkat daerah yang telah mempertahankan keselarasan target kinerja secara baik, sekaligus mengidentifikasi bagian-bagian yang masih memerlukan penyempurnaan agar hubungan antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan daerah dapat berlangsung secara lebih konsisten, terukur, dan akuntabel.

Tabel 5.4 Konsistensi Target Kinerja RKPD dengan APBD Tahun Anggaran 2026

No	Perangkat Daerah	Konsistensi Target Kinerja	Kategori
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	100%	Sangat Tinggi
2	Dinas Kesehatan	100%	Sangat Tinggi
3	RSUD Kudungga Sangatta	100%	Sangat Tinggi
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	100%	Sangat Tinggi
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	100%	Sangat Tinggi
6	Satuan Polisi Pamong Praja	100%	Sangat Tinggi
7	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	100%	Sangat Tinggi
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	100%	Sangat Tinggi
9	Dinas Sosial	100%	Sangat Tinggi
10	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	100%	Sangat Tinggi
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	100%	Sangat Tinggi
12	Dinas Ketahanan Pangan	100%	Sangat Tinggi
13	Dinas Pertanahan	100%	Sangat Tinggi
14	Dinas Lingkungan Hidup	100%	Sangat Tinggi
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100%	Sangat Tinggi
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	100%	Sangat Tinggi
17	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	100%	Sangat Tinggi
18	Dinas Perhubungan	100%	Sangat Tinggi
19	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	100%	Sangat Tinggi
20	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	100%	Sangat Tinggi
21	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	100%	Sangat Tinggi
22	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	100%	Sangat Tinggi
23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	100%	Sangat Tinggi
24	Dinas Perikanan	100%	Sangat Tinggi
25	Dinas Pariwisata	100%	Sangat Tinggi

No	Perangkat Daerah	Konsistensi Target Kinerja	Kategori
26	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	100%	Sangat Tinggi
27	Dinas Perkebunan	100%	Sangat Tinggi
28	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	100%	Sangat Tinggi
29	Sekretariat Daerah	100%	Sangat Tinggi
30	Sekretariat DPRD	100%	Sangat Tinggi
31	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	Sangat Tinggi
32	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	100%	Sangat Tinggi
33	Badan Pendapatan Daerah	100%	Sangat Tinggi
34	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	100%	Sangat Tinggi
35	Badan Riset dan Inovasi Daerah	100%	Sangat Tinggi
36	Inspektorat	100%	Sangat Tinggi
37	Kantor Camat Sangatta Selatan	100%	Sangat Tinggi
38	Kantor Camat Sangatta Utara	100%	Sangat Tinggi
39	Kantor Camat Bengalon	100%	Sangat Tinggi
40	Kantor Camat Kaliorang	100%	Sangat Tinggi
41	Kantor Camat Muara Wahau	100%	Sangat Tinggi
42	Kantor Camat Kombeng	100%	Sangat Tinggi
43	Kantor Camat Muara Ancalong	100%	Sangat Tinggi
44	Kantor Camat Batu Ampar	100%	Sangat Tinggi
45	Kantor Camat Telen	100%	Sangat Tinggi
46	Kantor Camat Busang	100%	Sangat Tinggi
47	Kantor Camat Teluk Pandan	100%	Sangat Tinggi
48	Kantor Camat Rantau Pulung	100%	Sangat Tinggi
49	Kantor Camat Kaubun	100%	Sangat Tinggi
50	Kantor Camat Sangkulirang	100%	Sangat Tinggi
51	Kantor Camat Muara Bengkal	100%	Sangat Tinggi
52	Kantor Camat Long Mesangat	100%	Sangat Tinggi
53	Kantor Camat Karang	100%	Sangat Tinggi
54	Kantor Camat Sandaran	100%	Sangat Tinggi

No	Perangkat Daerah	Konsistensi Target Kinerja	Kategori
55	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	100%	Sangat Tinggi

Berdasarkan Tabel 5.5, konsistensi target kinerja antara RKPD dengan APBD Tahun Anggaran 2026 pada prinsipnya menjadi cerminan penting dari keselarasan orientasi hasil pembangunan daerah. Kesesuaian target kinerja menunjukkan bahwa proses penganggaran tidak hanya menjaga keberlanjutan struktur program dan kegiatan, tetapi juga mempertahankan arah capaian yang hendak diwujudkan oleh perangkat daerah. Sebaliknya, apabila terdapat perbedaan target, maka kondisi tersebut perlu dicermati secara seksama karena dapat berpengaruh terhadap tingkat ambisi pelaksanaan, kebutuhan sumber daya, serta keterukuran keberhasilan pembangunan daerah. Evaluasi pada subbab ini menegaskan bahwa target kinerja harus ditempatkan sebagai unsur strategis dalam menjaga hubungan yang utuh antara dokumen perencanaan, dokumen penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan, sehingga hasil pembangunan daerah dapat diukur secara lebih konsisten, objektif, dan akuntabel.

5.5 Konsistensi Pagu Anggaran antara RKPD dengan APBD

Konsistensi pagu anggaran antara RKPD dengan APBD Tahun Anggaran 2026 merupakan salah satu aspek penting dalam menilai keterpaduan antara proses perencanaan dan penganggaran daerah. Dalam kerangka pembangunan daerah, RKPD berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan yang memuat prioritas pembangunan, program, kegiatan, target kinerja, dan indikasi pendanaan. Sementara itu, APBD merupakan instrumen penganggaran yang menerjemahkan prioritas tersebut ke dalam alokasi fiskal yang bersifat operasional. Tingkat kesesuaian pagu anggaran antara kedua dokumen tersebut menjadi indikator penting untuk melihat apakah arah kebijakan pembangunan yang telah dirumuskan benar-benar memperoleh dukungan pendanaan yang memadai pada tahap penganggaran.

Dalam subbab ini, konsistensi pagu anggaran dianalisis dengan membandingkan besaran anggaran pada sisi RKPD dengan besaran anggaran pada sisi APBD untuk masing-masing perangkat daerah. Untuk menjaga kesesuaian sumber data, pagu pada sisi RKPD dibaca dari komponen **Pagu Renja**, sedangkan pagu pada sisi APBD dibaca dari komponen **Pagu APBD** sebagaimana termuat dalam Berita Acara Rekonsiliasi Capaian Kinerja Tahun Anggaran 2026 pada perangkat daerah yang datanya tersedia. Pendekatan ini digunakan agar perbandingan dilakukan pada level yang sejenis, yakni sama-sama berada pada tingkat perangkat daerah dan sama-sama merepresentasikan hubungan antara rencana anggaran tahunan dengan alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD.

Hasil perbandingan menunjukkan bahwa pada beberapa perangkat daerah terdapat kondisi pagu RKPD dan pagu APBD yang sama, sehingga dapat dikatakan bahwa proses penganggaran berjalan selaras dengan rencana tahunan yang telah ditetapkan. Kondisi ini antara lain terlihat pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan Dinas Pertanahan, di mana nilai Pagu Renja dan Pagu APBD tercatat identik. Di sisi lain, terdapat pula perangkat daerah yang menunjukkan perbedaan cukup besar antara pagu RKPD dan pagu APBD, baik dalam bentuk peningkatan maupun penurunan. Perbedaan tersebut mengindikasikan adanya penyesuaian anggaran pada tahap penganggaran, yang dapat

dipengaruhi oleh dinamika fiskal daerah, prioritas belanja, hasil pembahasan anggaran, maupun penyesuaian kebijakan selama proses penetapan APBD.

Dengan demikian, analisis pada subbab ini tidak hanya dimaksudkan untuk mengidentifikasi kesamaan atau perbedaan angka anggaran secara administratif, tetapi juga untuk memberikan gambaran mengenai tingkat keterhubungan antara perencanaan dan penganggaran daerah. Semakin kecil selisih antara pagu RKPD dan pagu APBD, maka semakin kuat indikasi bahwa dokumen perencanaan tahunan telah menjadi dasar yang efektif dalam proses pengalokasian anggaran. Sebaliknya, semakin besar selisih yang terjadi, maka semakin diperlukan penelaahan lebih lanjut untuk memahami faktor-faktor yang menyebabkan perubahan tersebut. Tabel konsistensi pagu anggaran berikut menjadi penting sebagai dasar evaluasi terhadap kualitas sinkronisasi antara RKPD dan APBD Tahun Anggaran 2026.

Tabel 5.5 Konsistensi Pagu Anggaran RKPD dengan APBD Tahun Anggaran 2026

No.	Perangkat Daerah	RKPD 2026	APBD 2026	Selisih
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	27.416.891.232,00	27.416.891.232,00	-
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	16.430.890.113,00	18.930.890.113,00	- 2.500.000.000,00
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	14.580.216.255,00	15.280.216.255,00	- 700.000.000,00
4	Badan Pendapatan Daerah	44.391.933.619,00	46.891.933.619,00	- 2.500.000.000,00
5	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1.045.986.611.806,00	1.131.528.020.030,00	- 85.541.408.224,00
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	21.871.519.774,00	21.871.519.774,00	-
7	Badan Riset dan Inovasi Daerah	7.314.532.199,00	7.314.532.199,00	-
8	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	39.495.180.065,00	81.045.680.065,00	- 41.550.500.000,00
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	13.705.738.695,00	15.705.738.695,00	- 2.000.000.000,00
10	Dinas Kesehatan	524.180.305.563,00	529.302.776.942,00	- 5.122.471.379,00
11	Dinas Ketahanan Pangan	10.422.057.359,00	10.422.057.359,00	-
12	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	78.600.873.522,00	69.844.413.372,00	8.756.460.150,00
13	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	15.456.023.335,00	15.456.023.335,00	-
14	Dinas Lingkungan Hidup	48.902.425.216,00	40.652.425.216,00	8.250.000.000,00
15	Dinas Pariwisata	18.374.157.576,00	20.574.157.576,00	- 2.200.000.000,00

No.	Perangkat Daerah	RKPD 2026	APBD 2026	Selisih
16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	693.338.153.751,00	874.224.772.399,00	- 180.886.618.648,00
17	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	29.113.108.133,00	29.113.108.133,00	-
18	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	19.877.481.243,00	19.877.481.243,00	-
19	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	11.490.930.423,00	12.390.930.423,00	- 900.000.000,00
20	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	13.971.126.923,00	15.471.126.923,00	- 1.500.000.000,00
21	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.073.036.291.636,00	1.064.263.987.486,00	8.772.304.150,00
22	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	22.769.468.145,00	22.769.468.145,00	-
23	Dinas Perhubungan	82.776.914.278,00	73.414.156.880,00	9.362.757.398,00
24	Dinas Perikanan	20.550.866.301,00	19.550.866.301,00	1.000.000.000,00
25	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	23.877.291.678,00	26.926.408.678,00	- 3.049.117.000,00
26	Dinas Perkebunan	14.947.384.357,00	19.836.163.357,00	- 4.888.779.000,00
27	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	27.153.943.936,00	27.353.943.936,00	- 200.000.000,00
28	Dinas Pertanahan	20.474.292.352,00	15.474.292.352,00	5.000.000.000,00
29	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	151.521.980.288,00	653.860.675.088,00	- 502.338.694.800,00
30	Dinas Sosial	13.387.475.620,00	14.387.475.620,00	- 1.000.000.000,00
31	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	96.759.309.387,00	104.370.523.886,00	- 7.611.214.499,00
32	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	45.952.163.076,00	46.552.163.076,00	- 600.000.000,00
33	Inspektorat	40.288.303.647,00	43.488.303.647,00	- 3.200.000.000,00
34	Kantor Camat Batu Ampar	4.925.881.735,00	4.925.881.735,00	-
35	Kantor Camat Bengalon	7.745.904.764,00	7.745.904.764,00	-
36	Kantor Camat Busang	4.701.256.689,00	4.701.256.689,00	-
37	Kantor Camat Kaliorang	5.055.109.044,00	5.055.109.044,00	-
38	Kantor Camat Karang	3.836.522.000,00	3.836.522.000,00	-

No.	Perangkat Daerah	RKPD 2026	APBD 2026	Selisih
39	Kantor Camat Kaibun	4.502.473.437,00	4.502.473.437,00	-
40	Kantor Camat Kombeng	6.537.947.200,00	6.537.947.200,00	-
41	Kantor Camat Long Mesangat	5.990.809.196,00	5.990.809.196,00	-
42	Kantor Camat Muara Ancalong	7.243.190.325,00	7.243.190.325,00	-
43	Kantor Camat Muara Bengkal	8.965.957.095,00	8.965.957.095,00	-
44	Kantor Camat Muara Wahau	7.264.501.362,00	7.264.501.362,00	-
45	Kantor Camat Rantau Pulung	4.294.764.001,00	4.294.764.001,00	-
46	Kantor Camat Sandaran	4.369.969.659,00	4.369.969.659,00	-
47	Kantor Camat Sangatta Selatan	22.154.544.269,00	22.154.544.269,00	-
48	Kantor Camat Sangatta Utara	28.500.434.589,00	28.500.434.589,00	-
49	Kantor Camat Sangkulirang	5.876.648.728,00	5.876.648.728,00	-
50	Kantor Camat Telen	5.468.619.536,00	5.468.619.536,00	-
51	Kantor Camat Teluk Pandan	6.595.490.826,00	6.595.490.826,00	-
52	Satuan Polisi Pamong Praja	32.340.512.155,00	37.040.512.155,00	- 4.700.000.000,00
53	Sekretariat Daerah	267.188.245.859,00	316.663.228.049,00	- 49.474.982.190,00
54	Sekretariat DPRD	70.394.577.286,00	105.394.577.286,00	- 35.000.000.000,00
JUMLAH		4.842.369.201.258,00	5.738.691.465.300,00	- 896.322.264.042,00

Berdasarkan Tabel 5.6, Berdasarkan perbandingan pagu **RKPD Tahun 2026** dengan **APBD Tahun 2026**, total alokasi anggaran mengalami peningkatan dari **Rp4,84 triliun** menjadi **Rp5,74 triliun**, atau bertambah sebesar **Rp896,32 miliar (18,51%)**. Kenaikan ini menunjukkan adanya penguatan prioritas pembangunan daerah pada beberapa sektor strategis, terutama infrastruktur, perumahan dan kawasan permukiman, pelayanan pemerintahan, serta dukungan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Peningkatan anggaran terbesar terjadi pada **Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**, yang naik dari **Rp151,52 miliar** menjadi **Rp653,86 miliar**, atau bertambah **Rp502,34 miliar**. Kenaikan signifikan ini mengindikasikan fokus pemerintah daerah pada

percepatan pembangunan perumahan, penataan kawasan permukiman, dan peningkatan kualitas infrastruktur dasar masyarakat.

Selanjutnya, **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)** mengalami kenaikan sebesar **Rp180,89 miliar**, dari **Rp693,34 miliar** menjadi **Rp874,22 miliar**, yang menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, drainase, serta sarana publik lainnya. Kenaikan cukup besar juga terdapat pada **Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah** sebesar **Rp85,54 miliar**, dari **Rp1,05 triliun** menjadi **Rp1,13 triliun**.

Pada unsur penunjang pemerintahan, **Sekretariat Daerah** memperoleh tambahan anggaran sebesar **Rp49,47 miliar**, sedangkan **Sekretariat DPRD** meningkat sebesar **Rp35 miliar**. Selain itu, **Dinas Kepemudaan dan Olahraga** mengalami kenaikan cukup signifikan sebesar **Rp41,55 miliar**, dari **Rp39,50 miliar** menjadi **Rp81,05 miliar**, yang mengindikasikan adanya peningkatan dukungan terhadap program kepemudaan dan kegiatan olahraga daerah.

Beberapa perangkat daerah lainnya juga mengalami peningkatan anggaran, antara lain **Dinas Kesehatan** sebesar **Rp5,12 miliar**, **Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan** sebesar **Rp7,61 miliar**, **Dinas Perkebunan** sebesar **Rp4,89 miliar**, **Dinas Perindustrian dan Perdagangan** sebesar **Rp3,05 miliar**, **Inspektorat** sebesar **Rp3,20 miliar**, serta **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik** dan **Badan Pendapatan Daerah** yang masing-masing meningkat sebesar **Rp2,50 miliar**.

Di sisi lain, terdapat beberapa perangkat daerah yang mengalami penurunan alokasi anggaran pada APBD 2026 dibandingkan RKPD 2026. Penurunan terbesar terjadi pada **Dinas Perhubungan** sebesar **Rp9,36 miliar**, dari **Rp82,78 miliar** menjadi **Rp73,41 miliar**. Selain itu, **Dinas Pendidikan dan Kebudayaan** mengalami penurunan sebesar **Rp8,77 miliar**, **Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian** turun sebesar **Rp8,76 miliar**, **Dinas Lingkungan Hidup** turun sebesar **Rp8,25 miliar**, **Dinas Pertanahan** turun sebesar **Rp5 miliar**, dan **Dinas Perikanan** turun sebesar **Rp1 miliar**.

Sementara itu, sejumlah perangkat daerah tidak mengalami perubahan pagu anggaran antara RKPD 2026 dan APBD 2026. Di antaranya adalah **Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**, **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**, **Badan Riset dan Inovasi Daerah**, **Dinas Ketahanan Pangan**, **Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah**, **Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan**, **Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**, **Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**, serta seluruh **kantor kecamatan** yang tetap mempertahankan alokasi anggaran sebagaimana direncanakan dalam RKPD.

Secara keseluruhan, struktur APBD Tahun 2026 menunjukkan adanya pergeseran dan penambahan alokasi anggaran yang lebih besar pada sektor infrastruktur, perumahan dan kawasan permukiman, serta dukungan tata kelola pemerintahan. Kebijakan ini mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan fisik, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan memperkuat kapasitas penyelenggaraan pemerintahan daerah guna mendukung pencapaian target pembangunan daerah tahun 2026.

.

BAB 6

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD

Bab ini menguraikan hasil pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026 sebagai bentuk evaluasi atas capaian pembangunan daerah selama tahun berjalan. Evaluasi hasil pelaksanaan RKPD menjadi bagian penting dalam siklus perencanaan pembangunan daerah karena memberikan gambaran mengenai sejauh mana target yang telah ditetapkan pada tahap perencanaan dapat diwujudkan melalui pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan oleh perangkat daerah. Dengan demikian, bab ini tidak hanya berfungsi sebagai media pelaporan capaian, tetapi juga sebagai dasar penilaian atas efektivitas pelaksanaan pembangunan daerah secara menyeluruh.

Secara substantif, evaluasi hasil pelaksanaan RKPD diarahkan untuk menilai dua dimensi utama. Pertama, capaian indikator tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagai representasi kinerja pembangunan pada level makro. Kedua, capaian indikator kinerja dan keuangan pada program, kegiatan, dan subkegiatan per perangkat daerah sebagai gambaran kinerja pelaksanaan pembangunan pada level operasional. Melalui dua dimensi tersebut, evaluasi hasil pelaksanaan RKPD dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai hubungan antara arah kebijakan pembangunan, implementasi program, dan tingkat capaian yang berhasil diwujudkan pada Tahun Anggaran 2026.

Evaluasi hasil pelaksanaan RKPD juga penting untuk menilai kualitas keterhubungan antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan daerah. Target yang telah dirumuskan dalam RKPD pada dasarnya merupakan komitmen kinerja tahunan pemerintah daerah, sehingga pelaksanaannya perlu dilihat tidak hanya dari sisi penyerapan anggaran, tetapi juga dari sisi pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan. Evaluasi pada bab ini menempatkan aspek kinerja dan keuangan secara seimbang, agar pelaksanaan pembangunan tidak hanya dinilai dari seberapa besar anggaran dibelanjakan, tetapi juga dari seberapa jauh hasil yang direncanakan benar-benar dapat dicapai.

Dalam pelaksanaannya, capaian pembangunan daerah dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Faktor internal dapat berupa kualitas perencanaan, ketepatan pelaksanaan kegiatan, efektivitas koordinasi antarperangkat daerah, ketersediaan sumber daya manusia, serta kapasitas kelembagaan pelaksana. Sementara itu, faktor eksternal dapat berupa dinamika fiskal daerah, perubahan kebijakan nasional dan daerah, kondisi sosial ekonomi masyarakat, serta perkembangan situasi yang memengaruhi jalannya pelaksanaan pembangunan. Oleh sebab itu, hasil evaluasi pada bab ini perlu dibaca secara komprehensif, tidak semata-mata sebagai perbandingan angka target dan realisasi, tetapi juga sebagai refleksi atas dinamika implementasi pembangunan daerah pada tahun berjalan.

Bab ini disusun untuk memberikan gambaran yang sistematis mengenai hasil pelaksanaan RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026. Pembahasan diawali dengan evaluasi capaian indikator tujuan dan sasaran pembangunan daerah, kemudian dilanjutkan dengan evaluasi capaian indikator kinerja dan keuangan pada program, kegiatan, dan subkegiatan per perangkat daerah. Dengan susunan tersebut, Bab VI diharapkan dapat menunjukkan capaian pembangunan yang telah berhasil diwujudkan, sekaligus mengidentifikasi bagian-bagian yang masih memerlukan

penguatan dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah pada periode berikutnya.

6.1 Capaian Indikator Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan tahunan yang menjadi penjabaran operasional dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sehingga capaian indikator tujuan dan sasaran pembangunan dalam RKPD Tahun 2026 perlu dievaluasi untuk menilai tingkat keterlaksanaan arah kebijakan, prioritas, serta target pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Evaluasi ini dilaksanakan sebagai bagian dari pengendalian kinerja pembangunan daerah dengan membandingkan target dan realisasi indikator tujuan serta sasaran pembangunan yang termuat dalam RKPD Tahun 2026, sehingga dapat diperoleh gambaran mengenai tingkat efektivitas pelaksanaan pembangunan daerah selama tahun berjalan. Hasil evaluasi tersebut selanjutnya menjadi dasar penting dalam memberikan umpan balik bagi perbaikan kualitas perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan daerah pada periode berikutnya. Pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan RKPD Kabupaten Kutai Timur dilakukan dengan menggunakan formulir Evaluasi Hasil RKPD sebagaimana diatur dalam Lampiran E.60 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sedangkan penilaian terhadap rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja mengacu pada Tabel T-E.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Tabel 6.1 Interval Nilai dan Kriteria Penilaian

No	Interval Nilai	Kriteria Penilaian
1	91% <= 100%	Sangat Tinggi
2	76% <= 90%	Tinggi
3	66% <= 75%	Sedang
4	51% <= 65%	Rendah
5	<= 50%	Sangat Rendah

Sumber: Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Penilaian capaian indikator tujuan dan sasaran pembangunan pada subbab ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi indikator pembangunan daerah Tahun 2026. Hasil perbandingan tersebut selanjutnya dinilai berdasarkan interval kriteria penilaian yang telah ditetapkan, sehingga tingkat capaian masing-masing indikator dapat diklasifikasikan secara lebih terukur. Melalui pendekatan ini, evaluasi tidak hanya menunjukkan besarnya realisasi terhadap target, tetapi juga memberikan gambaran mengenai posisi keberhasilan pembangunan daerah dalam kategori sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, atau sangat rendah. Dengan demikian, pembahasan capaian indikator tujuan dan sasaran pembangunan dapat disajikan secara lebih sistematis dan memudahkan penafsiran terhadap hasil pelaksanaan RKPD Tahun 2026.

Tabel 6.2 Capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Realisasi 2026	Target 2026	Capaian 2026 (s.d triwulan I)
Mewujudkan SDM Yang Berkualitas		Indeks Pembangunan Manusia (Indeks)	76,48	76,60	76,48*
	Terwujudnya layanan kesehatan yang prima dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH) ((tahun))	74,87	74,79	74,87*
		Angka Stunting (%)	14,96	23,70	14,96*
	Terwujudnya layanan pendidikan berkualitas yang merata	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun ((tahun))	9,48	9,51	9,48*
		Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,22	13,04	13,22*
	Meningkatnya kualitas keluarga dan kesetaraan gender	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) (Indeks)	0,477	0,49	0,477*
		Indeks Pembangunan Keluarga (IBANGGA) (Indeks)	69	67,90	69*
	Pengentasan kemiskinan dan pengangguran	Tingkat Kemiskinan (%) (%)	8,07	7.16-7.55	8,07*
		Tingkat Pengangguran Terbuka (%) (%)	6,2	5.21-5.31	6,2*
Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Berbasis Potensi Lokal		Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	1,05	10.17-10.38	1,05*
		PDRB per kapita (Rp)	325,08	389,99	325,08*
		Rasio Gini (Rasio)	0,305	0.271-0.281	0,305*
	Mendorong pertumbuhan ekonomi sektor non tambang	Proporsi PDRB Sektor Non-Tambang (%)	29,83	25,66	29,83*
	Meningkatkan kinerja dan daya saing industri pengolahan	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan ((%))	5,81	5,06	5,81*
	Meningkatnya ketahanan pangan	Indeks Ketahanan Pangan (IKP) (Indeks)	80,17	66,90	80,17*
	Terwujudnya ekosistem sosial dan ekonomi yang ramah investasi	Nilai investasi PMDN (Juta Rupiah) (Nilai)	1.623.267,42	5.250.000,00	1623267,42*
		Nilai investasi PMA (Ribu \$) (Nilai)	268.750,00	271.875,00	268750*

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Realisasi 2026	Target 2026	Capaian 2026 (s.d triwulan I)
	Terwujudnya integrasi ekonomi Kutai Timur dengan ekonomi domestik, nasional, dan global	Proporsi Nilai Ekspor terhadap PDRB (Angka)	63,74	71,69	63,74*
	Terwujudnya pembangunan yang berkesinambungan antara desa dan kota	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (Indeks)	7,60	8.11-8.13	7,6*
Mewujudkan Birokrasi yang Efektif, Efisien, Transparan, Akuntabel dan Responsif		Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)	73,12	73,00	73,12*
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang profesional, efektif, adaptif, dan visioner	Indeks Pemerintahan Digital (Indeks)	63,22 (SPBE)	3,00	63,22 (SPBE)*
		Indeks Sistem Merit (Predikat)	67,25	Menengah	67,25*
		Nilai SAKIP (Nilai)	60,5	66,72	60,5*
		Indeks Integritas Pemerintah (Indeks)	66,36	65,11	66,36*
		Indeks Inovasi Daerah (Angka)	48,88	32,00	48,88*
	Meningkatnya kualitas layanan publik	Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)	4,4	2,61	4,4*
	Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang berkelanjutan, efisien, dan berkualitas	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (%)	73,82	76,23	73,82*
Mewujudkan Pembangunan yang Merata dan Berkelanjutan		Penurunan intensitas emisi GRK ((%))	69,9	63,50	69,9*
	Pembangunan ramah lingkungan dan resiliensi terhadap bencana	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (poin)	80,85	79,05	80,85*
	Terwujudnya kesiapsiagaan daerah terhadap bencana	Indeks Risiko Bencana (Indeks)	160,51	159,36	160,51*

6.1.1 Analisis Capaian per Tujuan dan Sasaran

Tujuan 1: Mewujudkan SDM yang Berkualitas

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, capaian pada tujuan Mewujudkan SDM yang Berkualitas belum dapat diukur karena seluruh indikator tujuan maupun sasaran masih menggunakan realisasi Tahun 2026 sebagai data dasar (baseline). Indikator seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Usia Harapan Hidup (UHH), Angka Stunting, Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Harapan Lama Sekolah (HLS), Indeks Ketimpangan Gender (IKG), Indeks Pembangunan Keluarga (IBANGGA), Tingkat Kemiskinan, dan Tingkat Pengangguran Terbuka merupakan indikator makro yang publikasi datanya dilakukan secara periodik oleh instansi yang berwenang. Oleh karena itu, hingga akhir Triwulan I Tahun 2026 belum tersedia realisasi tahun berjalan sehingga belum dapat dilakukan pengukuran capaian terhadap target Tahun 2026.

Tujuan 2: Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Berbasis Potensi Lokal

Pada tujuan Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Berbasis Potensi Lokal, seluruh indikator juga masih menggunakan data realisasi Tahun 2026. Indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi, PDRB per Kapita, Rasio Gini, Proporsi PDRB Sektor Non-Tambang, Kontribusi PDRB Industri Pengolahan, Indeks Ketahanan Pangan, Nilai Investasi PMDN dan PMA, Proporsi Nilai Ekspor terhadap PDRB, serta Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur belum memiliki realisasi Tahun 2026. Hal ini disebabkan sebagian besar indikator tersebut merupakan indikator makro ekonomi yang memerlukan proses pengumpulan, pengolahan, dan validasi data sebelum dipublikasikan. Dengan demikian, sampai Triwulan I Tahun 2026 belum dapat dilakukan penilaian terhadap tingkat pencapaian target yang telah ditetapkan.

Tujuan 3: Mewujudkan Birokrasi yang Efektif, Efisien, Transparan, Akuntabel dan Responsif

Capaian pada tujuan Mewujudkan Birokrasi yang Efektif, Efisien, Transparan, Akuntabel dan Responsif hingga Triwulan I Tahun 2026 juga belum dapat dievaluasi karena seluruh indikator masih menggunakan capaian Tahun 2026. Indikator seperti Indeks Reformasi Birokrasi, Indeks Pemerintahan Digital (SPBE), Indeks Sistem Merit, Nilai SAKIP, Indeks Integritas Pemerintah, Indeks Inovasi Daerah, Indeks Pelayanan Publik, dan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan hasil penilaian yang diterbitkan secara berkala oleh kementerian, lembaga pembina, maupun instansi terkait. Oleh karena itu, data realisasi Tahun 2026 belum tersedia pada Triwulan I sehingga evaluasi terhadap pencapaian target belum dapat dilakukan.

Tujuan 4: Mewujudkan Pembangunan yang Merata dan Berkelanjutan

Pada tujuan Mewujudkan Pembangunan yang Merata dan Berkelanjutan, indikator Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK), Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), dan Indeks Risiko Bencana masih menggunakan realisasi Tahun 2026 sebagai baseline. Ketiga indikator tersebut memerlukan proses pengukuran, verifikasi, dan publikasi oleh instansi teknis sehingga data capaian Tahun 2026 belum tersedia pada Triwulan I. Dengan demikian, sampai dengan periode pelaporan ini belum dapat dilakukan analisis terhadap pencapaian target Tahun 2026.

6.1.2 Simpulan Umum

Berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, belum terdapat capaian kinerja yang dapat diukur terhadap seluruh indikator tujuan dan sasaran RPJMD karena seluruh indikator masih menggunakan realisasi Tahun 2026 sebagai data dasar (baseline). Hal ini disebabkan sebagian besar indikator merupakan indikator makro daerah maupun indikator hasil evaluasi

kementerian/lembaga yang jadwal publikasinya dilakukan setelah periode Triwulan I. Oleh karena itu, evaluasi terhadap tingkat pencapaian target Tahun 2026 belum dapat dilakukan dan akan menunggu ketersediaan data resmi yang dipublikasikan sesuai siklus pelaporan masing-masing indikator.

6.3 Capaian Indikator Kinerja dan Keuangan pada Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Perangkat Daerah

No.	Uraian Bidang Urusan	Pagu RKPD	Rata-rata Capaian Kinerja		Realisasi Keuangan	
			Ind Prog	Ind Sub Keg	(Rp)	(%)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.064.263.987.486,00	99,93	2,97	134.740.618.096,00	12,66
2	Dinas Kesehatan	331.794.799.029,00	63,68	100	47.750.043.038,00	14,39
3	RSUD Kudungga Sangatta	137.618.906.413,00	94,26	20,41	31.776.639.707,00	23,09
4	RSUD Sangkulirang	0,00	82,84	0	0,00	0
5	PUSKESMAS SANDARAN	2.277.413.780,00	83,8	54,11	70.383.750,00	3,09
6	PUSKESMAS SANGKULIRANG	3.097.592.880,00	86,33	20,22	207.805.914,00	6,71
7	PUSKESMAS KALIORANG	3.432.055.660,00	85,93	63,16	590.582.253,00	17,21
8	PUSKESMAS KAUBUN	3.497.794.960,00	86,33	29,74	710.695.197,00	20,32
9	PUSKESMAS KARANGAN	3.137.820.360,00	86,33	74,96	490.400.390,00	15,63
10	PUSKESMAS SEPASO	3.416.715.320,00	47,67	83,29	502.634.687,00	14,71
11	PUSKESMAS BUSANG	2.144.524.000,00	86,46	21,2	23.198.500,00	1,08
12	PUSKESMAS LONG MESANGAT	2.267.181.160,00	86,32	68,42	349.172.002,00	15,4
13	PUSKESMAS MUARA ANCALONG	2.926.884.730,00	86,33	47,67	520.831.081,00	17,79
14	PUSKESMAS MUARA BENGKAL	2.575.736.160,00	86,26	51,29	539.928.205,00	20,96
15	PUSKESMAS BATU AMPAR	2.030.023.560,00	86,33	15,81	185.488.331,00	9,14
16	PUSKESMAS KOMBENG	4.079.723.840,00	86,33	100	1.117.235.754,00	27,39
17	PUSKESMAS TELEN	1.883.327.640,00	86,33	52,69	140.228.440,00	7,45
18	PUSKESMAS MUARA WAHAU 1	2.313.915.540,00	90,13	7,64	536.636.085,00	23,19
19	PUSKESMAS MUARA WAHAU 2	2.782.423.620,00	51,63	53,48	698.688.906,00	25,11
20	PUSKESMAS RANTAU PULUNG	2.432.025.160,00	86,33	19,23	338.326.855,00	13,91
21	PUSKESMAS TEPIAN BARU	2.501.373.040,00	81,71	8,31	334.956.984,00	13,39
22	PUSKESMAS TELUK LINGGA	3.419.262.590,00	86,57	79,87	279.154.294,00	8,16
23	PUSKESMAS SANGATTA UTARA	2.791.225.810,00	86,33	11,95	391.668.273,00	14,03
24	PUSKESMAS SANGATTA SELATAN	2.555.128.310,00	86,66	52,86	450.554.844,00	17,63
25	PUSKESMAS TELUK PANDAN	2.081.586.880,00	86,33	96,29	175.500.540,00	8,43
26	Instalasi Farmasi Kabupaten	1.044.543.500,00	81,98	100	95.748.000,00	9,17
27	Laboratorium Kesehatan Daerah	1.200.793.000,00	82,84	0	79.962.249,00	6,66
28	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	869.224.772.399,00	81,52	2,65	9.396.142.885,00	1,08
29	UPT Laboratorium Kontruksi dan Unit Pemeliharaan Rutin Jalan/Alat Berat	2.000.000.000,00	88,96	0	0,00	0
30	UPT Peralatan dan Pemeliharaan Rutin jalan/alat berat Kec. Sangatta Utara	750.000.000,00	89,45	0	0,00	0
31	UPT Peralatan dan Pemeliharaan Rutin jalan/alat berat Kec. Sangkulirang	750.000.000,00	89,45	0	0,00	0
32	UPT Peralatan dan Pemeliharaan Rutin jalan/alat berat Kec. Muara Wahau	750.000.000,00	89,45	0	0,00	0

No.	Uraian Bidang Urusan	Pagu RKPD	Rata-rata Capaian Kinerja		Realisasi Keuangan	
			Ind Prog	Ind Sub Keg	(Rp)	(%)
33	UPT Peralatan dan Pemeliharaan Rutin jalan/alat berat Kec. Muara Bengkal	750.000.000,00	89,45	0	0,00	0
34	UPT Pertamanan dan Pemakaman Sangatta Utara	2.410.000.000,00	0	0	564.957.950,00	23,44
35	UPT Pertamanan dan Pemakaman Sangatta Selatan	1.040.000.000,00	0	0	203.324.750,00	19,55
36	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	650.410.675.088,00	0	2,3	4.044.494.966,00	0,62
37	Satuan Polisi Pamong Praja	37.040.512.155,00	77,98	22,74	6.087.844.722,00	16,44
38	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	29.113.108.133,00	48,04	19,35	6.324.059.325,00	21,72
39	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	15.280.216.255,00	90,15	30,17	3.114.603.908,00	20,38
40	Dinas Sosial	14.387.475.620,00	29,52	33,5	2.366.263.932,00	16,45
41	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	44.272.163.076,00	0	9,46	3.166.103.055,00	7,15
42	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Mandiri	2.280.000.000,00	0	4,17	24.347.052,00	1,07
43	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	12.390.930.423,00	70,29	5,08	1.757.154.769,00	14,18
44	Dinas Ketahanan Pangan	10.422.057.359,00	100	45,06	2.735.871.840,00	26,25
45	Dinas Pertanahan	15.404.292.352,00	13,43	37,19	2.295.627.504,00	14,9
46	UPT Survey dan Pemetaan	70.000.000,00	46,99	100	6.237.211,00	8,91
47	Dinas Lingkungan Hidup	27.372.743.449,00	28,72	35,87	3.833.831.526,00	14,01
48	UPT Kebersihan Sangatta Utara	7.000.000.000,00	30,5	51,78	1.805.539.100,00	25,79
49	UPT Kebersihan Sangatta Selatan	2.235.920.000,00	30,5	80,36	536.140.600,00	23,98
50	UPT TPA, Pengelolaan Limbah Domestik dan Lumpur Tinja	4.016.171.700,00	30,5	36,68	180.701.800,00	4,5
51	UPT Laboratorium LH	27.590.067,00	0	0	0,00	0
52	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	15.705.738.695,00	22,22	49,54	3.154.245.008,00	20,08
53	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	19.877.481.243,00	83,12	15,99	2.680.825.639,00	13,49
54	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	22.769.468.145,00	12	7,29	776.402.895,00	3,41
55	Dinas Perhubungan	73.137.156.880,00	71,3	28,55	4.072.574.326,00	5,57
56	UPT Pengujian Kendaraan Bermotor	277.000.000,00	35,71	16,67	62.611.525,00	22,6
57	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	69.844.413.372,00	13,32	4,53	2.770.283.646,00	3,97
58	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	15.456.023.335,00	8,99	7,62	2.213.355.939,00	14,32
59	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	15.471.126.923,00	27,83	6,7	2.509.246.604,00	16,22
60	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	78.695.180.065,00	74,96	9	3.099.373.379,00	3,94
61	UPTD Sarana Prasarana Olahraga	2.350.500.000,00	93,3	0	265.700.000,00	11,3
62	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	27.253.943.936,00	100	7,74	5.760.502.643,00	21,14
63	UPT Perpustakaan Kecamatan Muara Bengkal	25.000.000,00	93,57	37,5	10.724.655,00	42,9
64	UPT Perpustakaan Kecamatan Sangkulirang	25.000.000,00	100	0	6.415.200,00	25,66
65	UPT Perpustakaan Kecamatan Sangatta Utara	25.000.000,00	93,57	16,67	5.520.550,00	22,08
66	UPT Perpustakaan Kecamatan Muara Wahau	25.000.000,00	93,57	0	0,00	0
67	Dinas Perikanan	19.325.866.301,00	96,92	6,29	2.932.723.082,00	15,18
68	UPT Balai Benih Ikan Kaliorang	100.000.000,00	96,2	0	0,00	0

No.	Uraian Bidang Urusan	Pagu RKPD	Rata-rata Capaian Kinerja		Realisasi Keuangan	
			Ind Prog	Ind Sub Keg	(Rp)	(%)
69	UPT Balai Benih Ikan Air Laut Teluk Kaba	25.000.000,00	95,38	0	0,00	0
70	UPT Balai Benih Udang Teluk Lombok	0,00	95,38	0	0,00	0
71	UPT Tempat Pelelangan Ikan Kenyamukan	50.000.000,00	100	0	0,00	0
72	UPT Tempat Pelelangan Ikan Sangkulirang	50.000.000,00	100	0	0,00	0
73	Dinas Pariwisata	20.574.157.576,00	0	12,5	2.199.747.066,00	10,69
74	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Pernakan	104.370.523.886,00	100	6,72	11.075.507.926,00	10,61
75	Dinas Perkebunan	19.836.163.357,00	0	11,39	2.839.315.719,00	14,31
76	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	24.926.408.678,00	16,91	6,97	4.493.771.323,00	18,03
77	UPT Pasar Induk Sangatta Utara	1.000.000.000,00	81,82	0	284.790.000,00	28,48
78	UPT Pasar Sangkulirang	400.000.000,00	81,82	0	49.765.700,00	12,44
79	UPT Pasar Muara Wahau	600.000.000,00	81,82	0	88.000.000,00	14,67
80	Sekretariat Daerah	316.663.228.049,00	27,4	19,29	34.214.253.826,00	10,8
81	Sekretariat DPRD	105.394.577.286,00	93,24	7,4	17.064.057.569,00	16,19
82	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	21.871.519.774,00	100	9,97	3.433.570.652,00	15,7
83	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1.131.528.020.030,00	45,77	6,84	167.267.509.287,00	14,78
84	Badan Pendapatan Daerah	46.891.933.619,00	16,88	17,04	5.269.547.156,00	11,24
85	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	27.416.891.232,00	85,73	10,38	4.964.745.211,00	18,11
86	Badan Riset dan Inovasi Daerah	7.314.532.199,00	100	25,83	1.496.829.157,00	20,46
87	Inspektorat	43.488.303.647,00	75,84	19,22	4.077.754.303,00	9,38
88	Kantor Camat Sangatta Selatan	8.921.940.269,00	35,17	4,71	1.758.918.969,00	19,71
89	Kantor Lurah Singa Geweh	13.232.604.000,00	67,09	28,97	270.870.920,00	2,05
90	Kantor Camat Sangatta Utara	8.905.760.589,00	77,6	37,5	1.779.039.085,00	19,98
91	Kantor Lurah Teluk Lingga	19.594.674.000,00	100	27,59	291.070.000,00	1,49
92	Kantor Camat Bengalon	7.745.904.764,00	19,71	67,6	1.761.082.928,00	22,74
93	Kantor Camat Kaliorang	5.055.109.044,00	23,12	68,55	904.674.540,00	17,9
94	Kantor Camat Muara Wahau	7.264.501.362,00	10,05	63,75	1.794.650.674,00	24,7
95	Kantor Camat Kombeng	6.537.947.200,00	23,22	39,9	1.380.236.394,00	21,11
96	Kantor Camat Muara Ancalong	7.243.190.325,00	88,36	7,14	1.337.964.328,00	18,47
97	Kantor Camat Batu Ampar	4.925.881.735,00	9,1	16,16	970.973.897,00	19,71
98	Kantor Camat Telen	5.468.619.536,00	0	6,01	1.179.655.901,00	21,57
99	Kantor Camat Busang	4.701.256.689,00	15,65	8,04	884.042.297,00	18,8
100	Kantor Camat Teluk Pandan	6.595.490.826,00	30,77	41,58	1.286.382.316,00	19,5
101	Kantor Camat Rantau Pulung	4.294.764.001,00	75,54	60,42	799.759.320,00	18,62
102	Kantor Camat Kaubun	4.502.473.437,00	26,59	66,98	713.376.495,00	15,84
103	Kantor Camat Sangkulirang	5.876.648.728,00	27,97	9,08	1.066.871.867,00	18,15
104	Kantor Camat Muara Bengkal	8.965.957.095,00	26,22	32,85	1.914.996.980,00	21,36
105	Kantor Camat Long Mesangat	5.990.809.196,00	92,26	5,29	1.330.989.850,00	22,22
106	Kantor Camat Karangan	3.836.522.000,00	41,16	25,84	702.554.925,00	18,31
107	Kantor Camat Sandaran	4.369.969.659,00	33,94	21,74	576.000.081,00	13,18
108	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	18.930.890.113,00	100	18,81	1.993.505.886,00	10,53

No.	Uraian Bidang Urusan	Pagu RKPD	Rata-rata Capaian Kinerja		Realisasi Keuangan	
			Ind Prog	Ind Sub Keg	(Rp)	(%)
		5.738.691.465.300,00	62,08	26,21	585.377.616.909,00	10,2

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Kabupaten Kutai Timur sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, total pagu anggaran yang dikelola oleh seluruh perangkat daerah sebesar **Rp5.738.691.465.300,00**, dengan realisasi keuangan mencapai **Rp585.377.616.909,00** atau **10,20%** dari total pagu anggaran. Dari sisi kinerja, rata-rata capaian **indikator program** mencapai **62,08%**, sedangkan rata-rata capaian **indikator sub kegiatan** sebesar **26,21%**.

Ditinjau dari besaran anggaran, perangkat daerah dengan pagu terbesar meliputi **Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah** sebesar **Rp1,13 triliun**, **Dinas Pendidikan dan Kebudayaan** sebesar **Rp1,06 triliun**, **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang** sebesar **Rp869,22 miliar**, serta **Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman** sebesar **Rp650,41 miliar**. Meskipun memiliki alokasi anggaran yang besar, realisasi keuangan pada beberapa perangkat daerah tersebut masih relatif rendah, khususnya **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang** yang baru mencapai **1,08%** dan **Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman** sebesar **0,62%**, sehingga memerlukan percepatan pelaksanaan kegiatan pada triwulan berikutnya.

Dari aspek capaian kinerja program, terdapat sejumlah perangkat daerah yang telah menunjukkan kinerja sangat baik dengan capaian indikator program mencapai **100%**, antara lain **Dinas Ketahanan Pangan**, **Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**, **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**, **Badan Riset dan Inovasi Daerah**, **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**, serta beberapa perangkat daerah lainnya. Sebaliknya, masih terdapat perangkat daerah yang capaian indikator programnya belum optimal, bahkan masih tercatat **0%**, seperti **Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**, **Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja**, **UPTD Balai Latihan Kerja Industri Mandiri**, **Dinas Pariwisata**, dan **Dinas Perkebunan**, yang mengindikasikan perlunya percepatan pelaksanaan program maupun penyempurnaan pelaporan kinerja.

Pada tingkat sub kegiatan, rata-rata capaian baru mencapai **26,21%**, meskipun beberapa perangkat daerah telah mampu mencapai realisasi indikator sub kegiatan sebesar **100%**, antara lain **Dinas Kesehatan**, **Puskesmas Kombeng**, **Instalasi Farmasi Kabupaten**, dan **UPT Survey dan Pemetaan**. Namun demikian, masih terdapat sejumlah perangkat daerah dan UPT yang belum menunjukkan capaian indikator sub kegiatan atau masih berada pada angka **0%**, sehingga perlu dilakukan evaluasi terhadap kesiapan pelaksanaan kegiatan maupun ketepatan pelaporan.

Dari sisi realisasi keuangan, terdapat beberapa perangkat daerah yang menunjukkan penyerapan anggaran relatif tinggi pada Triwulan I, di antaranya **UPT Perpustakaan Kecamatan Muara Bengkal** sebesar **42,90%**, **UPT Pasar Induk Sangatta Utara** sebesar **28,48%**, **Puskesmas Kombeng** sebesar **27,39%**, **Dinas Ketahanan Pangan** sebesar **26,25%**, serta beberapa puskesmas lainnya yang telah melampaui 20%. Sebaliknya, masih terdapat perangkat daerah dengan realisasi keuangan yang sangat rendah, seperti **Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (0,62%)**, **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (1,08%)**, **UPTD Balai**

Latihan Kerja Industri Mandiri (1,07%), serta beberapa UPT yang belum merealisasikan anggaran sama sekali.

Secara umum, hasil evaluasi Triwulan I menunjukkan bahwa pelaksanaan RKPD Tahun 2026 masih berada pada tahap awal pelaksanaan sehingga capaian keuangan masih relatif rendah. Meskipun demikian, capaian indikator program telah menunjukkan perkembangan yang cukup baik pada sebagian perangkat daerah. Perlu menjadi perhatian bahwa tingginya rata-rata capaian indikator program pada beberapa perangkat daerah belum sepenuhnya mencerminkan kinerja pelaksanaan Tahun 2026. Berdasarkan hasil evaluasi, masih terdapat perangkat daerah yang menginput realisasi capaian indikator program menggunakan capaian Tahun 2026 sebagai nilai dasar pada aplikasi pelaporan. Kondisi tersebut menyebabkan capaian indikator program pada Triwulan I tampak sangat tinggi, bahkan telah mencapai 100%, padahal sebagian indikator merupakan indikator tahunan yang realisasi sebenarnya masih akan berkembang seiring pelaksanaan program sepanjang Tahun 2026. Oleh karena itu, kepada perangkat daerah yang bersangkutan agar melakukan penyesuaian target dan capaian indikator pada **Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2026**, sehingga target kinerja yang ditetapkan lebih realistis, menggambarkan kondisi pelaksanaan tahun berjalan, serta menghasilkan pengukuran kinerja yang lebih akurat dan akuntabel. Oleh karena itu, diperlukan percepatan proses pengadaan barang dan jasa, percepatan pelaksanaan kegiatan fisik maupun nonfisik, peningkatan kualitas pengendalian internal, serta penguatan monitoring dan evaluasi oleh masing-masing perangkat daerah agar target kinerja dan realisasi anggaran pada triwulan-triwulan berikutnya dapat tercapai sesuai dengan yang telah direncanakan.

BAB 7

FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT

Mengacu pada Formulir E.60 (Evaluasi terhadap RKPD) yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dalam pengisiannya, Perangkat Daerah seharusnya menyebutkan faktor pendorong keberhasilan pencapaian yang merupakan hasil identifikasi faktor-faktor yang mendorong tercapainya suatu target, serta mengisi faktor penghambat pencapaian kinerja yang merupakan hasil identifikasi faktor-faktor yang menghambat tercapainya suatu target kinerja program prioritas. Sangat disayangkan, hanya sedikit Perangkat Daerah yang melengkapi pengisian faktor pendorong dan penghambat, padahal substansi ini sangat penting untuk membantu dalam perumusan solusi sehingga masalah yang terjadi dapat tertangani secara tepat.

Dalam pencapaian kinerja program dan kegiatan triwulan I tahun 2026, secara umum beberapa faktor pendorong dan penghambat yang sebagai berikut:

Faktor Pendorong:

1. Komitmen pimpinan dan aparatur untuk pelaksanaan program dan kegiatan /sub kegiatan untuk selalu normatif sesuai peraturan perundang-undangan
2. Anggaran dapat menjadi faktor pendorong maupun penghambat, dimana Ketika anggaran yang diberikan mencukupi maka dapat mendorong ketercapaian kinerja program dan kegiatan sedangkan ketika anggaran yang diberikan kurang dari cukup, maka dapat menjadi penghambat keberlangsungan program, kegiatan, dan sub-kegiatan
3. Manajemen pembangunan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis. Hal ini dapat terlihat dari penggunaan input berupa dana pada kegiatan dapat dialokasikan secara efektif dan efisien tetapi capaian dari output sampai dengan outcome kegiatan dapat mencapai hasil yang maksimal
4. Evaluasi Kinerja pada tiap satuan kerja perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur telah dibuat secara periodik sebagai bentuk transparansi dan pengukuran kinerja instansi, dengan didukung oleh keselarasan dan kesesuaian indikator kinerja kegiatan dan indikator kinerja sasaran pada masing-masing satuan unit kerja sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kinerja instansi.
5. Terlaksananya kegiatan sesuai dengan waktu yang ditentukan sesuai arahan dan bimbingan dari pimpinan yang optimal, dukungan dari staf dan bawahan, perencanaan, dukungan anggaran yang tersedia, dukungan data dan informasi yang akurat serta terjalinnya komunikasi dan koordinasi yang cukup baik.
6. Sinergitas yang baik antara pimpinan dan bawahan dalam melaksanakan kegiatan.
7. Dukungan Stakeholder yaitu pihak yang juga memiliki kepentingan dalam keberlangsungan program, kegiatan, dan sub-kegiatan, misalnya sesama Perangkat Daerah atau juga instansi-instansi lainnya. Ketika stakeholder dapat bekerjasama dengan baik, maka dapat membantu dalam ketercapaian kinerja program, kegiatan, dan sub-kegiatan.

8. Paradigma pemerintah daerah dalam proses pembangunan yang menempatkan masyarakat sebagai salah satu subyek pembangunan.
9. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam keterlibatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan

Faktor Penghambat:

1. Kurangnya koordinasi antara pimpinan dan bawahan dalam melaksanakan kegiatan.
2. Waktu pelaksanaan berkaitan erat dengan perencanaan program, kegiatan, dan sub-kegiatan, ketika waktu pelaksanaan program, kegiatan, dan sub-kegiatan tidak sesuai dengan perencanaan maka dapat menjadi faktor penghambat keberjalanan program, kegiatan, dan sub-kegiatan.
3. Kejadian tidak terduga merupakan kejadian yang tidak diduga akan terjadi pada tahun perencanaan, misalnya bencana alam, wabah, dan lain sebagainya yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan sub-kegiatan.
4. Ketersediaan data, ketersediaan data sektoral yang belum lengkap dan terpadu.
5. Lemahnya/kurangnya pemahaman para stakeholder terhadap sistem perencanaan pembangunan sesuai dengan Peraturan dan Perundangundangan yang berlaku.
6. Kurangnya sarana dan prasana dalam mendukung kinerja pegawai

BAB 8

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

8.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026 Triwulan I sebagaimana diuraikan pada Bab II sampai dengan Bab VII, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut.

1. **Capaian makro pembangunan daerah** menunjukkan perkembangan yang bervariasi. Di satu sisi, pembangunan manusia terus mengalami peningkatan yang ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta menurunnya tingkat kemiskinan. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kutai Timur mengalami perlambatan yang cukup signifikan sebagai akibat dari kontraksi sektor pertambangan yang masih menjadi sektor dominan dalam struktur perekonomian daerah. Kondisi tersebut berdampak pada menurunnya PDRB per kapita, sementara pada saat yang sama ketimpangan pendapatan yang diukur melalui Indeks Gini mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun indikator sosial membaik, struktur ekonomi daerah masih memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap sektor ekstraktif sehingga diperlukan upaya percepatan diversifikasi ekonomi.
2. **Kebijakan keuangan daerah** secara umum telah berjalan sesuai dengan arah kebijakan fiskal yang telah ditetapkan. Pelaksanaan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah berupaya menjaga kesinambungan pelaksanaan pembangunan melalui pengelolaan keuangan yang mendukung prioritas pembangunan daerah. Namun demikian, realisasi anggaran pada Triwulan I masih relatif rendah sebagaimana karakteristik awal tahun anggaran, sehingga diperlukan percepatan pelaksanaan kegiatan pada triwulan berikutnya agar target kinerja dan penyerapan anggaran dapat tercapai secara optimal.
3. **Konsistensi antara RKPD dengan RPJMD** menunjukkan hasil yang sangat baik. Seluruh tujuan, sasaran, program, indikator kinerja, target, serta struktur program pada RKPD telah disusun selaras dengan RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026–2029. Hal ini menunjukkan bahwa dokumen RKPD telah berfungsi sebagai penjabaran tahunan RPJMD sehingga kesinambungan pelaksanaan pembangunan jangka menengah tetap terjaga. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa penyesuaian target dan pagu anggaran yang dilakukan untuk menyesuaikan kondisi fiskal, kebutuhan pembangunan, serta dinamika pelaksanaan pembangunan daerah.
4. **Pengendalian pelaksanaan RKPD terhadap APBD** menunjukkan tingkat konsistensi yang sangat tinggi. Seluruh program, kegiatan, dan subkegiatan yang direncanakan dalam RKPD telah terakomodasi dalam APBD dengan tingkat konsistensi mencapai **100 persen**, tanpa adanya inkonsistensi pada level program, kegiatan, maupun subkegiatan. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa proses penyusunan APBD telah dilaksanakan berdasarkan dokumen perencanaan yang telah ditetapkan serta menunjukkan semakin baiknya integrasi antara proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.
5. **Evaluasi hasil pelaksanaan RKPD** menunjukkan bahwa hingga Triwulan I pelaksanaan program pembangunan telah berjalan sesuai rencana, meskipun sebagian besar indikator

kinerja dan realisasi keuangan masih berada pada tahap awal pencapaian. Kondisi tersebut merupakan hal yang wajar mengingat pelaksanaan kegiatan pada awal tahun anggaran masih berada pada tahapan persiapan administrasi, pengadaan barang dan jasa, serta proses pelaksanaan fisik. Namun demikian, beberapa indikator kinerja masih memerlukan perhatian khusus agar target tahunan dapat dicapai melalui percepatan pelaksanaan program dan peningkatan kualitas pengendalian kinerja.

6. **Faktor pendorong pelaksanaan RKPD** antara lain didukung oleh tersedianya dokumen perencanaan yang telah tersusun secara konsisten, komitmen pemerintah daerah dalam menjaga sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran, dukungan regulasi, koordinasi antar Perangkat Daerah, serta meningkatnya pemanfaatan sistem informasi perencanaan dan penganggaran. Sebaliknya, **faktor penghambat** masih didominasi oleh keterlambatan proses pengadaan barang dan jasa, perubahan kebijakan pemerintah pusat, dinamika penyesuaian anggaran, keterbatasan kapasitas pelaksana pada beberapa Perangkat Daerah, serta masih perlunya peningkatan kualitas perencanaan teknis dan pengelolaan data kinerja.
7. Secara keseluruhan, pelaksanaan RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026 sampai dengan Triwulan I telah menunjukkan bahwa proses **perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan berada pada jalur yang sesuai dengan arah kebijakan RPJMD**. Meskipun demikian, masih diperlukan upaya percepatan pelaksanaan program, peningkatan kualitas belanja daerah, penguatan monitoring dan evaluasi, serta penyempurnaan target kinerja pada Perubahan RKPD dan Perubahan Renja Perangkat Daerah, khususnya terhadap indikator yang telah mencapai target tahunan pada Triwulan I maupun indikator yang realisasinya masih berada di bawah target yang direncanakan. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan pembangunan serta memastikan tercapainya target pembangunan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026 secara optimal.

8.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil Evaluasi RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026 Triwulan I, beberapa rekomendasi yang perlu menjadi perhatian dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah adalah sebagai berikut.

1. **Mempercepat diversifikasi struktur ekonomi daerah** melalui penguatan sektor pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata, industri pengolahan, dan UMKM agar ketergantungan terhadap sektor pertambangan dapat dikurangi. Pengembangan hilirisasi komoditas unggulan daerah dan peningkatan investasi pada sektor non-ekstraktif perlu menjadi prioritas untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan tahan terhadap fluktuasi komoditas.
2. **Meningkatkan kualitas pembangunan manusia** melalui penguatan akses dan mutu layanan pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Upaya penurunan kemiskinan tidak hanya difokuskan pada penurunan jumlah penduduk miskin, tetapi juga diarahkan pada pengurangan tingkat kedalaman dan keparahan

kemiskinan melalui program pemberdayaan ekonomi masyarakat, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan keterampilan tenaga kerja.

3. **Mendorong pemerataan hasil pembangunan** dengan memperkuat program yang mendukung pemerataan pendapatan, khususnya melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengembangan UMKM, peningkatan konektivitas wilayah, serta peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan dasar sehingga peningkatan pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara lebih merata oleh seluruh lapisan masyarakat.
4. **Melakukan percepatan pelaksanaan program dan penyerapan anggaran** pada triwulan berikutnya melalui penyelesaian lebih awal proses pengadaan barang dan jasa, percepatan penyusunan dokumen teknis, serta penguatan koordinasi antar Perangkat Daerah agar target fisik maupun keuangan dapat tercapai sesuai rencana.
5. **Meningkatkan kualitas pengendalian pelaksanaan RKPD** melalui monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap capaian indikator kinerja dan realisasi keuangan pada setiap Perangkat Daerah. Hasil monitoring tersebut perlu dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan serta percepatan penyelesaian berbagai kendala pelaksanaan program.
6. **Mempertahankan konsistensi antara dokumen perencanaan dan penganggaran** yang telah menunjukkan capaian sangat baik. Seluruh Perangkat Daerah perlu terus menjaga keselarasan antara RPJMD, RKPD, Renja Perangkat Daerah, KUA-PPAS, dan APBD sehingga kualitas implementasi pembangunan tetap terjaga.
7. **Melakukan penyesuaian target indikator kinerja pada Perubahan RKPD dan Perubahan Renja Perangkat Daerah**, khususnya terhadap indikator yang telah mencapai atau melampaui target tahunan pada Triwulan I agar target yang ditetapkan lebih realistis, menantang, dan mencerminkan kondisi pelaksanaan sampai akhir tahun. Sebaliknya, terhadap indikator yang realisasinya masih rendah perlu dilakukan identifikasi penyebab, penyusunan rencana aksi percepatan, serta penyesuaian strategi pelaksanaan apabila diperlukan.
8. **Meningkatkan kualitas data perencanaan dan pelaporan kinerja** melalui penguatan verifikasi data, pemutakhiran basis data pembangunan, serta optimalisasi pemanfaatan sistem informasi perencanaan, penganggaran, dan monitoring evaluasi. Selain itu, Perangkat Daerah perlu memastikan bahwa capaian kinerja yang diinput merupakan capaian tahun berjalan sesuai periode pelaporan untuk menghindari kesalahan pengukuran yang dapat memengaruhi hasil evaluasi.
9. **Memperkuat kapasitas aparatur Perangkat Daerah** dalam penyusunan dokumen perencanaan, pengelolaan kinerja, pengendalian pembangunan, serta evaluasi melalui pembinaan, bimbingan teknis, dan pendampingan secara berkelanjutan sehingga kualitas dokumen perencanaan dan akurasi pelaporan semakin meningkat.
10. **Menindaklanjuti hasil Evaluasi RKPD sebagai dasar penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2026, Perubahan Renja Perangkat Daerah, serta RKPD Tahun 2027.** Seluruh temuan, permasalahan, dan rekomendasi hasil evaluasi perlu diintegrasikan ke dalam proses perencanaan berikutnya agar kebijakan pembangunan semakin adaptif terhadap kondisi aktual, memperkuat efektivitas pelaksanaan program, serta mendukung pencapaian target RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026–2029.

11. Rekomendasi tersebut diharapkan menjadi acuan bagi seluruh Perangkat Daerah dalam melakukan perbaikan berkelanjutan terhadap kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, sehingga penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Kutai Timur dapat berlangsung secara lebih efektif, efisien, akuntabel, dan berorientasi pada pencapaian sasaran pembangunan daerah.